

ISBN 978-602-70002-1-6

**RAIS HIDAYAT
YUYUN ELIZABETH PATRAS**

**BERANI
BICARA
PENDIDIKAN**



THE FINDINGS OF EDUCATIONAL RESEARCH

Pengantar: **Prof. Dr. Sutjipto**

Penerbit
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PAKUAN**

BERANI BICARA PENDIDIKAN, THE FINDINGS OF EDUCATIONAL RESEARCH

Penulis : Rais Hidayat
Yuyun Elizabeth Patras
Kata Sambutan : Dr. Bibin Rubini, M.Pd
Kata pengantar : Prof. Dr. Sutjipto

Hakcipta ©2015, LPP FKIP UNPAK
Jl. Pakuan Kotak Pos 452 Tlp. 0251 8375608 Fax.0251 8375608

All right reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from the publisher or copyright holder.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa seijin dari penerbit atau pemegang hak cipta.

ISBN 978-602-70002-1-6

Research can be undertaken in any kind of environment as long as you have the interest. I believe that true education means fostering the ability to be interested in something.

(Sumio Iijima)

■ SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BERBASIS RISET



Dr. Bibin Rubini, M.Pd

Pelaksanaan pendidikan harus berkualitas. Mengapa? Sebab hanya pendidikan yang berkualitas yang akan mengantarkan seseorang, keluarga, masyarakat dan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita kemajuan kemanusiaan tertinggi.

Jika kita sekarang melihat dan merasakan berbagai kondisi buruk pada diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita, antara lain seperti kekerasan, ketidakadilan, ketidakdisiplinan, korupsi, dan ketertinggalan dalam berbagai hal, tentu salah satu sebabnya karena kita belum maksimal dalam melaksanakan pendidikan yang berkualitas.

Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas harus dimulai dan dilaksanakan secara terintegrasi dari rumah atau keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, media massa dan pemerintah. Tanpa pendidikan yang terintegrasi, maka pendidikan yang berkualitas akan kurang berdampak pada kemajuan masyarakat. Saya ingin memberi contoh pentingnya pendidikan yang terintegrasi. Misalnya mengenai nilai

kasih sayang. Harusnya kasih sayang itu secara konsisten diajarkan dan dicontohkan pada anak-anak kita mulai dari rumah, masyarakat, sekolah, media massa sampai kepada pemerintahan. Jika di rumah si anak diajarkan kasih sayang, namun jika sampai ke lingkungan masyarakat, sekolah dan seterusnya tidak ada kasih sayang, maka lama kelamaan rasa kasih sayang yang diajarkan di rumah itu cenderung terkikis. Pun demikian, jika di sekolah diajarkan dan dicontohkan kasih sayang, namun kalau di rumah disuguhi permusuhan dan kebencian, maka kasih sayang tidak akan tumbuh pada anak-anak kita.

Contoh dalam bidang keadilan. Ada tamu di rumah, secara tidak sengaja tamu tersebut menumpahkan minuman di atas karpet, bagaimana sikap bapak/ibu kepada tamu tersebut? Bapak/ibu akan mengatakan: "oh tidak apa-apa, biar saya bersihkan". Namun bagaimana jika anak sendiri yang secara tidak sengaja menumpahkan minuman itu di atas karpet ruang tamu? Sebagian besar orang tua akan marah dan meminta anak-anak mereka untuk membersihkan karpet tersebut. Pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin nilai keadilan dari sekolah akan terpatri dalam jiwa anak-anak, jika di rumahnya sendiri anak-anak diperlakukan secara diskriminatif.

Dalam bidang kejujuran. Sering terjadi, jika ada orang yang mencari kita, kemudian kita bilang pada anak-anak kita: "Kalau ada yang nyari, bilang tidak ada". Nah, cara orang tua menunjukkan sikap jujur pada anak-anaknya, tentu akan berpengaruh pada perilaku kejujuran anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.

Selain harus terintegrasi seperti dipaparkan di atas, pelaksanaan pendidikan berkualitas harus mendasarkan diri pada penelitian pendidikan (*educational research*). Seperti kita pahami bersama, bahwa penelitian pendidikan itu lahir karena

adanya masalah-masalah dalam pendidikan. Melalui penelitian pendidikan itulah masalah demi masalah dalam pendidikan kita pecahkan, sehingga sampailah pada pelaksanaan pendidikan berkualitas. Tanpa penelitian pendidikan tidak akan ada pelaksanaan pendidikan berkualitas. Pendidikan tanpa penelitian hanya akan jalan di tempat. Oleh karena itu, penelitian pendidikan di Indonesia harus terus didorong dan didukung.

Terbitnya buku berjudul **BERANI BICARA PENDIDIKAN, THE FINDINGS OF EDUCATIONAL RESEARCH**, menurut saya merupakan sebuah inovasi dari para penulisnya yang perlu mendapat apresiasi. Mengapa inovasi? Karena apa yang disajikan penulis dalam buku ini adalah temuan-temuan untuk memecahkan karut marut dan masalah-masalah pendidikan berdasarkan penelitian.

Temuan-temuan penulis dalam penelitian pendidikan yang terekam dalam buku ini meliputi berbagai hal, mulai dari arti penting filsafat pendidikan, manajemen pendidikan, sistem pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan tinggi hingga perilaku organisasi pendidikan. Apa yang disajikan dalam buku ini sudah dipresentasikan dalam seminar, baik nasional maupun internasional. Hasil temuan penelitian pendidikan dari penulis dapat memberikan pada kita tambahan bahkan wawasan baru untuk pelaksanaan pendidikan berkualitas.

Menurut hemat saya, temuan hasil penelitian pendidikan sekecil apapun merupakan sesuatu yang sangat berharga. Penulis buku ini sudah membantu kita dalam hal memberikan alternatif memecahkan karut marut dan masalah-masalah pendidikan melalui penelitian. Tentu saja buku ini akan melengkapi buku-buku pendidikan yang sudah ada dalam upaya melaksanakan pendidikan berkualitas.

Saya mengenal baik kedua penulis buku ini. Rais Hidayat dan Yuyun Elizabeth adalah dosen di Universitas Pakuan (Unpak) di mana saya sebagai rektornya. Sebelum melanjutkan untuk mengambil program Doktor manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), keduanya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan di Unpak dan lulus sebagai lulusan terbaik pada tahun 2011. Selama menjadi mahasiswa dan dosen Unpak, keduanya sangat bersemangat untuk melaksanakan pendidikan berkualitas. Buku yang ditulis mereka ini juga merupakan wujud semangat dan cinta mereka pada pelaksanaan pendidikan berkualitas.

Sebagai pribadi dan atas nama Universitas Pakuan saya menyambut baik atas terbitnya buku ini. Siapa pun yang memiliki komitmen untuk melaksanakan pendidikan berkualitas perlu membaca buku ini.

Bogor, 26 Juni 2015

Dr. Bibin Rubini, M.Pd

Rektor Universitas Pakuan

■ KATA PENGANTAR

V

BELAJAR ADALAH PROSES MEMBONGKAR DAN MEMBANGUN



Prof. Dr. Sutjipto

Saya menyambut gembira atas terbitnya buku yang berjudul **BERANI BICARA PENDIDIKAN, THE FINDINGS OF EDUCATIONAL RESEACH** yang ditulis oleh saudara Rais Hidayat dan Yuyun Elizabeth Patras.

Dari judul yang dipilih kedua penulis tersebut spontan saja dalam pikiran saya bertanya, mengapa penulis yang berani bicara pendidikan tidak berani menggunakan bahasa Indonesia yang utuh. Jawaban hipotetis saya adalah penulis ingin menangkap perhatian calon pembaca untuk membaca bukunya, atau ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa sebagian dari karya itu dipresentasikan di luar negeri, atau untuk memancing diskusi supaya masyarakat terlibat dengan berani membahas masalah sistem pendidikan kita yang menghadapi banyak masalah seperti disorientasi, inerti, politisasi, regulasi dan aturan yang membingungkan, serta praksis pengajaran dalam kelas yang kering akibat guru kehilangan keberanian untuk kreatif.

Terlepas dari itu semua, perkenankanlah saya menyampaikan apresiasi kepada penulis yang telah mengumpulkan karya mereka menjadi buku, berisi bunga rampai tentang masalah-masalah pendidikan dengan dimensi yang amat luas, mulai dari filsafat, teori pendidikan makro, implementasi kebijakan makro dan mikro, serta masalah praksis pengajaran di dalam kelas.

Saya mengenal kedua penulis, karena mereka aktif menyerap, menyimpan, dan melakukan refleksi tentang ilmu yang diperoleh, kemudian menuliskannya. Hal ini terlihat pada waktu-waktu di mana saya mempunyai kesempatan intensif untuk berdiskusi dengan mereka, baik di kelas, dalam melaksanakan penelitian bersama maupun dalam membimbing mereka. Semangat dan pemikiran kritis mereka juga tetap kelihatan dan bahkan berkembang setelah mereka menyelesaikan program doktornya, Mereka dengan konsisten bergerak terus dalam mengkritisi masalah-masalah pendidikan yang berdimensi amat luas.

Membaca tulisan mereka, merangsang kita untuk mencari jawaban tentang pertanyaan sampai di mana perjalanan pendidikan nasional kita sekarang, dan apakah masih konsisten antara Pancasila sebagai filsafat dasar pendidikan kita dengan kebijakan pendidikan yang diambil, implementasi kebijakan tersebut dan praksis pendidikan baik yang terjadi di kelas, maupun yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya. Negara kita belumlah menjadi negara yang kita cita-citakan, yang *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, murah kang sarwo tinuku subur kang sarwo tinandur* (negara yang makmur dan subur, damai dan penduduknya bahagia, apa yang dibeli murah dan apa yang ditanam bertumbuh dan berbuah dengan baik).

Tidak ada yang membantah kenyataan bahwa negara-negara di dunia tidak ada yang sekaya Indonesia. Potensi untuk mencapai cita-cita yang digambarkan nenek moyang kita di atas, sangat besar. Namun demikian pada kenyataannya kita masih perlu mendengar apa yang dikemukakan masyarakat dalam percakapan sehari-hari, bahwa sebenarnya kekayaan kita itu belum menjadi milik kita secara penuh. Negara kita hanya menjadi tempat saja, tetapi yang memiliki adalah orang lain, dan kita hanya membantu mereka mengeksploitasi kekayaan itu.

Perjalanan kita untuk menjadi pemilik sebenarnya dari kekayaan kita kelihatannya masih panjang. Dan untuk itu tidak ada yang dapat memegang peran kunci kecuali pendidikan. Sumberdaya manusia kita melimpah secara kuantitatif, namun kita masih harus bekerja keras merealisasikan kualitasnya. Pendidikanlah yang memegang peran penting dalam merealisasikan cita-cita menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas itu.

Pengambil kebijakan juga harus menyadari bahwa dalam membangun kualitas pendidikan ada hal fundamental yang terkait, yaitu kebijakan dan praksis pengelolaan negara yang sistemik, terkoordinasi dan konsisten; serta semangat dan tindakan untuk melaksanakan cita-cita Pancasila. Kedua hal ini akan mendorong dengan lebih cepat realisasi negara yang adil dan makmur.

Pendidikan, tentu saja, tidak dapat berjalan sendirian, karena akan sangat tergantung kepada, antara lain, masalah kebijakan yang dipilih dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi potensi konflik karena keragaman, memperbaiki tingkat kesehatan, menghilangkan tipuan-tipuan politik praktis dan mengembangkan politik yang membela rakyat, membuat kebijakan ekonomi yang dapat memberdayakan

rakyat dan aspek kenegaraan lainnya. Sebaliknya pendidikan yang berkualitas akan secara berarti mendukung keberhasilan kebijakan-kebijakan di bidang lain itu.

Seperti yang telah saya sampaikan di muka, buku ini membahas masalah yang memiliki spektrum pelangi, namun mempunyai satu tujuan bagaimana kita membuat pendidikan ini menjadi fokus perhatian, mendorong tekad untuk memperbaiki dan melakukan tindakan pendidikan oleh kita semua, baik sebagai pengambil keputusan, pelaksana, pemikir, dan pengunanya.

Kita tidak hanya harus berani bicara, tetapi juga harus berani melakukan berbagai koreksi tentang berbagai masalah di semua aras sistem pendidikan dan suprasistemnya. Keberanian untuk melakukan perbaikan selalu harus dimulai dari keberanian mengakui kesalahan. Ini adalah esensi pendidikan itu sendiri. Tidak ada hari tanpa belajar, karena belajar adalah proses membongkar dan membangun.

Selamat membaca

Jakarta, 15 Juni 2015

Prof. Dr. Sutjipto,
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta

■ DARI PENULIS

MENGAPA HARUS BERANI BICARA PENDIDIKAN?

Sudah banyak buku yang mengkaji pendidikan. Ketika ada ide ingin membuat buku dengan tema pendidikan, muncul pertanyaan mau apa lagi? Mau bicara apalagi? Apakah buku-buku yang sudah ada masih tidak cukup menjelaskan pendidikan? Apakah buku-buku yang ada tidak cukup memberikan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan?

Kami tetap membuat buku dengan tema pendidikan. Buku ini memuat artikel-artikel yang membahas pendidikan. Harapan kami, buku ini mendekati sebuah buku monograf, yaitu monografi yang berisi hasil-hasil penelitian dalam satu bidang ilmu, yaitu ilmu pendidikan.

Buku ini kami beri judul **BERANI BICARA PENDIDIKAN, THE FINDINGS OF EDUCATIONAL RESEARCH**. Pemberian judul tersebut bukan tanpa alasan. Apa saja alasannya?

Pertama, kami berkeyakinan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika kami membaca sejarah para nabi dan rasul yang diutus ke dunia, mereka menggunakan pendidikan sebagai senjata pertama dan utama dalam mengubah dunia. Bukan dengan pemaksaan kehendak dan penggunaan kekerasan. Jadi, jika kita berbicara

agar pendidikan lebih berkualitas, pada dasarnya kita sedang menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul di jaman ini. Kita juga menyaksikan bangsa-bangsa yang maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Cina dan lainnya maju karena pendidikan. Oleh karena itu, jika kita berani bicara pendidikan, maka pada hakikatnya kita sedang bicara untuk memajukan bangsa. Membicarakan bagaimana memajukan bangsa, tentu tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu kita harus terus berani berbicara pendidikan.

Kedua, kami berkeyakinan bahwa bicara pendidikan yang berkualitas harus berdasarkan penelitian pendidikan (*base on educational research*). Penelitian harus diakui menjadi dasar bagi siapapun dan negara manapun yang ingin terdepan. Tradisi dan kualitas penelitian pada seseorang atau sebuah bangsa akan menentukan nasib seseorang dan bangsa tersebut. Harus kita akui bahwa ada korelasi positif antara penelitian dengan kemajuan pada seseorang atau sebuah negara. Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina dan Korea Selatan merupakan negara-negara maju dan tentu saja penelitian di negara-negara tersebut sangat terkemuka.

Kami pada tahun 2015 telah berkunjung ke Korea Selatan, khususnya ke Seoul National University dan Sun Moon University, di sana kami temukan *lesson learn* bahwa penelitian merupakan kunci kemajuan bangsa. Kami juga sudah berkunjung ke Malaysia dan Thailand, kedua negara ini juga maju pesat dalam penelitian dan jurnal ilmiah internasional. Oleh karena itu, buku ini merupakan awal dari karya anak bangsa yang memandang penelitian sebagai sesuatu yang sangat penting dalam memajukan bangsa.

Ketiga, *knowledge sharing* merupakan pintu kemajuan. Kajian termutakhir menunjukkan bahwa *knowledge sharing* merupakan kunci dalam organisasi pembelajar (*learning*

organization). Artinya, sebuah bangsa akan maju jika terus menerus melakukan aktifitas belajar untuk mencapai kemajuan. Artikel-artikel yang ada di dalam buku ini dimaksudkan untuk berbagi informasi dan temuan dari sebuah proses penelitian. Kami sudah menyajikan temuan penelitian pendidikan (*findings of educational research*) berdasarkan kaidah ilmiah yang kami pahami dengan segala keterbatasannya, diharapkan buku ini memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Memang harus kami akui, artikel-artikel hasil penelitian yang ada dalam buku ini masih banyak kekurangan, tentu *feed-back* dari pembaca semua kami nantikan. Jika pembaca ikut aktif menanggapi atas konten dalam buku ini, tentu penelitian-penelitian yang kami akan lakukan di masa depan akan lebih baik lagi. Itulah pentingnya *knowledge sharing*, yaitu kita sebagai bangsa akan menjadi hidup lebih baik.

Keempat, dokumentasi dan refleksi. Buku ini berasal dari penelitian-penelitian yang penulis lakukan dan tersebar di berbagai jurnal pendidikan, prosiding seminar nasional dan prosiding konferensi internasional. Jika dibiarkan berserakan, tidak bisa dilihat sebagai suatu karya yang utuh. Sehingga penulis melakukan upaya dokumentasi dalam bentuk buku. Tujuannya agar penulis dapat dengan mudah melihat apa yang sudah dilakukan, kemudian penulis melakukan refleksi untuk melihat kekurangan-kekurangan agar penulis dapat memperbaikinya di masa depan. Harus kami katakan bahwa kami memang sangat berminat untuk menjadi peneliti yang terpercaya dan terdepan dalam bidang penelitian pendidikan.

Buku ini berisi sebanyak 17 artikel, semua artikel yang dimuat dalam buku ini pernah dimuat dalam jurnal ilmiah maupun prosiding. Ada yang dipublikasikan *online* maupun cetak. Semua artikel tergolong artikel ilmiah karena didasarkan pada

penelitian ilmiah. Ada artikel yang masuk dalam kategori penelitian dengan metode kajian literatur, survei, korelasional atau kausal, penelitian tindakan dan evaluasi. Tingkat keilmiahannya tentu saja tinggi karena sudah melalui seleksi yang dilakukan para *reviewer*, walau tentu saja dengan sekian banyak kekurangan.

Artikel pertama dalam buku ini berjudul FILSAFAT PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN KITA. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan filsafat pendidikan dan aplikasi filsafat pendidikan di Indonesia. Artikel ini menggunakan kajian atas buku John White berjudul *The Aims of Education Restated*, New York: Routledge, 1982 dan Robin Barrow and Ronald Woods berjudul *An Introduction to Philosophy of Education*, New York, Routledge, 1988, kemudian hasil kajian tersebut dikontekstualisasikan dengan problem pendidikan di Indonesia. Temuan dari studi ini yaitu pengkajian atas filsafat pendidikan perlu terus dilakukan agar tujuan instrinsik dan ekstrinsik pendidikan Indonesia dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Artikel ini dipresentasikan dan dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Tantangan dan Peluang Pendidikan Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, 1 April 2015 di Gedung Sertifikasi Universitas Negeri Jakarta dengan ISBN 978-602-17068-8-9.

Artikel kedua berjudul IMPLEMENTASI BERPIKIR SISTEM DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan beberapa cara berpikir atau filsafat antara lain filsafat *positivisme*, *naturalisme* dan filsafat sistem atau berpikir sistem dan bagaimana mengimplementasikan berpikir sistem dalam manajemen pendidikan. Temuan dari kajian ini bahwa seorang manajer atau pemimpin yang ingin melakukan perubahan (inovasi) dalam organisasi pendidikan, maka ia tidak bisa mengandalkan satu disiplin ilmu saja namun harus menguasai berbagai disiplin keilmuan. Artikel

ini dipresentasikan dan dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, 11 Mei 2015 di Aula FKIP Universitas Mathla'ul Anwar Banten dengan ISBN 978-602-95254-1-0.

Artikel ketiga berjudul EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia sejak merdeka. Metode yang digunakan dengan membandingkan apa yang dicita-citakan dalam konstitusi Negara dengan sistem pendidikan nasional dan praktek pendidikan. Temuan dari penelitian yaitu masih ada ketidakkonsistenan dalam politik pendidikan dan praktek pendidikan seperti pendanaan pendidikan, penyiapan guru profesional, dan kesejahteraan guru. Artikel ini dipresentasikan dan dimuat dalam *Proceeding International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE)* di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Malaysia, 7-10 Oktober 2013 dengan ISBN 978-967-12174-1-2.

Artikel keempat berjudul PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERADABAN. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan secara teoretik antara pendidikan dan pembangunan peradaban. Metode yang digunakan untuk pencarian hubungan tersebut melalui studi literatur pengalaman empiris. Temuan dari penelitian bahwa dalam membangun peradaban Indonesia, hendaknya masyarakat Indonesia bisa membuka diri dengan berbagai kebudayaan karena semakin masyarakat bersikap terbuka, maka semakin mungkin masyarakat bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Artikel ini dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, 11 Mei 2015

di Aula FKIP Universitas Mathla'ul Anwar Banten dengan ISBN 978-602-95254-1-0.

Artikel kelima berjudul PERSPEKTIF BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK DALAM PENDIDIKAN 3-T DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur. Temuannya bahwa pendidikan, khususnya di daerah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sangat penting dilakukan. Jika pendidikan di daerah 3T tidak terlaksana dengan baik, maka hal itu akan berpengaruh pada keadaan Indonesia dalam bidang budaya, ekonomi, politik maupun keamanan. Artikel ini dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Bangsa, 26 Juni 2013, Gedung Sertifikasi, Universitas Negeri Jakarta dengan ISSN 977-2338-73000-3.

Artikel keenam berjudul BELAJAR PENDIDIKAN KARAKTER DARI CINA. Metode kajian yang digunakan adalah kajian literatur dengan mengambil beberapa data yang berkembang di media massa. Temuan dari kajian ini yaitu Indonesia sebaiknya dapat belajar dari Cina dalam hal pendidikan karakter. Salah satu kelebihan pendidikan karakter di Cina yaitu pendidikan karakter yang dilakukan secara integral dalam pendidikan moral (*morally*), intelektual (*intellectually*), fisik (*physically*), dan estetika (*aesthetically*). Artikel ini dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Bangsa, 26 Juni 2013, Gedung Sertifikasi, Universitas Negeri Jakarta dengan ISSN 977-2338-73000-3.

Artikel ketujuh berjudul PENDIDIKAN ABAD 21 DAN KURIKULUM 2013: SURVEI TERHADAP GURU-GURU SEKOLAH DASAR MENGENAI KURIKULUM 2013. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan persepsi guru mengenai wacana perubahan kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode survei dan kajian literatur. Temuan dari survei ini bahwa gaung

perubahan kurikulum 2013 sudah sampai ke guru-guru. Tetapi guru-guru masih ragu apakah kurikulum 2013 bisa mengubah mutu pendidikan sesuai tuntutan abad ke 21. Artikel ini selain dipresentasikan dalam Seminar Guru SD Sejabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) yang diselenggarakan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Angkatan 2012/2013, tanggal 5 Februari 2013, dimuat juga dalam Jurnal Pendidikan Pedagogia Volume 5 Nomor 1 Tahun 2013 yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Penelitian FKIP Universitas Pakuan dengan ISSN 1693-5799.

Artikel kedelapan berjudul PERSEPSI GURU KURANG Mendukung Terhadap Implementasi Kurikulum 2013. Artikel ini mendeskripsikan kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum 2013. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan angket. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi guru atas implementasi Kurikulum 2013 kurang mendukung. Berdasarkan temuan penelitian ini disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi Kurikulum 2013 dan meningkatkan pendidikan dan latihan (diklat) khususnya mengenai pengembangan pembelajaran dan evaluasinya. Artikel ini dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Sistem Penilaiannya, 20 September 2013, di Universitas Negeri Manado dengan ISBN 978-602-95254-1-4.

Artikel kesembilan berjudul MANAJEMEN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN TANTANGAN GLOBALISASI: SURVEI DI SEKOLAH DASAR NEGERI DI BOGOR. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dan wawancara. Observasi dilakukan di 50 SDN di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Sedangkan survei dilakukan

kepada 100 guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Penelitian ini merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah manajemen pendidikan sekolah dasar. Temuan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan manajemen di sekolah dasar negeri dalam kategori sudah baik, namun demikian belum sampai diklasifikasikan bahwa manajemen sekolah dasar di Bogor siap menghadapi tantangan globalisasi. Artikel ini dipresentasikan dalam Dies Natalis STT IKAT Jakarta XXIX, 10-11 Februari 2015. Artikel ini juga dipresentasikan dan dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2015, Mewujudkan Mutu Pendidikan yang Unggul dan Berjatidiri Melalui Publikasi Ilmiah untuk Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi, 14 Maret 2015 di Universitas PGRI Semarang dengan ISBN 978-602-0960-13-5.

Artikel kesepuluh berjudul JALAN BERLIKU MEMBANGUN PERGURUAN TINGGI BERMUTU: SURVEI TERHADAP DOSEN UNIVERSITAS SWASTA DI BOGOR. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tantangan perguruan tinggi di Indonesia sekaligus melihat kondisi objektif perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian literatur dan survei kepada dosen universitas swasta di Bogor. Temuan dari penelitian ini yaitu perwujudan pendidikan tinggi bermutu masih berliku dan panjang, antara lain karena kepemimpinan program studi, komunikasi interpersonal dan perilaku etis dosen yang masih perlu ditingkatkan. Artikel ini dipresentasikan dalam Dies Natalis STT IKAT Jakarta XXIX, 10-11 Februari 2015. Artikel ini juga dipresentasikan dan dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2015, Mewujudkan Mutu Pendidikan yang Unggul dan Berjatidiri Melalui Publikasi Ilmiah untuk Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi, 14 Maret 2015 di Universitas PGRI Semarang dengan ISBN 978-602-0960-13-5.

Artikel kesebelas berjudul BUDAYA AKADEMIK DI UNIVERSITAS PAKUAN. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan budaya akademik, khususnya di Universitas Pakuan, sebagai universitas swasta terbesar di Bogor. Metode yang digunakan adalah survei kepada dosen-dosen di lingkungan Universitas Pakuan. Temuan dari penelitian ini yaitu budaya akademik sudah berlangsung di Universitas Pakuan, namun dibutuhkan peningkatan antara lain dalam aspek lingkungan akademik, spirit akademik, dan etika akademik. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Pendidikan Pedagogia, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2014 dengan ISSN 1693-5799.

Artikel kedua belas berjudul *FACTORS CAUSING DIFFICULTIES IN STUDENT LEARNING AND THE SOLUTIONS: A CASE STUDY IN PGSD PROGRAM OF FKIP PAKUAN UNIVERSITY, BOGOR, INDONESIA*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dianggap paling berpengaruh pada kesulitan belajar mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dan wawancara. Temuan penelitiannya bahwa ranking pertama kesulitan belajar mahasiswa adalah rendahnya motivasi, sedangkan solusi yang mereka lakukan adalah terus menerus memotivasi diri sendiri. Artikel ini dipresentasikan di NIDA *International Conference for Case Studies on Development Administration*, 7-8 Agustus 2014, NIDA Bangkok, Thailand dan dimuat dalam Prosiding NIDA, Bangkok 2014.

Artikel ketiga belas berjudul PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran matematika melalui model inkuiri terbimbing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang merupakan hasil kolaborasi

antara dosen dengan mahasiswa. Temuan dari penelitian ini yaitu pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 66 persen dengan kategori baik. Sedangkan nilai rata-rata pada siklus II sebesar 81 dengan kategori sangat baik. Selain itu penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan perubahan aktivitas proses pembelajaran siswa. Artikel penelitian ini dipresentasikan dan dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional dan *Workshop Implementasi Kurikulum 2013* yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan, 15 Februari 2014 dengan ISBN 978-602-70002-0-9.

Artikel keempat belas berjudul BELAJAR KE CINA DALAM MENGELOLA PERGURUAN TINGGI. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan mengenai tantangan perguruan tinggi di Indonesia dan upaya-upaya solusi yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan tinggi. Metode penulisan artikel ini dengan mengkaji sumber-sumber mengenai pengembangan perguruan tinggi, termasuk membandingkannya dengan pengembangan perguruan tinggi di Cina. Hasil dari kajian ini yaitu dalam membangun perguruan tinggi, Indonesia bisa belajar dari Cina. Artikel ini dipresentasikan dan dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional dan *Workshop Implementasi Kurikulum 2013* yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan, 15 Februari 2014 dengan ISBN 978-602-70002-0-9.

Artikel kelima belas berjudul *LECTURER ETHICAL BEHAVIORS: DESCRIPTION OF SURVEY ON SEVERAL PRIVATE UNIVERSITIES IN BOGOR, INDONESIA*. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku etis dosen di universitas swasta Bogor. Penelitian ini menggunakan metode survei kepada 130 dosen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku etis dosen yang perlu diperbaiki yaitu keberanian

dosen dalam melaporkan pelanggaran di universitas tempat mereka bekerja, kemampuan untuk memberikan toleransi dan kemampuan untuk mengembangkan kebebasan akademik. Artikel ini dipresentasikan dan dimuat dalam *Prosiding International Conference on Educational Research and Innovation Ethic in High Quality Research*, 6-7 Mei 2015, di Universitas Negeri Yogyakarta dengan ISSN 2443-1753.

Artikel keenam belas berjudul *LECTURER'S ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB)*. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan mengenai perilaku OCB dosen di Universitas Swasta di Bogor karena peneliti yakin OCB dosen memiliki pengaruh besar pada keberlangsungan lembaga pendidikan. Metode yang digunakan adalah survei kepada dosen. Hasilnya menunjukkan bahwa OCB dosen masih perlu ditingkatkan apalagi perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan besar berupa persaingan antar PTS dan tantangan globalisasi. Artikel ini dipresentasikan dalam *International Conference on Education (ICEDU 2014)* di Universiti Malaysia Sabah, 4-6 Juni 2014 dan dimuat dalam *Proceeding Conference on International Conference on Education* dengan ISBN 978-967-0582-14-6.

Artikel ketujuh belas berjudul *IMPROVING LECTURER ETHICAL BEHAVIOR THROUGH THE REFINEMENT OF HEAD OF DEPARTMENT LEADERSHIP: A CASUALITY STUDY AT SEVERAL PRIVATE UNIVERSITIES IN BOGOR, INDONESIA*. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan cara meningkatkan perilaku etis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis jalur. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan ketua program studi terhadap perilaku etis dosen. Ini berarti untuk meningkatkan perilaku etis dosen diperlukan perbaikan kepemimpinan. Artikel ini dipresentasikan dan

dimuat dalam *Proceeding International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE)* di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan ISBN 978-983-9662-27-6.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan buku ini. Tanpa mereka kami tidak akan bisa mewujudkan cita-cita ini. Kami ingin menyebut satu persatu, namun keterbatasan ruang menyebabkan penulis hanya akan menyebut beberapa saja antara lain: Prof. Dr. Djaali, M.Pd (Rektor UNJ), Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd (Direktur PPs UNJ), Prof. Dr. Ma'ruf Akbar, M.Pd (Asdir I PPs UNJ), Prof. Dr. Mukhneri Mukhtar, M.Pd (Kaprodi MP PPs UNJ), Prof. Dr. Madhakomala, M.Pd (Sekprodi MP PPs UNJ), Prof. Dr. Sutjipto (*Promotor*), Prof. Dr. Soedijarto MA (*Co-Promotor*), Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd (Mantan Kaprodi MP PPs UNJ), Prof. Dr. Soeparno Eko Widodo, M.Pd (sahabat diskusi), Prof. Dr. Theresia K. Ibrahim (sahabat dan *motivator*), Dr. Bibin Rubini, M.Pd (Rektor Universitas Pakuan dan pendukung utama penulis menyelesaikan S3), Drs. Dedy Sofyan, M.Pd (Dekan FKIP Universitas Pakuan), Dr. Eri Sarimanah, M.Pd, (Wadek II FKIP Universitas Pakuan), dan Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi serta semua alumni juga teman Prodi Manajemen Pendidikan S3 angkatan 2012/2013. Tuhan membalas kebaikan yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan dengan balasan yang lebih baik.

Bogor, Juni 2015

Rais Hidayat dan Yuyun Elizabeth Patras

Daftar Isi

Sambutan Rektor Universitas Pakuan	I
Kata Pengantar	V
Dari Penulis	IX
Filsafat Pendidikan dan Pendidikan Kita	01
Implementasi Berpikir Sistem dalam Manajemen Pendidikan	18
Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia	37
Pendidikan dan Pembangunan Peradaban	62
Perspektif Budaya, Ekonomi dan Politik dalam Pendidikan 3-T dan Pembentukan Karakter Bangsa	78
Belajar Pendidikan Karakter Dari Cina	102
Pendidikan Abad 21 dan Kurikulum 2013: Survey Terhadap Guru-guru Sekolah Dasar Mengenai Kurikulum 2013	117
Persepsi Guru Kurang Mendukung Terhadap Implementasi Kurikulum 2013	134
Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Tantangan Globalisasi: Survei di Sekolah Dasar Negeri di Bogor	155

Jalan Berliku Membangun Perguruan Tinggi Bermutu: Survei Terhadap Dosen Universitas Swasta di Bogor 179

Budaya Akademik di Universitas Pakuan 205

Factors Causing Difficulties In Student Learning and The Solutions: A Case Study in PGSD Program of FKIP Pakuan University, Bogor, Indonesia 221

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 244

Belajar Ke Cina dalam Mengelola Perguruan Tinggi 259

Lecturer Ethical Behaviors: Description of Survey on Several Private Universities In Bogor, Indonesia. 279

Lecturer's Organization Citizenship Behavior (OCB) 302

Improving Lecturer Ethical Behavior Through The Refinement of Head of Department Leadership: A Casuality Study at Several Private Universities in Bogor, Indonesia 322

Riwayat Hidup Penulis 343

FILSAFAT PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN KITA

K*ajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan filsafat pendidikan dan penerapan filsafat pendidikan di Indonesia. Secara umum filsafat pendidikan mendeskripsikan hakikat manusia, hakikat ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, cara mentransfer pengetahuan, hakikat nilai, sumber nilai, bagaimana manusia memperoleh nilai, tujuan pendidikan, sumber tujuan pendidikan dan cara manusia mencapai tujuan pendidikan. Menggunakan kajian atas buku John White berjudul *The Aims of Education Restated*, New York: Routledge, 1982 dan Robin Barrow and Ronald Woods berjudul *An Introduction to Philosophy of Education*, New York, Routledge, 1988, kemudian hasil kajian tersebut dikontektualisasikan dengan problem pendidikan Indonesia, maka diperoleh gambaran bahwa kajian atas filsafat pendidikan agar terus dilakukan agar tujuan instrinsik dan ekstrinsik pendidikan Indonesia dapat mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya.*

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai upaya manusia untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) memerlukan wawasan yang sangat luas, karena pendidikan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam pemikiran maupun dalam pengalamannya. Oleh karena itu, pembahasan pendidikan tidak cukup berdasarkan pengalaman saja, melainkan membutuhkan suatu pemikiran yang luas dan mendalam. Atau dengan kata lain pembahasan pendidikan membutuhkan pengkajian filosofis terhadap pendidikan.

Ada alasan kuat mengapa pengkajian filosofis terhadap pendidikan diperlukan, antara lain bahwa kajian filosofis terhadap pendidikan akan membantu memberi informasi tentang hakikat manusia, hakikat ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, cara mentransfer pengetahuan, hakikat nilai, sumber nilai, bagaimana manusia memperoleh nilai, tujuan pendidikan, sumber tujuan pendidikan dan cara manusia mencapai tujuan pendidikan.

Pengkajian filosofis pendidikan sangat penting karena akan berdampak pada kualitas pendidikan. Selama ini kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Krisis yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti maraknya korupsi, kekerasan, dan moralitas yang rendah merupakan gambaran rendahnya mutu pendidikan. Gambaran rendahnya mutu pendidikan juga ditunjukkan oleh kemampuan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang posisinya belum memuaskan dibanding negara lain.

Laporan dari *The Global Competitiveness Report 2010- 2011*, *World Economic Forum* menunjukkan bahwa ranking pendidikan Indonesia ada dibawah Thailand, Brunai Darussalam, Malaysia

dan Singapura. Dalam *Growth Competitiveness Index* (GCI) Indonesia menduduki posisi ke-44 dari 139 negara.

Indonesia memiliki daya saing yang kurang menggembirakan. Hasil penelitian *Global Competitiveness Index* Tahun 2012-2013 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada dalam kategori menengah, yakni mendapatkan skor 4,40 atau masuk dalam klasifikasi "*efficiency-driven economies*". Indonesia kalah oleh Malaysia, mereka mendapat skor 5,06 atau masuk dalam klasifikasi "*transition to innovation-driven economies*". Sedangkan Singapura jauh meninggalkan Indonesia, mereka mendapatkan skor 5,67 atau masuk dalam klasifikasi negara "*innovation-driven economies*".

Indonesia masih tertinggal dalam publikasi ilmiah dan hak paten. Irman Gusman (Kompas, 1 Maret 2014) menjelaskan bahwa dalam kurun 2001-2010 Indonesia hanya menghasilkan 7.847 karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional. Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, masing-masing menghasilkan karya ilmiah di atas 30.000 yang dipublikasikan di jurnal internasional. Demikian juga dalam hal hak paten internasional. Selama 2011, Indonesia hanya mendaftarkan 11 paten internasional, sedangkan Malaysia mengajukan 263 paten dan Thailand 67 paten.

Hafid Abbas di Kompas (2012) memaparkan data mengenai mutu pendidikan di Indonesia antara lain: 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal, dan hanya 10,15 persen yang memenuhi standar nasional pendidikan.

Mutu pendidikan yang rendah seperti tergambar di atas salah satunya karena ketiadaan kajian yang sungguh-

sungguh pada filsafat pendidikan. Selama ini Indonesia kurang memandang penting filosofi pendidikan. Dulu ada jurusan filsafat pendidikan di beberapa perguruan tinggi. Karena sepi peminat dan dianggap tidak memberikan kontribusi pada kemajuan pendidikan, maka jurusan atau program studi itu dihapuskan. Sesungguhnya filosofi pendidikan akan mengantarkan pemahaman yang baik mengenai dunia dan manusia. Selama ini manusia hanya dianggap mengikuti lingkungan, padahal manusialah yang membentuk lingkungan. Negara-negara maju telah berhasil menempatkan manusia dalam posisi yang luhur sehingga mereka mampu mengatasi hambatan yang bersifat lingkungan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menganggap penting hadirnya kajian-kajian atas filsafat pendidikan dari negara-negara maju kemudian dikontektualisasikan dengan kehidupan pendidikan di Indonesia. Kajian ini merupakan salah satu upaya penulis untuk menghadirkan kajian filsafat pendidikan dalam kontektualisasi pendidikan Indonesia. Adapun topik yang berkaitan dengan filsafat pendidikan bersumber dari buku John White berjudul *The Aims of Education Restated* dan buku Robin Barrow dan Ronald Woods berjudul *An Introduction to Philosophy of Educaatian*.

METODOLOGI KAJIAN

Penulisan artikel ini berdasarkan kajian atas buku John White berjudul *The Aims of Education Restated, New York: Routledge, 1982* dan Robin Barrow and Ronald Woods berjudul *An Introduction to Philosophy of Education, New York, Routledge, 1988*, kemudian hasil kajian tersebut dikontektualisasikan dengan problem pendidikan Indonesia. Konteks pendidikan Indonesia diperoleh dari berbagai sumber, baik itu media

massa maupun buku-buku dan laporan-laporan resmi. Melalui metode tersebut, penulis merangkum hal-hal yang berkaitan dengan filsafat pendidikan antara lain hakikat manusia, hakikat ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, cara mentransfer pengetahuan, hakikat nilai, sumber nilai, bagaimana manusia memperoleh nilai, tujuan pendidikan, sumber tujuan pendidikan dan cara manusia mencapai tujuan pendidikan. Hal-hal yang berkaitan dengan filsafat itu kemudian dikontekstualisasikan dengan implementasi pendidikan Indonesia.

HASIL KAJIAN

Topik-topik yang berkaitan dengan filsafat pendidikan sangat luas. Salah satunya adalah pembahasan mengenai tujuan pendidikan. Topik yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dipaparkan oleh John White dalam buku *The Aims of Education Restated*. Dalam kata pengantar bukunya tersebut, White bertanya apakah pendidikan memerlukan tujuan? White menjawab bahwa pendidikan memerlukan tujuan namun siapakah yang membuat tujuan tersebut? Karena pembuat tujuan pendidikan melibatkan banyak pihak, maka tujuan pendidikan menjadi tidak *independen*. Oleh sebab itu, perumusan tujuan pendidikan harus benar-benar diperhatikan.

Tujuan pendidikan menurut White dibagi kedalam dua bagian besar yaitu tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Tujuan intrinsik pendidikan seperti meningkatkan ilmu pengetahuan (*knowledge*) siswa. Sedangkan tujuan ekstrinsik seperti meningkatkan keahlian-keahlian atau keterampilan-keterampilan. Manakah yang paling penting: tujuan intrinsik

atau ekstrinsik? Menurut White tujuan intrinsik lebih penting karena dari pengetahuan akan melahirkan perilaku-perilaku yang diharapkan.

Tujuan intrinsik terkait dengan ilmu pengetahuan yang dianggap baik untuk siswa. Pertanyaannya: ilmu pengetahuan apakah yang baik untuk siswa? Siapa yang merumuskan pengetahuan yang baik untuk siswa? White berpendapat yang baik untuk siswa adalah yang baik menurut siswa itu sendiri. Siapa yang harus merumuskan kebaikan itu? White berpendapat yang harus merumuskannya yaitu guru-guru setelah memperhatikan dengan seksama apa saja yang menjadi kepentingan dan kebutuhan siswa. Oleh sebab itu, White berpandangan bahwa pembelajaran harus "*pupil-centered education*" atau pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi, selain cara pembelajaran yang harus berpusat pada siswa, materi pelajarannya pun harus yang dianggap penting dan dibutuhkan siswa.

Tujuan intrinsik terkait juga dengan pengetahuan yang dianggap baik oleh masyarakat yaitu pendidikan harus meningkatkan ekonomi dan moral masyarakat. White berpendapat bahwa dalam meningkatkan ekonomi dan moral suatu masyarakat, maka pembelajaran harus dikaitkan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa karena perbaikan ekonomi dan moral masyarakat sangat penting dan dibutuhkan siswa.

Salah satu yang penting dalam tujuan pendidikan yaitu apakah tujuan pendidikan tercapai atau tidak. White menunjuk faktor utama keberhasilan pendidikan yaitu perbaikan sosial ekonomi masyarakat yang meliputi perbaikan etos masyarakat, perbaikan kehidupan persekolahan, dan perbaikan lembaga pendidikan lainnya. Perbaikan kehidupan sekolah meliputi perbaikan etos dan kurikulum. Perbaikan institusi pendidikan

meliputi perbaikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Pengembangan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan perbaikan suasana pendidikan dalam keluarga.

Topik filsafat pendidikan selanjutnya terdapat dalam buku Robin Barrow dan Ronald Woods berjudul *An Introduction to Philosophy of Education*. Topik-topik yang dimunculkan antara lain: hakikat pendidikan, hakikat pengetahuan dan kurikulum, hakikat kurikulum, hakikat pemahaman, hakikat indoktrinasi, hakikat berpikir rasional, hakikat penentuan diri sendiri, hakikat kebutuhan dan keinginan, hakikat kreativitas, hakikat budaya, hakikat penelitian pengajaran dan hakikat teori dan praktek. Topik-topik ini dibahas dari sudut makna dan penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan.

Pendidikan menurut Barrow dan Woods adalah sebuah proses yang disengaja dengan cara yang dapat diterima agar siswa dapat menjadi manusia yang berpendidikan (*educated man*). Implikasi dari pendapat ini bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat diterima secara akal sehat. Adapun *educated man* sebagai tujuan akhir dari pendidikan bercirikan antara lain: memiliki keterampilan, berkarakter, memiliki standar dalam kehidupan, dan memahami wawasan dalam memandang kehidupan.

Pendidikan akan mencapai tujuannya melalui pemberian pengetahuan dari kurikulum yang sudah dipersiapkan. Pengetahuan memiliki tingkatan. Pemahaman manusia atas pengetahuan tergantung dari pengalaman manusianya itu sendiri. Secara umum pengetahuan memiliki konsep seperti konsep gravitasi, hidrogen, pengetahuan memiliki korelasi dengan pengalaman, pengetahuan memiliki logika yang masuk akal, dan pengetahuan dapat dieksplorasi lebih dalam. Semua pengetahuan yang akan ditransfer ke siswa tercantum dalam kurikulum yang disiapkan.

Salah satu hal penting dari pendidikan adalah pemahaman (*understanding*). Konsep *understanding* lahir dari *know to do* atau mengetahui dalam melakukan sesuatu. Barrow dan Woods berpendapat bahwa pemahaman memiliki tingkatan, tingkat terakhirnya adalah pemahaman yang utuh (*complete understanding*). Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya diarahkan pada pemahaman yang utuh. Dalam meningkatkan pemahaman yang utuh, maka pengajar harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dan efisien.

Indoktrinasi menjadi salah satu topik filsafat pendidikan yang dipaparkan Barrow dan Woods. Indoktrinasi merupakan praktek pendidikan yang harus dihindari karena indoktrinasi merupakan tindakan yang kurang menghargai rasionalitas individu. Indoktrinasi bisa terjadi jika pendidikan memaksakan sistempolitik, agama, dan kepercayaan pada siswa yang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan siswa. Indoktrinasi bisa terjadi dalam metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan situasi pembelajaran.

Topik lain dalam pendidikan yaitu rasional dan tidak rasional (*irrationale*). Pendidikan seharusnya bertujuan untuk melahirkan perilaku manusia yang rasional yaitu suatu perilaku yang alasannya dapat dijelaskan secara rasional. Sedangkan perilaku *irrationale* merupakan perilaku yang tidak memiliki dasar yang relevan. Oleh sebab itu, pendidikan harus diorientasikan untuk menghormati lahirnya cara berpikir yang benar. Karena cara berpikir yang benar akan menuntun seseorang berperilaku rasional.

Topik filsafat pendidikan selanjutnya adalah mengenai penentuan oleh diri sendiri (*self-determination*) yaitu menentukan apapun bukan oleh kehendak orang lain, namun oleh kehendak diri sendiri. Kemampuan ini akan tercapai jika seseorang mempunyai kecakapan berfikir dalam

merefleksi, mengkalkulasi, mengingat, memprediksi, menilai, dan memutuskan. Kemampuan ini dibangun dalam suasana adanya pilihan-pilihan. Karena seseorang dikatakan mampu menentukan pilihan jika memang ada alternatif-alternatif yang diberikan. Oleh sebab itu pendidikan harus secara pasti memberikan kebebasan pada siswa untuk mampu memilih tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan tanpa ditanya untuk apa pilihan ini diambil. Pendidikan harus mampu melahirkan kemampuan dan keterampilan untuk memilih.

Topik filsafat pendidikan selanjutnya adalah kebutuhan, kepentingan dan pengalaman siswa (*needs, interests, dan experience*). Topik ini lahir dari pemikiran bahwa seseorang tidak mungkin mampu untuk menentukan dirinya sendiri tanpa mendasarkan pada kebutuhan, kepentingan dan pengalaman siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan harus berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (*child-centered education*). Pendidikan berorientasi seperti itu akan menjadikan tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri adalah kehendak siswa itu sendiri. Namun pertanyaannya apakah siswa mampu mengenal kebutuhan, kepentingan dan pengalamannya sendiri? Tentu saja orang-orang dewasa harus mampu menangkap apa saja yang dibutuhkan dan dipentingkan siswa, khususnya untuk masa depan anak-anak.

Topik filsafat pendidikan selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kreatifitas siswa. Kreatifitas selalu berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu seseorang yang kreatif akan memiliki produktivitas yang tinggi. Ciri orang yang kreatif yaitu mampu menghasilkan sesuatu atas idenya sendiri dan dia bekerja atas dasar pemikiran yang rasional. Untuk menciptakan siswa-siswi yang kreatif dibutuhkan metode pengajaran yang menekankan pada *discovery learning*. Metode tersebut akan membangkitkan semangat kreatifitas dalam belajar.

Topik filsafat pendidikan selanjutnya adalah kebudayaan yaitu segala sesuatu yang membuat hidup lebih bernilai (*make life worth living*). Kebudayaan apakah yang akan diajarkan kepada siswa? Sangat sulit untuk menjawab hal itu karena secara faktual banyak sekali standar kebudayaan sehingga sulit untuk menentukan budaya manakah yang akan diajarkan. Ada budaya elit, budaya tinggi, budaya rendah, budaya baca dan budaya tutur. Ketika ada anggapan bahwa hanya budaya baca yang harus dikembangkan, namun di sisi lain budaya bertutur juga harus tetap dikembangkan. Oleh sebab itu, merumuskan budaya manakah yang dijadikan standar dalam pendidikan sangat sulit dan perlu kesepakatan bersama.

Topik filsafat pendidikan paling akhir dalam buku *An Introduction to Philosophy of Education* ini adalah pembahasan teori ilmu pendidikan. Barrow dan Woods menjelaskan 4 jenis teori yaitu teori matematika (*mathematical theories*), teori ilmu alam (*theories of natural science*), teori ilmu sosial (*social scientific theories*) dan teori pendidikan, yaitu gabungan antara ilmu sosial dan praktik. Lebih tepatnya teori pendidikan itu sebagai “*thinking things through*” karena teori pendidikan tidak berhubungan dengan praktik di kelas. Penyebab tidak terjadinya hubungan tersebut karena pelaku (guru) memiliki perbedaan dalam mempraktekan teori, misalnya ada kesalahan yang dilakukan siswa, maka tiap guru melakukan penghukuman secara berbeda terhadap siswa tersebut. Itulah sebabnya, teori pendidikan disebut tidak berhubungan dengan praktik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengkajian dua buku di atas dapat dianalisis beberapa hal yang menyangkut pendidikan di negara

Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan yaitu antara lain tujuan pendidikan, materi pelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi atas pembelajaran.

Pertama, pentingnya upaya bersama untuk merefleksikan kembali tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan Indonesia harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan peserta didik serta kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia kini dan masa depan. Tujuan pendidikan yang jauh dari kepentingan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat akan melahirkan sebuah pendidikan yang tidak relevan. Sebagai sebuah contoh, Indonesia merupakan negara agraris dan kelautan, namun perhatian pendidikan Indonesia tidak diorientasikan untuk memperkuat kenyataan tersebut. China yang kini maju mengorientasikan pendidikan negaranya pada bidang agraris karena realitas masyarakat China memang demikian. Ini bukti bahwa tujuan pendidikan harus kembali dipertanyakan agar pendidikan dapat mendorong kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Kedua, perlunya merumuskan metodologi pembelajaran yang lebih *discovery learning* dan pembelajaran yang *child-centered learning*. Hasil survei atas siswa siswi Indonesia menunjukkan bahwa Global Institute pada tahun 2007 menunjukkan hanya 5 persen siswa Indonesia yang mampu mengerjakan soal yang bersifat penalaran. Oleh karena itu, paradigma *teacher-center education* harus segera diimbangi dengan *student-centered learning* (STL). STL akan lebih mendorong melahirkan siswa yang kreatif, inovatif dan adaptif.

Ketiga, perlunya evaluasi berkesinambungan atas hasil-hasil pendidikan saat ini untuk diproyeksikan ke masa depan. Evaluasi berkesinambungan diperlukan untuk melihat sejauh mana yang sudah dicapai dan di titik mana yang paling lemah. Berikut adalah beberapa titik lemah secara makro dan mikro

dalam pendidikan. Dari berbagai literatur dan sumber dapat disimpulkan bahwa secara makro pendidikan Indonesia menunjukkan titik lemah sebagai berikut:

1. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan Indonesia masih rendah. Mutu pendidikan yang rendah tersebut berimplikasi pada kehidupan sosial, politik, ekonomi dan keseluruhan kehidupan masyarakat Indonesia. Krisis yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti maraknya korupsi, kekerasan, dan moralitas yang rendah merupakan gambaran rendahnya mutu pendidikan.
2. Pemanfaatan ilmu dan teknologi yang belum maksimal. Belum dimanfaatkannya secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan akibat rendahnya kesadaran dan penguasaan teknologi para pelaku pendidikan. Dengan kata lain para pelaku pendidikan tidak bisa memacu lebih cepat mutu pendidikan dengan memanfaatkan teknologi. Jika kita observasi ke beberapa sekolah dasar di Bogor, masih banyak sekolah yang belum memanfaatkan teknologi seperti penggunaan projector dan media pembelajaran yang menunjang mutu pendidikan lainnya.
3. Masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*) belum berkembang maksimal. Belum berkembangnya budaya belajar dalam masyarakat. Aneka kekerasan dan hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti tawuran pelajar, tawuran mahasiswa dan pengrusakan rumah ibadah terus terulang karena masyarakat tidak mampu mengambil pelajaran dari hal-hal yang pernah terjadi dalam masyarakat untuk meningkatkan mutu masyarakat.
4. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih belum sesuai

dengan tantangan peningkatan mutu. Adanya sertifikasi guru adalah upaya meningkatkan profesionalisme guru, namun langkahnya tidak mudah. Negara sangat berat membiayai sertifikasi guru dan guru yang sudah bersertifikat tidak menjamin bekerja secara profesional. Gaji guru juga masih rendah, khususnya guru-guru sukarelawan dan honorer serta gaji guru diwilayah-wilayah terpencil.

5. Menurunnya status kesehatan dan gizi sebagian peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar. Apalagi ke depan pertumbuhan ekonomi dunia terus melambat dan inflasi terus meninggi sehingga peserta didik dari kalangan bawah (miskin) akan sangat sulit mendapi kehidupan dan mengikuti pendidikan.
6. Terjadinya gejala umum menurunnya moral, budi pekerti dan rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda. Kenyataan ini menuntut dunia pendidikan melakukan maksimalisasi pendidikan karakter dan akhlak budi pekerti.
7. Masalah ketersediaan layanan dan jangkauan pendidikan baik untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), usia sekolah dasar (SD), sekolah menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan orang dewasa berkelanjutan.
8. Masalah relevansi pendidikan. Dimana para lulusan sekolah, apalagi lulusan perguruan tinggi banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi dan negara tidak hanya wajib menyediakan pendidikan namun juga wajib menjaga dan melindungi pendidikan yang bermutu dan relevan bagi masyarakat.
9. Masalah kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Dimana pendidikan bukan hanya untuk

segelintir dan sekelompok orang saja, namun pendidikan harus diupayakan berjalan melayani semua pihak dan golongan.

Secara mikro (sekolah) masalah pendidikan yang terjadi antara lain:

1. Masalah manajemen dan kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah berperan strategis dalam menentukan mutu pendidikan. Kepala sekolah berperan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Sering terdengar sindiran bahwa tidak ada siswa yang bodoh, tapi yang ada adalah guru yang tidak bisa mengajar, tidak ada guru yang tidak bisa mengajar, tapi yang ada adalah kepala sekolah yang kinerjanya tidak efektif dan efisien. Namun keadaan mutu kepala sekolah sekarang ini pada *level* "menengah", dalam arti buruk sekali tidak dan bagus sekali juga tidak. Selain itu kepala sekolah tidak bisa bekerja maksimal karena kepala sekolah sangat terintervensi oleh birokrasi dan politik. Keadaan ini menyebabkan otonomi pendidikan di tingkat sekolah tidak berjalan dengan baik.
2. Masalah guru yang kurang berkualitas dan rendahnya komitmen dari guru. Untuk guru-guru SD, hanya 25 persen yang S1, hal ini menyebabkan mutu pendidikan di sekolah kurang baik. Ditambah dengan minimnya komitmen guru atas tugasnya sehingga menambah beban pada peningkatan mutu pendidikan.
3. Masalah mata pelajaran yang terlampau banyak. Adanya kebijakan otonomi pendidikan memang patut disambut baik, namun karena kebablasan maka peserta didik banyak dijejali dengan mata pelajaran yang sangat memberatkan peserta didik.

4. Masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak didukung oleh perpustakaan, toilet yang bersih dan sarana pendidikan lainnya. Hal ini menyebabkan iklim sekolah yang tidak mendukung bagi mutu pendidikan.

Terakhir atau keempat bahwa perlu melakukan perubahan *mind-set*, *cultural-set* dan perubahan birokrasi pendidikan yang lebih mendukung untuk terlaksananya pendidikan yang berkualitas.

Mind-set atau pola pikir yang mendukung mendukung peningkatan mutu pendidikan perlu terus dilakukan. Langkah Presiden Joko Widodo mencanangkan dan melaksanakan revolusi mental dalam pendidikan harus diapresiasi, namun langkah tersebut belum begitu terasa.

Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan yang mengubah tujuan Ujian Nasional untuk persyaratan kelulusan menjadi hanya semata-mata pemetaan pendidikan perlu diapresiasi juga karena sedikit banyak hal itu mengubah *mind set* pendidik yang awalnya sering mengutak atik perstasi pendidikan siswa menjadi lebih apa adanya.

Cultural-set atau nilai-nilai, norma aturan dan kebiasaan dalam masyarakat yang mendukung pendidikan dalam masyarakat perlu terus dikembangkan. Pelestarian budaya adat yang memperkuat pendidikan, seperti budaya pela gandong di Maluku yang memperkuat budaya persaudaraan, budaya *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh* di Masyarakat Jawa Barat yang memperkuat ketahanan dan kemajuan budaya Indonesia perlu terus dikembangkan.

Perubahan birokrasi pendidikan sehingga lebih mendukung pendidikan berkualitas. Ada cerita dari seorang yang menjadi

kepala unit pendidikan di sebuah kecamatan di Depok Jawa Barat, dia tidak tenang dalam bekerja karena politik di kecamatan tersebut selalu mengintervensi pendidikan. Sewaktu-waktu dia dapat dimutasi tanpa alasan yang masuk akal. Intinya perbedaan politik bisa menjadi pemicu mutasi. Ke depan jangan ada lagi intervensi birokrasi oleh perbedaan politik. Birokrasi pendidikan harus berjalan sesuai dengan birokrasi moderen yang efektif dan efisien serta penilaian pada seorang birokrat harus berbasis kinerja, bukan lainnya.

KESIMPULAN

Pengkajian atas filsafat pendidikan sangat mendesak untuk dilakukan agar tujuan instrinsik dan ekstrinsiknya benar-benar sesuai dengan keadaan manusia Indonesia. Pelaksanaan pendidikan dapat mencapai hasil yang maksimal jika didukung oleh SDM pendidikan yang berkualitas dan lingkungan sosial ekonomi yang mendukung. Salah satu SDM pendidikan yang berkualitas adalah memiliki pemahaman mendalam mengenai filsafat pendidikan.

Berdasarkan filsafat pendidikan, pendidikan Indonesia perlu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan masyarakatnya sehingga pendidikan itu menjadi relevan dan mampu membawa bangsa ini pada kemajuan. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah perlu memperbanyak *student-center learning* (pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada siswa) daripada *teacher-ceter learning* (pembelajaran berpusat pada guru). Selain itu juga materi pelajaran di sekolah perlu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- White, John. *The Aims of Education Restated*. New York: Routledge, 1982.
- Barrow, Robin and Ronald Woods. *An Introduction to Philosophy of Education*. New York: Routledge, 1988.
- Hafid Abbas. *Ke Mana Arah Prioritas Pendidikan Nasional?* Harian Umum Kompas. Jakarta: 2012.
- Frankena, K. William. *Philosophy of Education*. Taipei: Central Book Co. 1966.
- Uyoh Saduloh. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Cipta Utama. 2007.
- Slattery Patrick. *Curriculum Development in The Post Moderen Era*. New York: Routledge, 2006.

IMPLEMENTASI BERPIKIR SISTEM DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Tujuan dari penulisan artikel untuk mendeskripsikan beberapa cara berpikir atau filsafat antara lain filsafat positivisme, naturalisme dan filsafat sistem atau berpikir sistem dan bagaimana mengimplementasikan berpikir sistem dalam manajemen pendidikan. Filsafat positivisme adalah sebuah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang menekankan empirisme. Filsafat naturalisme adalah filsafat yang pandangannya sebagai reaksi atas positivisme sehingga filsafat naturalisme memberi energi baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat sistem yaitu memandang objek dengan cara pandang sistem yaitu memandang berbagai elemen yang ada dalam objek tersebut sehingga produk yang dihasilkannya berupa pemikiran atas objek secara menyeluruh (holism). Menyelesaikan masalah pendidikan melalui berpikir sistem membutuhkan penguasaan berbagai disiplin keilmuan. Artinya, seorang manajer atau pemimpin yang ingin melakukan perubahan (inovasi) dalam organisasi pendidikan, maka ia tidak bisa mengandalkan satu disiplin ilmu saja namun harus menguasai berbagai disiplin keilmuan lainnya.

PENDAHULUAN

Praktek manajemen, khususnya dalam manajemen pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya dipengaruhi oleh cara berpikir. Hal yang paling pokok dari cara berpikir seseorang, termasuk manajer atau pimpinan sebuah lembaga pendidikan adalah filosofi seperti apa yang mereka yakini dan kembangkan dalam menangani masalah yang terjadi di dalam lembaga pendidikan yang mereka hadapi.

Ada manajer atau pimpinan yang dalam menangani masalah lebih fokus pada masalahnya. Misalnya, jika ada karyawan atau dosen yang tidak memenuhi kinerja, manajer atau pimpinan langsung memecatnya. Ada juga manajer atau pimpinan yang melihat masalah dalam lembaganya melihat dari berbagai aspek, sehingga ketika memutuskan sesuatu melihat dari berbagai aspek. Atas dasar kenyataan seperti itu maka sangat penting untuk memahami berbagai cara berpikir atau filosofi setiap manajer atau pimpinan.

Terdapat beberapa penjelasan atas cara berpikir atau filosofi yang memengaruhi manajer atau pemimpin, antara lain filsafat positivisme, filsafat naturalisme dan filsafat sistem atau berpikir sistem. Memaknai beberapa cara berpikir tersebut akan membantu kita dalam memahami cara manajer atau pemimpin dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan cara berpikir sistem dan implementasinya dalam manajemen pendidikan. Tulisan ini diharapkan menambah wawasan bagi para panajer dan pemimpin lembaga pendidikan dalam upaya mengimplementasikan manajemen yang lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

FOKUS KAJIAN

Fokus kajian yang diuraikan dalam penulisan ini sebagai berikut: Apakah hakikat filsafat positivisme, filsafat naturalisme dan filsafat sistem atau berpikir sistem? Apa kelebihan berpikir sistem? Bagaimana implementasi berpikir sistem dalam manajemen pendidikan?

PEMBAHASAN

Filsafat Positivisme

Filsafat Positivisme menekankan pada pemikiran bahwa ilmu pengetahuan bersifat empiris (bukan hanya logis teoretis tetapi dapat dibuktikan). Positivisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang dapat dilihat, ditangkap dan diamati oleh indra manusia merupakan pengetahuan yang benar. Sementara segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dan bersifat metafisik bukanlah merupakan sebuah pengetahuan. Filsafat Positivisme sebagai sebuah aliran filsafat ilmu pengetahuan berkembang pada abad 19 yang dipopulerkan oleh Auguste Comte.

Francis Bacon lebih jauh menjelaskan mengenai positivisme bahwa ilmu pengetahuan yang sejati dapat ditemukan ketika manusia menggabungkan kemampuan inderawi dengan dunia fakta. Ia merumuskan bahwa pertanyaan pengamatan awal merupakan hal yang penting untuk mengetahui sesuatu, selanjutnya manusia diharuskan untuk membedakan prasangka, keinginan dan kepentingan pribadinya dalam melakukan percobaan sehingga melalui pemikiran induktif pengetahuan yang benar akan ditemukan. Akhir dari positivisme adalah ilmu pengetahuan yang objektif dan bebas nilai.

Asumsi dasar positivisme mengenai ilmu pengetahuan yang objektif dan bebas nilai mendapat kritik dari madzab ilmu pengetahuan lainnya.

Secara garis besar terdapat dua kritik utama dalam madzab positivisme yaitu: Pertama adalah penjelasan positivisme akan fakta dan realitas sosial tidaklah lebih dari sebuah asumsi karena tidak ada realitas sosial yang benar-benar objektif. Kedua positivisme telah berkembang dalam lingkungan tertentu dan menjadi sangat konservatif atau cenderung menolak pada perubahan.

Berdasarkan penjelasan diatas simpulan penulis atas filsafat positivisme adalah sebuah aliran filsafat ilmu pengeahuan yang menekankan empirisme, selanjutnya positivisme menjadi kurang menarik karena terjebak konservatifisme.

Filsafat Naturalisme

Naturalisme merupakan teori yang menerima "*nature*" (alam) sebagai keseluruhan realitas. Istilah "*nature*" telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada keseluruhan sistem dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar alam.

Filsuf Naturalisme yaitu William R. Dennes menyebutkan beberapa pandangan mengenai naturalisme yaitu: (1) Kejadian dianggap sebagai kategori pokok, bahwa kejadian merupakan hakekat terdalam dari kenyataan, artinya apapun yang bersifat

nyata pasti termasuk dalam kategori alam; (2) Yang nyata ada pasti bereksistensi, sesuatu yang dianggap terdapat diluar ruang dan waktu tidak mungkin merupakan kenyataan dan apapun yang dianggap tidak mungkin ditangani dengan menggunakan metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam tidak mungkin merupakan kenyataan; (3) Analisa terhadap kejadian-kejadian, bahwa faktor-faktor penyusun segenap kejadian ialah proses, kualitas, dan relasi; (4) Masalah hakekat terdalam merupakan masalah ilmu, bahwa segenap kejadian baik kerohanian, kepribadian, dan sebagainya dapat dilukiskan berdasarkan kategorikategori proses, kualitas dan relasi; (5) Pengetahuan ialah memahami kejadian-kejadian yang saling berhubungan, pemahaman suatu kejadian, atau bahkan kenyataan, manakala telah mengetahui kualitasnya, seginya, susunanya, satuan penyusunnya, sebabnya, serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan kami mengenai filsafat naturalisme adalah filsafat yang pandangannya sebagai reaksi atas positivisme sehingga filsafat naturalisme memberi energi baru dalam bidang ilmu pengetahuan.

Filsafat Sistem

Ludwig Von Bertalanffy (1940) memberikan pengertian sistem sebagai suatu set elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan. Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Sistem berbergerak karena ada energi.

Sistem digunakan untuk menunjukkan suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling berhubungan atau saling ketergantungan yang teratur. Contoh: sistem tata surya, ekosistem.

Sistem digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi amat vital. Contoh : sistem syaraf.

Sistem digunakan untuk menunjukkan sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun/terorganisasikan. Contoh: sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokrasi. Sistem dipergunakan dalam arti metode atau tata. Contoh: sistem mengetik sepuluh jari, sistem pembelajaran. Sistem dipergunakan untuk menunjukkan pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, atau mode tatacara.

Berpikir sistem menurut Peter Senge (1990) adalah suatu disiplin ilmu untuk melihat struktur yang mendasari situasi kompleks, dan untuk membedakan perubahan tingkat tinggi terhadap perubahan tingkat rendah. Tentu saja, berpikir sistem dapat mempermudah hidup karena dapat membantu untuk melihat pola yang lebih dalam yang mendasari beberapa peristiwa dan detailnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka yang dimaksud berpikir sistem adalah memandang objek dengan cara pandang sistem yaitu memandang berbagai elemen yang ada dalam objek tersebut sehingga produk yang dihasilkannya berupa pemikiran atas objek secara menyeluruh (*holism*).

Ludwig von Bertalanffy (1937) mengenalkan untuk pertama kalinya konsep Teori Umum Kesisteman yang kemudian dibukukan dalam judul *General Sistem Theory, Foundations,*

Development, Applications atau Teori Umum Kesisteman: Pondasi, Pembangunan, Penerapan. Buku ini menjadi inspirasi dalam gerakan berpikir sistem modern.

Perang Dunia ke II telah mendorong berkembangnya berpikir sistem karena berpikir sistem berhasil membantu tentara Inggris dan AS dalam perang dunia 2. Awalnya tentara Inggris ingin menerapkan ilmu pengetahuan untuk operasi militer. Maka dibentuk tim ilmuwan yang terdiri dari sejumlah pengacara, ahli sosial, ahli matematika, ahli astronomi, dan juga pertahanan. Meskipun perbedaan latar belakang, mereka muncul dengan pola yang umum yaitu ada konsistensi terhadap konsep sistem. Penggunaan metode berpikir sistem dalam perang dunia 2 ini menyebabkan Inggris dan Amerika menang.

Perbedaan berpikir sistem dengan berpikir non-sistem dapat dilihat dari logika metafisiknya. Holism atau berpikir secara menyeluruh merupakan dasar ontologi dan epistemologi berpikir sistem. *Holism* sebagai landasan metafisika berpikir sistem sehingga dari sudut ini pemikiran sistem bisa dipandang sebagai suatu *meta-sains*.

Berdasarkan logika metafisik sistem, *Boulding* menguraikan 9 (sembilan) tingkat sistem mulai yang paling sederhana sampai pada fenomena sistem paling kompleks sebagai berikut:

- (1) Struktur statis—penataan planet-planet dalam tatasurya;
- (2) Sistem dinamis sederhana—kebanyakan mesin dan kebanyakan fisika Newton;
- (3) Sistem *cybernetic*—mekanisme control, seperti thermostat;
- (4) Sistem terbuka—struktur yang berlangsung-sendiri, seperti sebuah sel;

- (5) Sistem sosial genetic—pembagian kerja, termasuk subsistem, seperti sebuah tumbuhan;
- (6) Sistem hewan—mencakup kesadaran-diri dan mobilitas, juga subsistem-subsistem terkhusus untuk menerima dan mengolah informasi dari dunia luar;
- (7) Sistem manusia—mencakup kapasitas bagi kesadaran-diri, dan penggunaan simbolisme untuk menyampaikan ide-ide;
- (8) Organisasi-organisasi social—manusia sebagai subsistem di dalam organisasi yang lebih besar, atau sistem;
- (9) Sistem-sistem *transendental*—alternatif dan hal yang tak bisa diketahui yang masih perlu untuk ditemukan.

Ciri-ciri sistem memberikan dasar logis dari sistem itu. Para teoriwan sistem percaya bahwa logika sistem bisa digunakan sebagai suatu logika riset. Ada pola-pola serupa pada makhluk hidup yaitu hidup, tumbuh, matang, dan akhirnya mati.

Salah satu dasar berpikir sistem yaitu logika sistem terbuka. Logika ini sangat banyak gunanya dalam menganalisis berbagai organisme hidup, bahkan berguna sebagai suatu dasar penyelidikan atas teori-teori organisasi modern dan metode-metode pengembangan organisasi. Berbeda dari suatu sistem tertutup, sebuah sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut ciri-ciri sistem terbuka:

- (1) Masukan (*in-put*) yaitu sistem terbuka memasukkan energi dari lingkungan luar;
- (2) Ubahan (*through-put*) yaitu proses mengubah energi yang tersedia dalam sistem itu;
- (3) Keluaran (*out-put*) yaitu energi yang dikeluarkan ke lingkungan setelah masukan diolah menjadi keluaran;

- (4) Siklus peristiwa-peristiwa yaitu kegiatan-kegiatan bertukar energi yang berpola siklus (berputar). Dalam mengubah masukan menjadi keluaran proses itu sendiri mengalami beberapa tahap siklus keluaran seketika sebelum mencapai bentuk akhir keluaran. Misalnya, dalam sistem pendidikan di sekolah dasar, siswa barunya diubah ke kelas dua dalam tahun pertama, yang kemudian diubah ke kelas tiga dalam tahun berikutnya, dan seterusnya. Di sisi lain, siswa baru itu memasuki sistem pendidikan itu setiap tahun ajaran yang memungkinkan kelangsungan proses perubahan di dalam sistem itu;
- (5) Entropi negatif yaitu proses menetralkan proses entropi untuk bertahan hidup. Proses entropi adalah hukum universal yang berlaku pada semua makhluk hidup yang bergerak ke arah kekacauan atau kematian. Sistem terbuka menyimpan energi dengan mengimpor energi lebih daripada yang perlu untuk dikeluarkan, dan memakai energi ini dalam masa krisis;
- (6) *Cybernetic* yaitu kemampuan sistem untuk mendeteksi lingkungan berdasarkan alat penyerap informasi, misalnya sistem dalam *Air Conditioner* (AC);
- (7) Teleologis yaitu suatu pertukaran energi terus-menerus berjalan untuk mencapai tujuan tertentu;
- (8) Diferensiasi yaitu proses pertumbuhan yang bergerak ke arah diferensiasi atau arah yang berlainan namun tetap dalam satu sistem;
- (9) *Equifinality* (ekuifinalitas) adalah kemampuan sistem itu untuk mencapai keadaan akhir dari kondisi-kondisi awal berbeda dan dengan beragam jalan.

Berdasarkan uraian di atas, tabel berikut merupakan kesimpulan perbedaan pokok Positivisme, Naturalisme dan Berpikir Sistem:

Tabel 1.
Positivisme, Naturalisme dan Berpikir Sistem

Aspek	Positivisme	Naturalisme	Berpikir Sistem
Realitas	Realitas itu satu (<i>single</i>), nyata, dan dapat diuraikan.	Realitas itu tidak satu (<i>multiple</i>), dibangun dari persepsi (<i>constructed</i>), dan menyeluruh	Realitas yang satu itu dipersepsikan secara berbeda-beda sehingga menghasilkan aksi yang berbeda.
Hubungan peneliti dan objek	Peneliti dan objek bersifat independen, dualisme	Peneliti dan objek terjadi interaksi, tidak bisa dipisahkan	Peneliti dan objek berinteraksi namun peneliti bisa independen.
Generalisasi	Hasil generalisasi berlaku di semua tempat	Generalisasi hanya berlaku ditempat yang diteliti.	Menggunakan interdisiplin dan multidisiplin ilmu dalam mengambil simpulan.
Sumber Penyebab	Ada penyebab yang jelas dan berefek secara berkelanjutan	Penyebab berlaku terbatas	Sumber penyebab tidak tunggal
Nilai	Bebas nilai	Terikat nilai	Tidak bebas nilai

Walaupun Positivisme, Naturalisme dan Berpikir Sistem terlihat berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan yaitu sama-sama sebagai upaya manusia dalam memahami realitas melalui riset, namun ketiganya berbeda dalam mendekati realitas

tersebut. Lincoln dan Guba mengatakan bahwa kini terus terjadi perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan yaitu dari *simple* ke *complex*, dari *hierarchi* ke *heterarchi*, *mechanical* ke *holographic*, *determinate* ke *indeterminate*, *linearly causal* ke *mutually causal*, *assembly* ke *morphogenesis*, dan *objective* ke *perspective*. Perubahan dalam paradigma yang terus menerus itu melahirkan berbagai ilmu pengetahuan baru yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Berpikir sistem tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan berbagai disiplin atau ilmu pengetahuan lainnya. Hal tersebut sudah menjadi struktur logis dari berpikir sistem, karena penyelidikan komponen-komponen dalam sistem membutuhkan disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya dalam memandang rendahnya mutu pendidikan, jika menggunakan metode berpikir sistem maka dibutuhkan berbagai disiplin atau ilmu pengetahuan agar mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai rendahnya mutu pendidikan tersebut.

Maka seorang pengamat pendidikan dalam memandang rendahnya mutu pendidikan harus melihat dari sudut berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, budaya, dan sosial serta ilmu penerahuan lain yang relevan.

Penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam upaya memecahkan masalah sering disebut pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan.

Contoh, penanganan kemiskinan. Dalam upaya menangani kemiskinan memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, matematika, psikologi, geografi dan lain-lain. Jika hanya menggunakan satu disiplin saja, maka penanganan kemiskinan tidak akan menyentuh masalah yang sesungguhnya. Menurut metode berpikir sistem bahwa penyebab suatu masalah itu tidak hanya satu namun beragam penyebab sehingga untuk mengatasi masalah tersebut seseorang harus melihat dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan (*interdiscipline dan multidiscipline*).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa berpikir sistem oleh seseorang akan berjalan lebih baik jika orang tersebut makin menguasai ilmu-ilmu lainnya.

Perbedaan antara berpikir sistem, sistem analysis dan sistem *approach* dan contohnya. Berpikir sistemik (*systemic thinking*) didefinisikan sebagai upaya memahami realitas dalam perspektif sistem yang lebih luas, melihat keseluruhan pola berbagai macam komponen di dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu kesatuan. Contoh, di dalam suatu organisasi, bagaimana kita memahami suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, struktur dan proses dapat saling bekerja sama agar membuat organisasi tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan berpikir sistemik, kita akan diarahkan untuk melihat suatu permasalahan sebagai bagian dari suatu sistem secara luas, bukan sebagai suatu bagian spesifik yang terpisah. Dengan demikian, akan lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di suatu sistem/organisasi.

Contoh, terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2013. Dalam pandangan berpikir sistem, terjadinya

hal tersebut dapat dilihat dari berbagai komponen sistem pendidikan nasional seperti manajemen UN, pendanaan UN, SDM UN, networking, informasi, komunikasi dll. Satu sisi masalah yang ada dalam UN menjadi saling terkait karena masalah tersebut ada dalam satu sistem yaitu sistem penyelenggaraan UN 2013.

Sistem Analisis atau analisis sistem merupakan proses untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam suatu sistem dengan pendekatan sistem. Hasil dari analisis sistem adalah deskripsi masalah-masalah yang terjadi dalam sistem. Analisis sistem tidak menghasilkan prediksi. Mengapa tidak menghasilkan prediksi? Karena hasil analisis sistem memerlukan tindak lanjut berupa eksplorasi lebih mendalam untuk menentukan manakah yang merupakan masalah mayor dan mana yang masalah minor, masalah segera atau tidak segera, masalah penting atau bisa diabaikan.

Contoh, analisis sistem UN 2013 akan menghasilkan sejumlah deskripsi masalah yang terjadi dalam sistem penyelenggaraan UN, misalnya deskripsi masalah dari sisi manajemen, deskripsi masalah dari sisi pendanaan, deskripsi masalah dari sisi sumber daya manusia yang bekerja, deskripsi masalah dari sisi komunikasi dan seterusnya. Masalah-masalah tersebut hanya berupa deskripsi bukan prediksi. Untuk menjadi prediksi, memerlukan metode lain misalnya *Focus Group Discussion* (FGD), dll.

Sistem *approach* atau pendekatan sistem merupakan upaya-upaya untuk memahami sebuah fenomena sistem dari titik yang paling memungkinkan dari sistem agar dapat memahami fenomena sistem tersebut dengan lebih tepat dan efisien. Dalam buku Bertalanffy yang berjudul *General Sistem Theory* dijelaskan beberapa pendekatan sistem antara lain: (1) *Classical sistem theory* yaitu upaya untuk memahami sistem yang ada

dalam matematika; (2) *Computerization and simulation* yaitu upaya untuk memahami sistem yang ada dalam komputer; (3) *Net theory* yaitu upaya untuk memahami sistem kerja baik transportasi, kompartemen, bidang bisnis lainnya, dll; (4) *Information theory* yaitu upaya untuk memahami sistem yang mendasarkan keuntungan dari informasi; (5) *Automata Theory* yaitu upaya untuk memahami sistem yang bekerja dari *input, process, output* seperti dalam mesin, (6) Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara berpikir sistem, analisis sistem dan pendekatan sistem yaitu: berpikir sistem yaitu melihat fenomena sistem berdasarkan sistem, analisis sistem yaitu mengurai masalah-masalah yang terjadi dalam sistem berdasarkan berpikir sistem dan pendekatan sistem yaitu upaya memahami fenomena sistem dari sisi yang paling mungkin dari sistem tersebut.

Aplikasi dalam Pendidikan

Dunia pendidikan jika dilihat dari berpikir sistem akan tampak sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Philip H. Coombs dalam buku *The World Education Crisis* menganalisis pendidikan dalam perspektif sistem menyebutkan beberapa komponen yang ada dalam sistem pendidikan antara lain: manajemen, guru, proses pembelajaran, pendanaan, dan *networking*. Adapun masalah yang ada dalam pendidikan antara lain: akses, sumber daya terbatas, biaya meroket, mutu rendah, lamban merespon (*inertia*) dan boros (*inefficiency*).

Berdasarkan pendapat dari Coomb tersebut di atas, berikut akan ditampilkan contoh aplikasi analisis sistem pendidikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.
Aplikasi analisis sistem pendidikan

	Manajemen	Guru	Prose belajar	Dana	Networking
Akses	Perhatikan wilayah terpencil	Mencukupi tenaga pendidik	Pengiriman tenaga guru ke wilayah yang membutuhkan	Penambahan dana ke wilayah yang membutuhkan	Perkuat <i>networking</i>
Biaya	Awasi penggunaan dana	Tambahkan biaya pelatihan guru	Tambahkan biaya media pembelajaran	20% APBN/D harus segera diwujudkan	Jalin kerja sama dengan dunia usaha
Mutu	Analisis kebutuhan dunia usaha, Entrepreneur	Kualifikasi ditingkatkan	Pengayaan metode pengajaran, kreatifitas	Penuhi persyaratan minimal fasilitas	Lakukan <i>benchmarking</i>
Inertia	Perbaiki rekrutmen kepala sekolah	<i>Test pre</i> -dan <i>in-service</i> bagi guru	Tingkatkan komitmen dan perbaiki lingkungan	Tambahkan pendanaan	Lakukan kerja sama dengan lingkungan
Efisiensi	Perbaiki manajemen. Pelatihan manajemen	Berikan pemahaman efisiensi	Tingkatkan komitmen	Awasi pendanaan	Jalin kerjasama dan pengawasan

Berdasarkan pisau analisis berpikir sistem seperti dalam tabel di atas, kita dapat menemukan beberapa rumusan masalah dan solusinya. Untuk mengambil keputusan, maka diperlukan pengkajian lebih mendalam atas setiap masalah dan solusi yang ditawarkan.

Berikut adalah beberapa istilah berpikir sistem yang dikaitkan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. *Isomorfism* yaitu

unit-unit yang berada dalam satu lingkungan yang sama, akan sama pula bentuk keorganisasiannya, misalnya karyawan Kompas Gramedia cenderung memiliki kesamaan gaya hidup yang sama seperti sederhana tapi cerdas. *Cybernetics* yaitu sistem kontrol yang berdasar pada keefektifan berkomunikasi, misalnya ketika terjadi banyak asap disebuah pabrik, maka alat pendeteksi asap langsung bekerja dengan membunyikan sirine atau bel.

Integration yaitu antar komponen dalam satu sistem bisa terjadi saling menyatu, contohnya sistem roda dan rem dalam kendaraan bisa saling menyatu. *Diferentiation* yaitu antar komponen dalam sistem dapat saling berbeda fungsi namun tetap menjadi satu sistem, misalnya sistem dalam pembuahan, lebah dan buah berbeda namun ada dalam satu sistem yaitu sistem pembuahan.

Change and growth: komponen dalam sistem bisa berubah dan berkembang. Contoh, sistem otak manusia, ia berubah seiring waktu dan terus tumbuh. *Information theory*: informasi sangat berguna dalam membangun komunikasi dan organisasi. Contoh, organisasi yang memiliki sistem komunikasi yang sistematis berkemungkinan besar organisasi tersebut akan berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasinya.

Game theory: Anggota yang rasional akan memenangkan pertandingan. Contoh, dalam sistem reward, maka karyawan-karyawan yang mampu menyesuaikan diri dengan aturan-aturan perusahaan akan mendapat imbalan lebih baik dan sebaliknya.

Decision theory: mengambil keputusan dari berbagai pilihan yang ada. Contoh, sistem pengambilan keputusan dalam organisasi, semakin organisasi mampu memilah dan memilih

berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, maka organisasi itu akan semakin baik.

Factor analysis: kemampuan memetakan entropi. Contoh, sistem pengajaran di dalam kelas, semakin mampu guru menganalisis faktor-faktor penghambat kemajuan siswa, maka kelas tersebut akan semakin baik.

Paradigma berpikir sistem terhadap perkembangan teori manajemen organisasi dan aplikasinya sudah banyak diakui oleh para pakar manajemen. Beberapa contoh dapat dijelaskan sebagai berikut. Berpikir Sistem mempengaruhi lahirnya ide-ide baru dalam manajemen karena berpikir sistem mampu melihat satu sistem dari berbagai sisi, seperti lahirnya teori-teori organisasi klasik sudah diperbaharui dengan terori-teori organisasi moderen antara lain teori organisasi humanistik, teori sistem, teori komunikasi dan lain-lain. Mullins (2005) melukiskan beberapa perkembangan dalam ilmu manajemen antara lain teori klasik, human relations, sistem, dan kontigensi. Lahirnya teori-teori baru organisasi ini melahirkan aplikasi baru dalam manajemen organisasi.

Berpikir sistem membantu anggota organisasi dalam melihat bagaimana mengubah sistem secara lebih efektif, dan bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari dalam maupun luar organisasi. Contoh, *learning organization* dari Peter Senge. Menurut Senge sebuah organisasi akan hidup, berkembang dan mencapai tujuan jika karyawan dalam organisasi tersebut memiliki kemampuan berpikir sistem.

Berpikir sistem mempengaruhi cara berpikir dalam manajemen. Beberapa pendekatan manajemen yang kini berkembang, mungkin dalam hitungan tahun, bulan atau bahkan minggu sudah berubah. Ini terjadi karena

berpikir sistem mampu memberikan perspektif baru dalam manajemen. Melalui berpikir sistem, maka manajemen dipandang sebagai ilmu yang harus mengadopsi berbagai disiplin ilmu seperti politik, budaya, psikologi, ekonomi dan lain-lain. Contoh, *reframing organization* dari Lee Bolman. Menurut Bolman seorang manajer yang ingin melakukan perubahan (Inovasi) dalam organisasi harus melakukan *reframing* secara keseluruhan yaitu struktur, politik, budaya, dan sumber daya manusia. Berdasarkan pendapat Bolman ini, maka tidak bisa dihindari setiap manajer harus menguasai berbagai disiplin ilmu demi tercapainya tujuan organisasi.

KESIMPULAN

Praktek manajemen pendidikan dipengaruhi oleh cara berpikir. Terdapat beberapa kajian cara berpikir antara lain cara berpikir atau filsafat positivisme, naturalisme dan berpikir sistem atau filsafat sistem. Filsafat positivisme adalah sebuah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang menekankan empirisme, selanjutnya positivisme menjadi kurang menarik karena terjebak *konservatifisme*.

Filsafat naturalisme adalah filsafat yang pandangan-pandangannya sebagai reaksi atas positivisme sehingga filsafat naturalisme memberi energi baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Filsafat sistem yaitu memandang objek dengan cara pandang sistem yaitu memandang berbagai elemen yang ada dalam objek tersebut sehingga produk yang dihasilkannya berupa pemikiran atas objek secara menyeluruh (*holism*).

Dunia pendidikan jika dilihat dari cara berpikir sistem atau filsafat akan tampak sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen antara lain: manajemen, guru, proses pembelajaran, fasilitas, pendanaan, dan *networking*.

Menyelesaikan masalah pendidikan melalui berpikir sistem membutuhkan penguasaan berbagai disiplin keilmuan. Artinya, seorang manajer yang ingin melakukan perubahan (inovasi) dalam organisasi pendidikan, maka ia harus menguasai struktur, politik, budaya dan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Ini berarti pula setiap manajer atau pemimpin harus menguasai berbagai disiplin ilmu demi tercapainya tujuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertalanffy, L.V. 1968. *General Sistem Theory: Foundations, Development, Aplications*. New York, George Braziller
- Hardiman, F. Budiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Nusa Putra. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hersey, Paul dan Kenneth H. Blanchard. 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*, Penerj. Agus Dharma, Edisi 4, Jakarta: Erlangga.
- Philip H. Coombs. 1968. *The World Educational Crisis*. New York: OxfordUniversity.
- Peter Senge. 1999. *Fifth Dicipline*. New York: Currency Doubleday.
- Indrajit, Eko R. 2001. *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*. Bandung, Informatika.
- Yvonna S.Lincoln and Egon G.Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi. Sage Publications.
- Wakhudin dan Trisnahada. 1997. *Filsafat Naturalisme*. Bandung: Makalah, PPS-UPI Bandung.

EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

The objectives of this article to evaluate the Indonesian National Education System that has been running for more than 50 years. The methode of this evaluation by comparing the education goals that written in 1945's constitution with the Indonesian National Education System Law and educational practices. The results of this evaluation there is the inconsistency in politics of education and educational practices that reflected in the legislative education process, educational funding, professional teacher providing, learning process, education evaluation system and teacher welfare.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Jacques Delors (1996) menyebutkan peran strategis pendidikan bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendidikan walaupun bukan merupakan sebuah obat ajaib atau *magic formula* merupakan pembuka pintu dunia untuk kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertindasan dan perang.

Setelah terjadi perang dunia ke satu dan kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencari formula untuk menghindari perang dunia dan memajukan dunia. Menurut PBB, bahwa pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi merupakan '*the weapon of peace*' abad 21 (Binde, 2001). Tiada senjata yang lebih baik dalam memajukan kehidupan dunia selain pendidikan. Pada era globalisasi ini, keyakinan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam memajukan sebuah bangsa sudah menjadi "iman" setiap bangsa.

Soedijarto (2007) mencatat bahwa para *founding father* bangsa Indonesia sudah menyadari peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurut Soedijarto masuknya pendidikan dalam UUD 1945 karena para *founding father* menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuk modernisasi melalui gerakan *renaissance* sedangkan Indonesia sebaliknya masuk era kegelapan yaitu penjajahan selama hampir 350 tahun. Oleh karena itu para *founding father* memfungsikan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang dibayangkan oleh para *founding father* seperti Soekarno, Syahrir, Agus Salim, dan M. Natsir, jelaslah bukan pendidikan 3 atau 2 tahun atau sekolah desa seperti terjadi pada jaman penjajahan Belanda. Namun sebuah pendidikan berkualitas seperti sekolah untuk orang-orang Eropa pada waktu itu yang biayanya sepuluh kali lipat dari penyelenggaraan sekolah desa (Soedijarto,2007).

Sebagai upaya menjalankan pasal 31 UUD 1945, pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Rivai dan Murni,2009:79). Dalam perjalanannya pembangunan sistem pendidikan nasional tidak pernah lepas dari warna sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupinya. Dari perspektif sistem pendidikan nasional tersebut, kita mengenal sistem pendidikan nasional versi orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Versi sistem pendidikan nasional apapun namanya menjadi tidak penting karena yang terpenting adalah apakah sistem pendidikan nasional bermuara pada tujuan seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945? Beberapa tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 2013 sekarang ini atau sudah lebih dari 50 tahun, Indonesia sudah melaksanakan sistem pendidikan nasional, namun dampaknya belum signifikan dalam pembangunan Indonesia. Ignatius G. Saksono

(2010) merinci beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pendidikan antara masalah kelangsungan hidup bangsa, budaya korupsi, ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan, konsumerisme dan budaya materialistik, kerusakan lingkungan hidup, bahaya narkoba, merosotnya mutu hasil pendidikan formal, dan maraknya komersialisasi pendidikan.

Nadjamuddin Ramly (2005) menyebutkan beberapa isu kritis pendidikan Indonesia antara lain: mogok kerja guru, Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi yang komersial, Sistem Evaluasi yang tidak akomodatif, masuknya investasi asing dalam bidang pendidikan, kewenangan penyelenggaraan pendidikan bagi daerah yang mengalami penyimpangan, kemampuan guru yang lemah dalam menguasai materi ajar, institusi pendidikan menjadi kontributor pengangguran terdidik, materialisme dan egoisme sektoral ilmuwan, pendidikan menjadi ajang bisnis murahan, dan terjadinya pendidikan yang hanya menguasai materi ajar bukan pembinaan perilaku dan moral dan tidak adanya pajak untuk pendidikan.

Selain masalah seperti yang disebutkan di atas, media masa juga memberitakan terjadinya kekerasan dan konflik sosial, mutu sumberdaya manusia (SDM) yang dinilai rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya, kemampuan membaca, matematika dan sains siswa SD Indonesia yang dinilai rendah (Hayat dan Suhendra, 2010), Indonesia dikenal sebagai pengekspor tenaga kerja murah untuk jenis pekerjaan kasar ke negara-negara lain. Secara umum pendidikan masyarakat Indonesia masih sekitar 5,5 tahun (Tilaar, 2013).

Indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia belum berfungsi maksimal. Belum maksimalnya fungsi sistem pendidikan nasional menimbulkan pertanyaan: apakah ini terjadi karena ketika

tahun 1945 Indonesia merdeka, 90 persen penduduk Indonesia buta huruf dan 10 persen sisanya berpendidikan sekolah 3 dan 2 tahun, sehingga waktu lebih dari 50 tahun dirasa belum cukup bagi sistem pendidikan nasional untuk membawa Indonesia sesuai cita-cita kemerdekaan? Tapi kenapa banyak fakta negara-negara lain, seperti China dengan 1,3 miliar, Malaysia, Vietnam dan lain-lain berhasil maju?

Ketika sistem pendidikan nasional dituntut terus berjalan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, maka pertanyaannya adalah apa yang salah dalam pendidikan Indonesia (*what's wrong with our education*)? Sisi manakah yang harus dibenahi agar sistem pendidikan nasional berjalan menuju cita-cita yang terkandung dalam mukadimah UUD 1945?

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem pendidikan nasional Indonesia yang sudah lebih 50 tahun berjalan. Evaluasi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kegiatan sistematis yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah agar dapat mempertimbangkan dan meningkatkan kegiatan pendidikan nasional (Mutrofin,2010:33). Oleh karena itu, melalui artikel ini diharapkan memberi masukan untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.

METODOLOGI KAJIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metodologi analisis sistem pendidikan (Coombs,1968) dengan cara melakukan riset atas data-data yang tersedia pada buku-buku dan media massa kemudian melakukan evaluasi antara tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dibandingkan dengan apa yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan

Nasional dan praktik pendidikan. Evaluasi ini menggunakan model evaluasi upward appraiser (wirawan,2009:17). yaitu model evaluasi dari bawah dalam hal ini evaluasi dari warga negara. Penulis dalam hal ini bertindak sebagai warga negara. Fokus analisis sistem pendidikan pada penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan tujuan pendidikan, pendanaan, penyiapan guru, penyusunan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran/pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Politik

Sejak kemerdekaan, Indonesia memiliki pasal 31 UUD yang mewajibkan pemerintahan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (ayat 3). Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % (ayat 4). Dan, Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia (ayat 5).

Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk Undang-undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsensus politik. Jika menggunakan analisis Levin (1976:30-37) setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu:

- (1) politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara,
- (2) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan,
- (3) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan

seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru,

(4) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa,

(5) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.

Berdasarkan analisis Levin (1976) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegagalan pelaksanaan sistem pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh politik baik dalam penentuan nilai-nilai dan karakter manusia yang dibutuhkan, penentuan besarnya dana untuk pendidikan, penentuan proses belajar mengajar, dan penentuan perilaku warga negara yang diharapkan. Tabel di bawah ini akan mendeskripsikan beberapa contoh ketidakonsistenan yang dilakukan para pembuat kebijakan baik DPR maupun pemerintah dalam menindaklanjuti tujuan pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945.

Tabel 1.
Inkonsistensi antara UUD dengan UU Sisdiknas

No.	UUD 1945	UU No.20/2003	Bukti tidak konsisten
1	"mencerdaskan kehidupan bangsa" dan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional"	Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada TYME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	Tidak memuat ketentuan tentang upaya membangun bangsa dan pernyataan bertanggungjawab tidak dijelaskan bertanggung jawab kepada siapa? UU No.2/1989 merumuskan "serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

No.	UUD 1945	UU No.20/2003	Bukti tidak konsisten
2	UUD 1945 menganut paham negara bangsa (kemerdekaan hak segala bangsa, supaya berkehidupan bangsa yang bebas, mencerdaskan kehidupan bangsa, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia)	Pasal 37 UU No.20/2003 tentang kurikulum tidak ada kurikulum bahasa Indonesia, tidak ada sejarah Indonesia. Pasal UU No.2/1989 pasal 34 terdapat kurikulum (1) Pancasila, (2) Bahasa Indonesia, (3) Sejarah Indonesia dan sejarah umum.	Bukti pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU tidak konsisten memperjuangkan negara bangsa sebagai mana amanat UUD 1945.
3	Indonesia sebagai negara bangsa	Pasal 65 ayat (2) UU No.20/2003 menyebutkan secara tidak langsung mengizinkan anak Indonesia di tanah airnya sendiri sekolah disekolah asing.	Bersekolah asing di tanah air sendiri berimplikasi pada terkikisnya rasa patriotisme dan nasionalisme.
4	Sistem pendidikan nasional berarti melahirkan kewarganegaraan yang berkualitas.	Menurut UU No.20/2003 untuk menjadi kewarganegaraan yang berkualitas diisi dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari SD sampai perguruan tinggi.	Tidak ada arahan atau PP tentang isi dan berapa jam per minggu untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut.

Memperhatikan keempat contoh ketidakkonsistenan dukungan politik baik dari DPR maupun pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa para elit politik bangsa ini perlu diingatkan untuk menjadikan pendidikan nasional sebagai pendukung dan pembangun negara bangsa yang ber peradaban.

Contoh negara-negara kebangsaan yang berhasil membangun bangsa dan peradabannya melalui pendidikan antara lain Amerika, Jerman, Belanda, dan seluruh negara Skandinavia. Atas dasar persepsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan manusia yang berkualitas, mengapa Senator John F. Kennedy (1957) dan para Gubernur di Amerika Serikat memandang bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam persaingan global ditentukan oleh kualitas pembelajaran di sekolah (Dewey, 1964). Oleh karena itu, sejak sebelum merdeka, para *founding father* bangsa ini sudah menyadari, jika Indonesia merdeka maka tidak ada jalan lain untuk mewujudkan cita-cita menjadi Negara Kebangsaan yang maju (cerdas kehidupannya), demokratis dan berkeadilan sosial, bermartabat dalam pergaulan internasional, maka para *founding father* sudah terilhami oleh Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Otto Von Bismarck dan Meiji yang berpegang pada paradigma "*Build Nation Build Schools*" sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 (Soedijarto, 2007).

Sebagai inspirasi saja, Cina (Li Lanqing, 2005) berhasil membuat prestasi yang mengagumkan, yaitu merubah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, yang tadinya hanya sebagai negara berkembang, hanya mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakatnya, kemudian Cina berubah dan masuk ke tahap awal menjadi masyarakat yang makmur. Perubahan yang dialami Cina merupakan perubahan yang sangat berarti. Semua keberhasilan Cina tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh para pemimpin Cina dalam melakukan reformasi, terutama pendidikan. Keyakinan mereka membangun Cina melalui sektor pendidikan terlihat dari upaya ekspansi yang berkelanjutan yang dilakukan sejak tahun 1980 sampai awal tahun 1990. Selama periode ini, pendidikan Cina terus mengalami kemajuan secara cepat, dan banyak inovasi (Li Lanqing, 2005).

Pendanaan Pendidikan

Masalah ketidakkonsistenan pendanaan pendidikan antara yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) bahwa Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyataannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidakkonsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olah raga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketidakkonsistenan pendanaan juga menyebabkan pengembangan sekolah dan mutu lulusan menjadi rendah.

Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu tersebut menyebabkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global terpuruk. Menurut catatan UNDP tahun 2006, *Human Development Index* (HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia/UNDP tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Sementara berdasarkan *Global Competitiveness Indeks* tahun 2008 menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari 134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di atas. Menurut *The 2006 Global Economic Forum on Global Competitiveness Index* (GCI) yang di-release WEF tersebut, daya saing global Indonesia berada pada posisi yang terpuruk. Untuk wilayah Asia, macan asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6. Sementara Jepang, rangking ke-12. China dan India rangking

49 dan 50. Pada periode yang sama, kualitas sistem pendidikan Indonesia juga berada pada peringkat 23. Di mata WEF, Indonesia disejajarkan dengan Gambia, masuk dalam kategori Negara *low-income countries* (Sauri, 2013).

Tabel 2 di bawah ini akan mendeskripsikan mengenai contoh ketidakkonsistenan dalam pendanaan pendidikan antara yang diatur oleh UUD 1945 dengan UU No.20/2003.

Tabel 2.
Inkonsistensi Pendanaan Pendidikan

No.	UUD 1945	UU No.20/2003	Bukti tidak konsisten
1	Pasal 31 Ayat (4) "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional".	<p>Pasal 6 ayat (2): "setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan".</p> <p>Pasal 7 ayat (2): "Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya".</p> <p>Pasal 12 ayat (2) : "setiap peserta didik berkewajiban : ikut menanggung biaya-biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 46 ayat (1): "Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat".</p> <p>Pasal 49 ayat (3): "Dana Pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".</p>	Fakta ini menunjukkan betapa UU No.23/2003 dalam pembiayaan pendidikan bertentangan dengan UUD 1945.

Memperhatikan tabel 2 dapat ditarik simpulan bahwa sudah terjadi salah kaprah dalam pendanaan pendidikan karena menurut UUD 1945 dan prinsip negara kesejahteraan maka negara harus membiayai seluruh penyelenggaraan pendidikan. Adanya pasal-pasal yang meminta masyarakat ikut bertanggungjawab dalam pendanaan pendidikan sama persis seperti kebijakan pendanaan pendidikan pada jaman orde baru. Ini sangat disayangkan karena UU No.20/2003 lahir pada masa reformasi.

Pendanaan pendidikan Indonesia terhitung paling rendah. Negara Uni Eropa dana pendidikannya 5% PDB (Produk Domestik Bruto), Belanda 7% PDB, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, Jepang 7% PDB, dan Indonesia hanya 1,4% PDB (Soedijarto, 2007). Ini artinya pemerintah Indonesia tidak benar-benar peduli pada pendidikan untuk memajukan bangsa. Jangan heran jika ditemukan di beberapa kampus di Indonesia dimana guru besarnya tidak bisa melakukan penelitian dan tidak memiliki ruang kerja karena tidak ada dana. Jangan heran juga jika ada guru yang merangkap tukang ojek. Jangan heran pula jika ada siswa yang bunuh diri karena tidak bisa bayar sekolah.

Perhatian negara pada bangsanya akan berdampak pada lahirnya loyalitas bangsa itu pada negaranya. Bisa menjadi inspirasi, dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, hampir seluruh negara Eropa, pendidikan dari SD sampai Universitas dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah (pusat dan negara bagian). Karena itu sudah sepatutnya setiap warga negaranya dapat merasakan bahwa mereka dapat menjadi tenaga ahli, teknisi handal, dan lainnya karena dibiayai oleh negara. Karena itu tidak heran bahwa kaum pekerja Jerman bersedia diperpanjang jam kerja dan dikurangi penghasilannya

demi perbaikan ekonomi Jerman (*The Economist*, 20 Agustus, 2005:9). Tidak heran pula kalau seorang Presiden Jerman Von Weisaker (1980-an) atas himbauanya dalam satu hari dapat menghimpun dana untuk membantu kelaparan di Ethiopia sebanyak 150 juta US dolar.

Berdasarkan paparan diatas, maka pendanaan pendidikan dari APBN dan APBD harus disesuaikan dengan amanat UUD 1945 yaitu negara harus mendanai seluruh penyelenggaraan pendidikan nasional dengan segala konsekwensinya. Sumber-sumber pendanaan bisa diupayakan baik melalui pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun dengan memberlakukan pajak pendidikan. Selama ini Indonesia sangat takut dengan defisit anggaran tetapi tidak takut dengan anggaran pendidikan yang serba kekurangan.

Menurut penelitian Levin (1976:15), penambahan dana pendidikan tidak otomatis meningkatkan output pendidikan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penambahan dana pendidikan harus diikuti dengan reformasi kurikulum yang menekankan pada *mastery learning* (belajar tuntas). Namun belajar tuntas tidak akan berhasil jika tidak melakukan reformasi guru-guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan.

Penyediaan Guru Profesional

Sistem pendidikan nasional seperti apa yang dapat berfungsi untuk mencapai cita-cita seperti dalam mekadimah UUD 1945?Jawabnya adalah sistem pendidikan nasional yang proses pembelajaranya bermakna yaitu sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan (*multiple intellegent*), nilai, dan sikap. Tentu saja proses belajar yang bermakna ini tidak bisa dilepaskan dari manajemen dan pembiayaan

penyelenggaraan yang menunjang. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Dari 2,7 juta guru di Indonesia, kualifikasi pendidikannya masih rendah, yaitu 65% pendidikan guru mereka dibawah 4 tahun (Jalal,2009:2). Belum lagi bicara mutu.

Penyediaan guru yang profesional selama ini terabaikan. Selama ini profesionalitas guru-guru di Indonesia beragam. Jika jabatan profesionalitas guru disejajarkan dengan jabatan profesional lainnya seperti dokter dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal. Oleh karena itu, harus ada peningkatan jabatan guru sebagai jabatan profesional, suatu jabatan yang diperoleh melalui pendidikan tingkat lanjut (*advanced*) dan latihan khusus (*special training*). Dalam kaitan ini UU No.14/2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan bertaraf S1 dan D4+ merupakan suatu keputusan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Namun pendidikan S1 atau D4+ saja tidak cukup, tetapi harus S1 Plus (Soedijarto, 2012:12).

Salah satu kekurangan dalam pendidikan guru sebelum menjabat sebagai guru yaitu praktek profesional. Pada tahap ini selama 2 semester para mahasiswa belajar menerapkan berbagai pengetahuan dasar akademik profesional. Pada tahap ini para mahasiswa 2/3 waktunya berada dalam lingkungan sekolah untuk mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran dibawah supervisi tim dosen profesional. Jadi pendidikan guru minimal ditempuh 8 semester yaitu 6 semester untuk menguasai ilmu-ilmu dasar dan ilmu kependidikan, sisanya untuk melakukan praktek profesional. Akan lebih ideal lagi kalau para mahasiswa calon guru profesional memperoleh fasilitas asrama sebagai bagian integral dari fasilitas pendidikan guru (Soedijarto, 2012).

UU No.20/2003 pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu”, dan pasal 12 ayat (1) mengatakan “setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya”. Agar dapat melaksanakan pendidikan bermutu dan melaksanakan pendidikan sesuai minat, bakat dan kemampuan siswa, maka penyiapan guru profesional tidak bisa ditawar-tawar lagi, tetapi suatu keharusan. Maka untuk menyiapkan guru profesional, persyaratan utama untuk dapat diterima sebagai mahasiswa calon guru harus dari mereka yang tergolong dalam kelompok 20% teratas lulusan SMA dengan nilai matematika minimal 6 (Soedijarto, 2012). Agar guru profesional benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai pendidik profesional, maka mereka harus mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan martabatnya sebagai guru profesional.

Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional (Suratmi, Disertasi 2013). Ini terjadi karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat. Oleh karena itu berkaitan dengan sertifikasi dipandang perlu untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan kebijakan sertifikasi sehingga sejalan dengan tujuan penciptaan proses pembelajaran bermakna yang bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan sesuai mukadimah UUD 1945.

Tujuan dan Bahan Ajar

Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dari UU pendidikan, baik dalam UU yang pernah berlaku di Indonesia maupun yang sekarang masih berlaku dapat dirumuskan bahwa pendidikan nasional diharapkan melahirkan manusia yang religius dan bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, dan berkepribadian dan bertanggung jawab.

Tujuan tersebut di atas masih bersifat universal sehingga jika dikontraskan dengan karakteristik masyarakat moderen era globalisasi dan segenap tantangan serta kesempatan yang ada, maka pendidikan nasional diharapkan melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu mendukung antara lain: sistem politik demokrasi yang stabil berdasarkan Pancasila, mendukung sistem ekonomi nasional yang mantap infrastruktur fisiknya, infrastruktur teknologinya, infrastruktur tenaga manusianya, berkembang wirausahanya dan tumbuh pengusaha kecilnya, mendukung sistem pengembangan Ilmu, Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang tangguh, mendukung majunya kebudayaan dalam berbagai kesenian, kesusastraan, maupun dimensi kognitif dan normatif dari kebudayaan nasional, dan mendukung mantapnya etika sosial (Soedijarto, 2013:4-5).

Berangkat dari pemahaman mengenai karakteristik masyarakat modern di era globalisasi, maka yang perlu dihasilkan dari sistem pendidikan nasional adalah manusia yang memiliki kemampuan, nilai dan sikap seperti berikut: (1) manusia yang memiliki kemampuan, nilai, dan sikap yang memungkinkannya berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses politik, (2) manusia yang memiliki kemampuan, etos kerja, dan disiplin kerja yang memungkinkannya dapat secara aktif dan produktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, (3) manusia

yang memiliki kemampuan dan sikap ilmiah untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kemampuan penelitian dan pengembangan, dan (4) manusia yang memiliki kepribadian yang mantap, berkarakter dan bermoral serta berakhlak mulia (Soedijarto, 2013:6).

Pendidikan pada era globalisasi menurut Slattery (Slattery, 2006) dalam bukunya *“Curriculum Development In The Postmodern”* harus berdasarkan pada lima konsep, yaitu : Pertama, konsep yang berasal dari Dorothy yang mengatakan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk perubahan sosial, pemberdayaan komunitas dan membebaskan pikiran, tubuh dan spirit manusia (*that teaching must be directed towards social change, community empowerment, and the liberation of the mind, body, and spirit of individual human beings*).

Kedua, konsep yang berasal dari *Thich Nhat Hanh* yang mengemukakan tujuh hal yang harus menginspirasi pendidikannya yaitu : (1) Jangan mengidolakan atau terikat dengan teori, ideologi atau agama karena tidak ada kebenaran yang mutlak (*Do not idolatrous about or bound any doctrine, theory, or ideology*), (2) Jangan berpikir ilmu pengetahuan yang anda miliki sekarang merupakan yang paling benar, hindari berpikir sempit (*Avoid being narrow-minded and bound to present view*); (3) Jangan memaksakan orang lain, termasuk pada anak-anak dengan cara apapun, baik dengan kekuasaan, ancaman, uang, propaganda bahkan dengan pendidikan (*Do not force others*), (4) Jangan pernah menghindari kontak dengan orang yang menderita atau harus care dengan sesama (*Do not avoid contact with suffering or close your eyes before suffering*), (5) Jangan memelihara kebencian dan amarah (*Do not maintain anger or hatred*), (6) Jangan kehilangan jati diri dalam keadaan apapun (*Do not lose yourself in dispersion and in your surroundings*), (7) Jangan bekerja ditempat yang

menghancurkan manusia dan alam (*Do not live with a vocation that is harmful to human and nature*).

Ketiga, konsep yang berasal dari David Ort bahwa dalam konteks pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan penelitian, maka seorang tenaga pendidik atau guru harus menggunakan berbagai kesempatan untuk menghubungkan siswa dengan alam semesta, khususnya agar tercipta keberlangsungan hidup bersama (*must use every opportunity to connect students to the universe, especially the life-sustaining dimension of the global community on our beautiful yet fragile planet*)

Keempat, konsep dari Dietrich Bonhoeffer yang melarang guru melakukan kegiatan pembelajaran dalam keadaan kondisi tertekan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tak seorangpun dapat berpikir kebebasan secara substansial. Secara sederhana, kebebasan adalah sesuatu yang terjadi kepada setiap orang melalui orang lain. Menjadi bebas berarti membebaskan orang lain (*No one can think of freedom as a substance or as something individualistic. Freedom is simply something that happen to me through the other. Being free means being free for the other*).

Berdasarkan pendapat di atas, maka pendidikan di era globalisasi harus menjadi pondasi utama dan tempat bersemainya kebaikan untuk mentransformasi individu dan memperbaharui masyarakat. Oleh sebab itu, guru dan murid harus melakukan kolaborasi sebagai pasangan demi keadilan dan kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan uraian tujuan pendidikan di atas, pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah perancang pendidikan nasional sudah secara tepat memilih materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut? Secara teoritik, Philip Phenix menunjukkan beberapa bahan ajar yang harus ada dalam pendidikan yaitu bahan ajar

yang bersifat *symbolic, empirics, esthetics, synnoetics, ethics, dan synotics*.

Pemilihan bahan ajar dalam pendidikan formal/sekolah merupakan hal yang sangat strategis karena dari bahan ajar itulah peserta didik akan mendapat pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai kemampuan, nilai, dan sikap sesuai tujuan pendidikan nasional. Contoh deskripsi dalam buku pelajaran bahwa Presiden Abdurahman Wahid dimundurkan dari jabatan presiden karena terlibat korupsi yang mendapat protes dari masyarakat Jawa Timur. Peristiwa tersebut menunjukkan bukti bahwa harus ada pemilihan bahan ajar yang lebih selektif sehingga sesuai tujuan pendidikan nasional.

Selain mempertanyakan seleksi bahan ajar, dapat pula dipertanyakan seberapa jauh perancang pendidikan nasional berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut? Selama ini ketersediaan guru profesional, sarana dan prasana, kesejahteraan guru dan aspek lain yang mendukung pelaksanaan tujuan pendidikan nasional dapat dikatakan tidak sungguh-sungguh dilaksanakan. Dalam konteks tersebut, adalah percuma saja membicarakan perubahan kurikulum, perubahan bahan ajar dan lain-lain selama yang menjadi kebutuhan dasar pelaksanaan tujuan pendidikan nasional tidak dipenuhi secara sungguh-sungguh.

Proses Pembelajaran

Bagian ini ingin menjawab pertanyaan “model pembelajaran seperti apa yang dapat bermakna sebagai proses tercapainya tujuan pendidikan nasional?”. Proses pembelajaran yang bermakna hanya mungkin dicapai bila proses pembelajaran dapat merangsang, menantang, dan menyenangkan sehingga

mencapai tingkat *“joy of discovery”* seperti yang dikemukakan oleh *Whitehead*. Jika dikaitkan dengan usulan UNESCO mengenai 4 pilar pembelajaran yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*, maka dalam keempat pilar tersebut harus sampai pada tingkat *“joy of discovery”* (Delor, 1996).

Pendidikan yang berlangsung selama ini pada umumnya tidak menghasilkan sesuai tujuan pendidikan nasional. Ini salah satunya disebabkan proses pembelajaran yang tidak bermakna karena proses pembelajaran selama ini tidak pernah mencapai tingkatan *joy of discovery* pada *learning to know, joy of being succesfull in achieving objective* pada *learning to do dan joy of getting to gether to achieve common goal* pada *learning to live together* (Soedijarto, 2013). Gagalnya proses pendidikan yang menyenangkan tersebut menyebabkan kegagalan dalam membentuk kepribadian (*learning to be*) yang mantap, kreatif dan mandiri. Selama ini proses pembelajaran di sekolah lebih banyak hanya mendengar, mencatat, dan menghafal.

Pembelajaran yang tidak menarik akan mengakibatkan siswa malas belajar dan enggan bersekolah. Data penelitian PIRLS 2006 menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran siswa Indonesia pada tingkat yang sangat serius mencapai 42%. Adapun beberapa negara yang tingkat ketidakhadirannya paling rendah yaitu Hongkong, Taiwan, Skotlandia, Austria, Norwegia, Belanda, dan Belgia (Hayat, 2010:120).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dipandang perlu untuk untuk mengubah paradigma dari paradigma pembelajaran yang hanya mendengar, mencatat, dan menghafal menjadi paradigma proses pembelajaran student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengedepankan proses pembelajaran yang menyenangkan (*joyfull learning*).

Evaluasi sesuai Tujuan

Evaluasi pendidikan merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang dipandang dari teori belajar sosial (*social learning theory*) merupakan bagian dari *reinforcement strategy* yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan sikap dan kemampuan yang diharapkan, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan belajar secara terus menerus. Oleh karena itu, model evaluasi harus komprehensif, terus menerus, dan objektif (Soedijarto, 2012).

Evaluasi yang komprehensif bermakna bahwa untuk menilai berbagai kemampuan seperti dimensi ketekunan, ketelitian, disiplin dalam belajar, disiplin waktu, disiplin diri, kemandirian, sikap demokratis, rasa tanggung jawab, dan kejujuran, bukan seperti yang selama ini hanya menilai kemampuan kognitif saja. Terus menerus bermakna bahwa evaluasi yang sarannya meliputi segala dimensi pembelajaran sebagai proses pembudayaan bila dilakukan secara terus menerus tanpa dirasakan sebagai beban melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi dan tanpa sikap yang diharapkan terbentuk sebagai bagian dari upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional. Objektif bermakna bahwa evaluasi itu tidak ada bias dan tidak ada negosiasi dalam memberikan penilaian.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menganut model pembelajaran *active learning* dan *student center learning* untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap. Atas dasar tujuan evaluasi tersebut maka ujian nasional yang dijadikan penentu kelulusan tidak dapat menunjang tujuan tersebut. Ujian nasional yang dilakukan sekali pada akhir jenjang pendidikan dalam beberapa mata pelajaran dalam bentuk tes objektif sukar diharapkan dapat membudayakan berbagai dimensi

pembelajaran. Ekses dari ujian nasional yang dijadikan penentu kelulusan adalah terjadinya proses belajar di sekolah sebagai proses menghafal dan latihan menjawab soal.

Ujian nasional (UN) yang dijadikan satu-satunya penentu kelulusan hakekatnya memperkuat model pembelajaran yang mengutamakan kegiatan mendengar, mencatat, dan menghafal suatu proses pembelajaran yang sejak tahun 1971 ingin ditinggalkan, tetapi karena alasan ketersediaan dana model ini terus berjalan. Melalui Undang-Undang tahun 2003 model semacam ini sesungguhnya ingin ditinggalkan tetapi malah diperkuat dengan ditetapkannya UN sebagai penentu kelulusan. Jika UN disebut hanya untuk menguji dimensi kognitif itupun masih dirasa kurang karena kemampuan kognitif dalam artian yang luas meliputi kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis, kemampuan menilai, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan memecahkan masalah yang kesemuanya memerlukan kemampuan membaca, kemampuan menuliskan pemikiran dan laporan, kemampuan kalkulasi, yang kesemuanya perlu dibudayakan sehingga segala kemampuan yang berkembang menjadi bagian dari sistem kepribadian peserta didik yang meliputi watak dan moralnya. Untunglah UN sekarang ini tidak digunakan sebagai penentu kelulusan, namun untuk kepentingan pemetaan dan seleksi saja.

KESIMPULAN

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world (Nelson Mandela). Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran para *founding father Republik Indonesia* yang memasukkan pendidikan ke dalam pasal 31 UUD 1945. Para *founding father* memiliki paradigma berpikir bahwa *build*

nation, build schools. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan strategis dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sudah lebih 50 tahun Indonesia membangun sistem pendidikan nasional. Ada kemajuan yang dirasakan, namun kemajuan yang dirasakan masih jauh dari yang tertulis dalam konstitusi 1945. Adanya kenyataan tersebut mengindikasikan ada yang salah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia. Kesalahan tersebut dapat terlihat dari politik yang tidak mendukung, baik itu politik dalam perumusan tujuan pendidikan, politik anggaran, dan politik penyelenggaraan pendidikan seperti penyiapan guru-guru profesional, penyiapan sarana, ketidakkonsistenan antara tujuan pendidikan dan praktek pendidikan dan antara tujuan dengan model evaluasi pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan mutu bangsa Indonesia, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, sistem evaluasi, dan perbaikan yang terus-menerus sistem pendidikan Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan '*grand design* sistem pendidikan nasional" yang pembuatannya harus melibatkan semua *stake holder* bangsa Indonesia. Dan, dalam pelaksanaannya membutuhkan pemimpin visioner dan kuat sehingga Indonesia mampu bangkit dan berlari mengejar berbagai ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.

DAFTAR PUSTAKA

Binde, Jerome. *Keys to The 21st Century*. New York, Unisco, 2001.

Coombs, Philip H. *The World Educational Crisis, A System Analysis*. London: Oxford University, 1968.

- Delor, Jacques. *Learning The Treasure Within*. Unesco Publishing, 1996.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: The Mac Millan Co., 1964.
- Germaý's Suprising Economy, dalam majalah *The Economist*, 20 Agustus, 2005.
- Hayat, Bahrul dan Suhendra. *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Inglehart, Ronald. *Modernization and Postmodernization, Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. New Jersey: Princeton University Press, 1997.
- Jalal, Fasli. *Teacher Sertification in Indonesia, A Strategy for Teacher Quality Improvement*. Jakarta: Depdikbud, 2009.
- Levin, Henry M., *The Limits of Educational Reform*, New York: David Mckay Compani, INC, 1976.
- Li Lanqing. *Education For 1.3 Billion*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2005.
- Mutrofin. *Evaluasi Program*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo: 2010, p. 33.
- Phenix, Philip. *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum For Genneral Education*. New York, Mc.Graw Hill Book Co.
- Ramly, Najamuddin. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. *Educational Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Saksono, Ignatius G. *Tantangan Pendidikan, Memecahkan*

Problem Bangsa, Tanggapan Terhadap Pembatalan UU BHP.
Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010.

Sauri, Sofyan. *Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu.* file.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 15 Mei 2013.

Slattery, Petrick. *Curruculum Development in The Postmodern Era.* New York : Informa Taylor and Francis Group, 2006.

Soedijarto. Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan tenaga Pendidikan Sebagai Unsur Strategis Dalam Penyelenggaraan Satu Sistem Pendidikan Nasional. Makalah. Disajikan dalam pertemuan dengan FPP-DPRRI, Jakarta, 30 Januari 2013.

-----Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Dalam Era Globalisasi dan Implikasinya terhadap Kurikulum LPTK, makalah, 2012.

-----,Memahami Makna yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan Jakarta, ISPI, 2007.

-----, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Model Evaluasi yang Relevan dengan Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, makalah, *workshop review* panduan penilaian yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Dasar, Bogor, 13-15 Agustus 2012

Suratmi, Tris. *Pengaruh Sertifikasi dan Etos Kerja terhadap Prestasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta,* Disertasi 2013 Universitas Negeri Jakarta (tidak diterbitkan).

Tilaar. *Menyiapkan Generasi Emas Menuju Indonesia 2045.* Jakarta: Lembaga Manajemen UNJ, 2013

PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERADABAN

Tulisan ini bertujuan untuk menggali hubungan secara teoretik antara pendidikan dan pembangunan peradaban. Metode yang digunakan untuk pencarian hubungan tersebut melalui studi *literature* pengalaman empiris. Berdasarkan metode tersebut ditemukan bahwa pendidikan merupakan kunci bagi bangsa manapun dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sangat berperan strategis dalam pembangunan peradaban, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan pembangunan peradaban. Peradaban sendiri sering diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai ciri-ciri kemajuan material dan spiritual. Dalam membangun peradaban Indonesia, hendaknya masyarakat Indonesia bisa membuka diri dengan berbagai kebudayaan dari luar karena semakin masyarakat terbuka, maka semakin mungkin masyarakat bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Dalam konteks ini penerjemahan karya-karya intelektual dari berbagai belahan dunia ke dalam bahasa Indonesia perlu digalakan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan masa depan bangsa. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam kerangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar suatu bangsa yang ingin maju.

Sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa peran pendidikan pada pertumbuhan dan pengembangan peradaban begitu penting. Tidak ada peradaban bisa berkembang tanpa ditopong oleh pendidikan. Oleh karena itu dalam perspektif peradaban, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Jika sebuah bangsa merencanakan sebuah pencanangan pembangunan dan peradaban, maka rencana-rencana pembangunan dan peradaban itu tidak akan menjadi kenyataan tanpa di dukung oleh pendidikan yang mapan dan menunjang.

Ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Cina, India, Malaysia bahkan kini mulai tertinggal oleh Vietnam dan Komboja telah menyadarkan para pemegang kekuasaan seperti pemerintah dan legislatif untuk membangun peradaban bangsa ini melalui pendidikan. Upaya Indonesia itu terlihat antara lain dari adanya ketentuan UUD hasil amandemen tahun 2002 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN/APBD dan adanya upaya pemerintah untuk melaksanakan strategi dasar pendidikan yaitu : pemerataan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, peningkatan

kualitas dan efisiensi pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas maka sangat penting bagi sebuah bangsa untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan pembangunan peradaban sebuah bangsa, termasuk membangun peradaban Indonesia.

FOKUS KAJIAN

Memperhatikan latar belakang di atas, maka penulisan makalah ini akan lebih difokuskan pada pertanyaan : apa hubungan pendidikan dan pembangunan peradaban? Melalui tulisan ini diharapkan pembaca makalah ini bisa memahami kaitan antara pendidikan dan pembangunan peradaban sehingga di masa depan pendidikan bisa dilaksanakan sebaik mungkin sehingga mampu menopang terciptanya sebuah peradaban. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan

Istilah pendidikan erat kaitannya dengan istilah "*paedos*" (bahasa Yunani) yang berarti anak laki-laki, dan "*agogos*" yang berarti mengantar dan membimbing (Uyoh Sadulloh, 2007). Atas dasar istilah ini, pendidikan sering diartikan sebagai upaya membimbing anak kearah tujuan tertentu. Istilah pendidikan juga sering dikaitkan dengan istilah "*education*" (bahasa Inggris). Istilah "*education*" sendiri berasal dari bahasa Latin "*educere*" (*e*= keluar, *ducere* = kemampuan).

Berdasarkan paparan di atas pendidikan dapat diartikan sebagai upaya agar anak bisa mengeluarkan sesuatu

kemampuan. Pendidikan dalam bahasa Belanda memakai istilah "*opvoeden*" (*op* = ke atas, *voeden* = memberi makan). Berdasarkan istilah ini pendidikan dikaitkan dengan upaya memberi makan rohani seorang anak untuk meningkatkan kecakapan dan derajat seorang anak.

Berdasarkan penelusuran pada beberapa istilah pendidikan diatas sangat jelas bahwa pendidikan berkaitan erat dengan upaya sadar dari si pendidik pada si peserta didik (orang dewasa pada orang belum dewasa) agar si peserta didik memiliki kemampuan baik intelek maupun kecakapan lainnya sehingga anak itu memperoleh kesejahteraan dan derajat yang tinggi.

Ada beberapa faktor penyebab manusia harus melewati pendidikan selama hidupnya antara lain : (1) Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya; (2) Anak lahir tidak langsung dewasa; (3) Manusia sebagai makhluk social, (4) Manusia sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri; (5) Manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab; (6) Sifat manusia memungkinkan terjadinya pendidikan (Uyoh Sadulloh, 2007).

Memperhatikan faktor-faktor diatas dapatlah disebutkan bahwa fenomena pendidikan merupakan fenomena manusiawi dalam arti menjadi ciri khas manusia, tidak ditemukan pada makhluk lainnya. Manusia tetap menjadi manusia bahkan kualitas dan kesejahteraannya lebih baik karena ada pendidikan. Atas dasar pemikiran itu pula, maka pendidikan akan menjadi penentu bagi masa depan individu dan masyarakat. Jika pendidikan tidak terurus dengan baik, maka masa depan individu atau bangsa juga tidak akan baik. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan manajemen yang baik sehingga kualitas hasilnya juga baik. Bila menelusuri upaya pendidikan di Indonesia dari sejak merdeka sampai awal

tahun 2015 ini, maka akan ditemukan beberapa hal mendasar yang telah terjadi dalam dunia pendidikan baik secara filosofis, pelaksanaan dan infrastruktur, maupun pembiayaan:

Secara filosofis pendidikan Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan membangun negara kebangsaan yang demokratis, berkeadilan sosial, berperikemanusiaan, dan berdasarkan Ketuhanan (Soedijarto, 2008). Pernyataan filosofis pendidikan ini menunjukkan satu hal bahwa bangsa ini memiliki komitmen yang besar terhadap pendidikan.

Sejak kemerdekaan sampai sekarang sudah ada 3 kali pergantian UU pendidikan (UU No.4/1950 jo UU No.12/1954, UU No.2/1989 dan sekarang UU No. 23/2003). Sudah 7 kali pergantian kurikulum (1950, 1962, 1969, 1975, 1984, 1994, 2004). Dalam hal evaluasi dikenal, yaitu ujian negara (sampai 1968), ujian sekolah (sampai 1984), Ebtanas (sampai 2003), dan UAN/UN (sampai sekarang). UU lain yang mendukung pendidikan Nasional, yaitu: UU Perguruan Tinggi (UU No. 20/1961) dan UU Mengenai Guru dan Dosen (2003). Memperhatikan perubahan-perubahan di atas menunjukkan bahwa bangsa ini terus menerus melakukan perbaikan pada aspek pelaksanaan pendidikan.

Amandemen UUD 1945 pada 10 Agustus 2002 menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBD dan APBN. Amandemen ini merupakan keputusan fenomenal karena walaupun pendidikan menjadi komitmen semua anak bangsa, namun dalam kenyataannya dana bagi APBN selalu dibawah 20 persen. Adanya komitmen 20 persen ini menjadi tahapan penting dalam perjalanan pendidikan nasional.

Sejalan dengan otonomi daerah, yaitu UU No. 22/1999 kemudian direvisi dengan UU No. 32/2004, pendidikan

termasuk wilayah penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemda (pemerintahan daerah). Untuk pengelolaan sekolah, maka diterapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Ini menunjukkan komitmen negara agar pendidikan lebih bisa efisien dan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun kebijakan ini melahirkan disparitas antara daerah yang sudah sangat siap dengan yang belum siap yang diperparah dengan lemahnya koordinasi antara pusat dengan daerah. Bupati atau walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat merasa lebih tahu masalah pendidikan di daerahnya sehingga sering mengabaikan arahan dari pusat.

Adanya berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kini sedang menata masa depannya melalui upaya pendidikan. Walau harus diakui banyak masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan seperti kurangnya dana, guru berkualitas dan disparitas antar wilayah, namun pembangunan pendidikan menjadi pilihan untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing bangsa di tengah globalisasi dan modernisasi ini.

Hakikat Pembangunan

Setiap negara melaksanakan pembangunan. Pembangunan sering diartikan sebagai proses perubahan kepada yang lebih baik dalam segala bidang dengan cara sengaja dan bertahap. Pembangunan sering digunakan sebagai ukuran bagaimana melihat sebuah bangsa atau negara melakukan berbagai upaya perbaikan di segala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan, budaya

dan peningkatan sumber daya manusia. Setiap bangsa pada umumnya melakukan pembangunan, namun dalam prosesnya ada yang cepat seperti Malaysia, Korea Selatan, India dan China, namun ada yang juga lambat seperti di negara-negara di Afrika. Sedangkan Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang sehingga kemajuannya biasa-biasa aja. Indonesia pernah dijuluki “macan Asia”, namun julukan itu sirna ketika Indonesia dilanda krisis 1997-1998 sampai sekarang.

Pembangunan Indonesia dilihat dari kaca mata sejarah bisa dibedakan yaitu pembangunan masa orde lama (masa presiden Soekarno), orde baru (pembangunan masa presiden Soeharto) dan masa reformasi (pasca Soeharto sampai sekarang). Pada jaman orde baru sangat mudah melihat tahapan pembangunan karena berlandaskan pada teori pertumbuhan pembangunan yaitu tahap tradisional, transisi, tinggal landas, tahap dewasa, dan tahap konsumsi tinggi. Tahapan ini dikenal berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Walt Whitman Rostow (Didik J. Rachbini, 2001).

Sudah sampai manakah pembangunan Indonesia sekarang? Sejak merdeka sampai saat ini, walaupun setiap periode ada penekanan pada beberapa bidang yang berbeda, namun landasan ideal pembangunan tidak mengalami perubahan yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Adapun prioritas pembangunan masa 2009-2014 dijelaskan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pelantikannya sebagai Presiden 2009-2014, pada 20 Oktober 2009, yaitu pembangunan kesejahteraan (ekonomi), demokrasi (politik) dan keadilan (hukum). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan terus berlangsung, namun prioritas setiap periode berbeda-beda.

Jika menggunakan teori pertumbuhan, maka Indonesia harusnya sudah lepas landas pada tahun 1990-an, namun

sampai 2009 ini masih diperdebatkan apakah Indonesia sudah masuk tahap tinggal landas? Tahap ini ditandai dengan tingkat investasi yang tinggi (diatas 5 persen), munculnya industri dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan munculnya institusi yang menopang perkembangan ekonomi modern, termasuk institusi pendidikan.

Sebagai gambaran saja, tahap tinggal landas Inggris terjadi tahun (1973), Perancis dan AS (1860), Jepang (1850), Rusia (1890), Argentina (1935), serta India dan Cina (1952). Pasca krisis 1997-1998, nampaknya Indonesia harus memantapkan diri agar benar-benar bisa tinggal landas. Dilihat dari perspektif ekonomi pertumbuhan nampaknya Indonesia sedang berupaya untuk tinggal landas.

Ketika teori pertumbuhan tidak lagi memadai untuk menjelaskan kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, maka kemudian munculah teori pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang intinya bahwa kualitas SDM pada suatu bangsa sangat memegang peranan strategis dan signifikan dalam pembangunan (Didik J. Rachbini, 2001).

Bukti atas teori ini adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura yang hanya sedikit memiliki kekayaan alam namun mampu menjadi negara-negara maju. Atas dasar temuan ini, maka negara-negara di dunia kini, termasuk Indonesia memandang penting pembangunan SDM.

Pembangunan SDM kini terlihat dari upaya pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, peningkatan kualitas manajemen pendidikan dan penciptaan kelas menengah melalui pendidikan *enterprenership* di dunia pendidikan.

Sejalan dengan otonomi daerah, rencana dan pelaksanaan

pembangunan selain oleh pemerintahan pusat kini juga dilakukan pemerintahan daerah (kota dan kabupaten). Apa yang menjadi prioritas pemerintahan daerah? Tentu sangat tergantung dari bupati atau wali kotanya masing-masing. Pembangunan oleh pemerintah daerah bertujuan agar pembangunan berjalan cepat, efektif dan efisien, namun karena ada daerah-daerah kurang memiliki SDM yang kompeten, maka pembangunan oleh pemerintah daerah sering terjadi meleset dari tujuan pembangunan itu sendiri, misalnya terjadinya sukuisme dan daerahisme.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara terus melakukan pembangunan di segala bidang, baik aspek meterial maupun spiritual. Jika pembangunan itu dilaksanakan secara kontinyu dan terencana demi mencapai kehidupan yang maju, maka Indonesia sesungguhnya sedang bergerak menuju sebuah pembangunan peradaban.

Hakikat Peradaban

Peradaban dalam bahasa Inggris disebut dengan *civilizations*. Istilah *civilize* merujuk kepada memperbaiki tingkahlaku barbarian kepada sesuatu yang sopan dan menyelaraskan dengan keperluan masyarakat.

Ringkasnya *civilized* bisa disebut sebagai keluar daripada kehidupan primitif atau barbarian kepada kehidupan yang mempunyai kehalusan akal budi dan kesopanan (*Oxford Latin Dictionary, New York: Oxford University Press, 1983, halaman 222*).

Jika merujuk asal usul kata, istilah *civilizations* berasal dari bahasa Latin yaitu *civitas*, artinya kota atau pelabuhan.

Perkataan peradaban lebih sinonim dengan kota karena setiap peradaban atau kemajuan memiliki pusat-pusat kegiatan ekonomi dan lain-lain dengan ciri-ciri yang ada pada sebuah kota (Muhammad Abdul Jabbar Beg, 1982).

Dalam bahasa Yunani, peradaban merujuk kepada perkataan *kei*, *nomos* dan *keimelion*. Perkataan *kei* berarti terbentang atau terhampar. *Kei* berarti kediaman atau rumah. Ini berarti peradaban dalam bahasa Yunani bermakna sesuatu yang terbentang seperti segulung permadani yang dihampar (Liddle & Scot, 1997).

Tempat perlindungan yang berarti adanya undang-undang untuk mencapai keselamatan dan keamanan. *Nomos* merujuk kepada jalan, *method*, unsur peraturan atau laluan serta undang-undang yang ditetapkan. *Nomos* juga merujuk kepada malaikat yang membawa undang-undang yang dihamparkan ke hadapan manusia untuk membawa keamanan dan keselamatan kepada manusia. *Keimelion* pula berarti *khazanah* atau harta yang disimpan.

Dalam bahasa Arab, beberapa istilah sering digunakan untuk menjelaskan konsep peradaban seperti *madaniah*, *hadarah* dan *tamaddana*. Perkataan peradaban lahir daripada perkataan *maddana* yang mempunyai dua pengertian, yaitu merujuk kepada perbuatan membuka pelabuhan atau kota, serta perbuatan memperhalus budi pekerti.

Dari *maddana* muncul perkataan *maddani* yang membawa arti pembangunan perkotaan serta kehalusan budi pekerti yang terpuji ((Chandra Muzaffar, 2000). *Hadarah* sering dikaitkan dengan kehidupan yang sudah maju. Lawannya ialah *badawah* yang berarti mundur. Kehidupan *hadarah* banyak tertumpu kepada unsur-unsur yang bercorak perdagangan, kemajuan teknologi, dan pengkhususan pekerjaan. Kota-kota dalam bahasa

Arab dipanggil mudun yang memiliki ciri-ciri *tamadun* (beradab).

Perkataan *tamadun* diambil dari kata dasar bahasa Arab *Tamaddana* atau *Madana*, yaitu pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal, membangun sesuatu kawasan hingga menjadi suatu pusat kegiatan hidup. Kamus *al-Munjid* menjelaskan istilah *tamadun* adalah lahir daripada lafaz *tamaddana*, yaitu perubahan cara kehidupan dari *nomad* (berpindah-pindah) kepada kehidupan yang menetap dan maju (Chandra Muzaffar, 2000).

Dari perspektif Islam, peradaban dikaitkan dengan perkataan *umran*, adab dan *dinnun* atau *dainun*. Umran bermakna harta, kawasan yang didiami, berkembang subur dan maju, perhimpunan, melawat dan hidup berpanjangan .

Istilah adab merujuk pula kepada aktivitas memperbaiki sesuatu. *Adbun* bermakna memperbaiki tingkah laku dan pemikiran. *Ta'dib* adalah proses membentuk disiplin yang baik. Perkataan *dainun* berarti kepatuhan, penyerahan; cara hidup, pinjaman; hakim atau pemerintah (Mahdi Shuid & Saliza Saad, 2002).

Ciri utama yang mendasari sesebuah peradaban ialah pertumbuhan sebuah kota. Istilah-istilah yang membawa makna peradaban seperti *civitas*, *maddana* atau *hadarah* menggambarkan kehidupan di sebuah kota karena kehidupan kota mencerminkan kompleksitas kehidupan yang melahirkan pengkhususan kerja, inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang.

Ciri kedua peradaban yaitu tingkahlaku yang luhur dan murni. Hal ini telah ditegaskan melalui perkataan *civilize* dalam bahasa Inggris dan *adab* serta *adbun* dalam bahasa Arab. Kemajuan dalam berbagai bidang merupakan ciri ketiga peradaban.

Memperhatikan uraian diatas jelaslah bahwa istilah peradaban mempunyai pengertian mengenai kemajuan yang dicapai suatu masyarakat baik mencakup aspek material maupun spiritual.

Pendidikan dan Peradaban

Suatu kelompok atau masyarakat atau bangsa menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar masyarakat itu bisa melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk kelakuan lainnya yang diharapkan akan dimiliki setiap anggota masyarakat. Dengan demikian pendidikan bisa dinyatakan sebagai bentuk sosialisasi (S. Nasution, 2001). Atau dengan kata lain pendidikan menjadi sebagai intrumen bagi tujuan suatu bangsa atau negara (H.A.R. Tilaar, 2008).

Melalui pemahaman bahwa pendidikan itu sebagai sebuah sosialisasi atau instrumen, maka dapat dikatakan ketika suatu bangsa atau negara memiliki rencana untuk masa depannya seperti pembangunan peradaban, maka pendidikan berperan strategis untuk mencapai cita-cita pembangunan peradaban tersebut.

Arti penting pendidikan dalam pembangunan peradaban sudah dirasakan oleh para pendiri bangsa. Antara tahun 1935-1936, dan kemudian 1939, di Indonesia (Hindia Belanda ketika itu) terjadilah apa yang kemudian disebut sebagai polemik kebudayaan. Polemik ini bermaksud untuk mencari bentuk atau wajah bagi konsep tentang Indonesia.

Ada yang sangat percaya bahwa pendidikan Indonesia harus meniru barat, sedangkan yang lainnya percaya Indonesia harus

independent dan tidak perlu meniru siapa-siapa. Indonesia harus mempunyai jati diri sendiri. Ada juga yang menawarkan konsep pendidikan Islam dan seterusnya. Polemik seperti itu kinipun masih terus berlangsung.

Apapun arah yang dituju dalam pembangunan peradaban, peran pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis. Peran strategis pendidikan menurut H.A.R. Tilaar (2008) dalam pembangunan peradaban antara lain:

Pertama, preservasi-dinamik kebudayaan, yaitu pendidikan berperan untuk memelihara dan melanjutkan budaya dari generasi ke generasi, namun tetap mengambil budaya yang sesuai dengan hal-hal yang mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Sebagai contoh nilai budaya yang harus ditransformasi dalam pendidikan diantaranya: disiplin, penghargaan terhadap waktu, orientasi pada kerja serta prestasi, kemampuan berfikir *konstruktif* dan sintesis, respek dan toleran. Transfer nilai sangat penting dalam pendidikan sebab jika pendidikan hanya mentransfer *skill*, maka anak tidak akan berkembang. Sebaliknya jika penanaman nilai itu sangat kuat, maka anak akan mencari *skill* dari lingkungannya.

Kedua, partisipatoris, yaitu pendidikan harus ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan SDM yang relevan bagi pembangunan. Karena itu jika terjadi *out put* pendidikan yang tidak relevan dengan perkembangan pembangunan, maka dunia pendidikan harus bertanya seperti pertanyaan J.F Kennedy pada tahun 1957 ketika Amerika tertinggal dalam teknologi ruang angkasa dari Uni Soviet: "*What's wrong with American classroom*"? Misalnya, untuk menjadi negara yang kuat maka Indonesia membutuhkan kelas menengah yang kuat, antara lain dengan melahirkan para pengusaha sukses (*entrepreneur*), maka pendidikan sangat berperan dalam mendidik kelas menengah dan calon-calon *entrepreneur* tersebut.

Ketiga, *preparatoris-antisipatoris*, yaitu pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu mengantisipasi berbagai situasi dan keadaan. Tidak mudah menyiapkan generasi seperti itu apalagi perubahan di masa depan begitu cepat dan tidak terduga, namun demikian dunia pendidikan harus mampu melihat *trend-trend* yang akan terjadi di masa depan. Melalui trend tersebut, generasi muda bisa memahami apa yang akan terjadi di masa depan seperti terancamnya kelestarian lingkungan hidup, perlunya energi yang terbarukan, dll.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa peran pendidikan sangat besar dalam proses pembangunan peradaban. Peradaban sebuah bangsa tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa didukung oleh pendidikan. Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam namun karena miskin sumber daya manusianya, maka Indonesia bisa tenggelam oleh negara kecil namun sumber daya manusianya berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kunci bagi pembangunan peradaban Indonesia masa depan.

KESIMPULAN

Pendidikan sering diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kunci bagi bangsa manapun dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sangat berperan strategis dalam pembangunan peradaban, khususnya dalam menyiapkan SDM yang sesuai dengan tuntutan pembangunan peradaban. Peradaban sendiri sering diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai ciri-ciri kemajuan material dan spiritual. Kualitas SDM pada satu negara lebih berharga dari kekayaan alam.

Banyak negara yang tidak memiliki kekayaan alam namun bisa hidup lebih makmur dan sejahtera daripada negara yang memiliki kekayaan yang melimpah seperti Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan peradaban, maka pendidikan memegang peranan penting. Tidak ada kemajuan SDM tanpa pendidikan. Peran pendidikan dalam pembangunan peradaban antara lain sebagai preservasi-dinamik kebudayaan, partisipatoris, dan *preparatoris-antisipatoris*.

Dalam membangun peradaban Indonesia, hendaknya masyarakat Indonesia bisa membuka diri dengan berbagai kebudayaan dari luar karena semakin masyarakat terbuka, maka semakin mungkin masyarakat bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Dalam konteks ini penerjemahan karya-karya intelektual dari berbagai belahan dunia ke dalam bahasa Indonesia perlu digalakan.

Pemerintah dan masyarakat hendaknya mampu menyaring mana yang berguna dan mana yang tidak berguna bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan baik. Ini artinya pemerintah dan masyarakat perlu komunikasi yang baik sehingga terjalin kerja sama yang baik. Dalam konteks ini nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Guru-guru merupakan garda terdepan dalam pembangunan peradaban. Dalam konteks ini guru-guru harus menjadi contoh terbaik (*role model*) bagi anak-anak, baik dalam kehidupan di sekolah maupun di luar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra Muzaffar, *Pengenalan Ilmu Ketamadunan dalam Tamadun Islam dan Tamadun Asia*, Kuala Lumpur:

Universiti Malaya, 2000.

Didik J. Rachbini, *Pembangunan Ekonomi dan SDM*, Jakarta: Grasindo, 2001.

H.A.R. Tilaar, *Managemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.

Liddle & Scot, *An Intermediate Greek-English Lexicon*, London: Oxford University Press, 1997.

Mahdi Shuid & Saliza Saad, *Tamadun Dunia*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 2002.

Oxford Latin Dictionary, New York: Oxford University Press, 1983.

Muhammad Abdul Jabbar Beg, *Islamic and Western Concepts of Civilization*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1982.

Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008.

S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Uyoh Sadulloh, *Pedagogik*, Bandung: Cipta Utama, 2007.

PERSPEKTIF BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK DALAM PENDIDIKAN 3-T DAN PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

Pendidikan sangat berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Namun selama ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah pendidikan khususnya di daerah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Jika pendidikan di daerah 3T tidak terlaksana dengan baik, maka hal itu akan berpengaruh pada keadaan Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan pendidikan baik dalam perspektif budaya, ekonomi maupun politik.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas, kondisi geografis maupun sosiokultural sangat heterogen yang pada beberapa wilayah kondisi pendidikannya masih mengalami permasalahan, terutama di daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T antara lain seperti tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Program Sarjana Mendidik di Daerah 3 T, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012 sebagai berikut: kekurangan jumlah (*sortage*), distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi dibawah standar (*under qualification*), kurang kompeten (*low competencies*), serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampuh (*miss match*).

Permasalahan lain dalam penyelenggaraan pendidikan di area 3 T adalah angka putus sekolah yang relatif tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan masih sangat kurang.

Permasalahan-permasalahan di atas perlu diatasi karena hal tersebut terjadi di bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewajiban negara dalam bidang pendidikan adalah menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara. Oleh karena itu, pembahasan dan solusi untuk pendidikan di 3T harus jelas dan tuntas.

FOKUS KAJIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini bertujuan untuk melihat pendidikan dalam perspektif politik, ekonomi,

sosial, dan budaya, khususnya dalam melihat pendidikan di area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Lebih spesifik tujuan makalah ini yaitu: memahami kedudukan strategis pendidikan nasional dalam proses pembangunan, memahami peran pendidikan dalam pembangunan kebudayaan nasional, memahami peran pendidikan dalam membangun ekonomi, memahami pengaruh kondisi politik terhadap pendidikan dan peranan pendidikan dalam membangun kehidupansosial, ekonomi, dan budaya, dan mendeskripsikan beberapa daerah 3T dan menjelaskan solusi dari permasalahan pendidikan di daerah 3T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Pendidikan

Jacques Delors (1996) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendidikan mempunyai peran fundamental dalam kemajuan perseorangan dan sosial. Pendidikan walaupun bukan merupakan sebuah obat ajaib atau formula magic pembuka pintu dunia untuk kehidupan yang ideal, namun pendidikan sangat bermakna untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertindasan dan perang. Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa pendidikan berperan strategis dalam memajukan sebuah bangsa.

Soedijarto (2007) mencatat bahwa para *founding father* sudah menyadari peran strategis pendidikan dalam pembangunan. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya pasal pendidikan secara khusus ke dalam UUD 1945. Menurut Soedijarto

dimasukkannya pendidikan dalam UUD 1945 karena para *founding father* menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuk modernisasi melalui gerakan *renaissance* sedangkan Indonesia sebaliknya masuk era kegelapan yaitu penjajahan selama hampir 350 tahun. Karena itu kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh peradaban modern. Ketika Indonesia merdeka 90% rakyat Indonesia buta huruf dan sisanya berpendidikan sekolah desa (3 tahun pendidikan dengan bahasa daerah dan aksara daerah) atau sekolah nomor dua (menggunakan tulisan latin dan bahasa melayu). Oleh karena itu para pendiri republik memfungsikan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Walaupun pendidikan itu sangat penting dan para pendiri republik menyadarinya, namun kualitas manusia Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan bermutu. Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu tersebut menyebabkan semakin terpuruknya posisi Indonesia dalam kancah persaingan global.

Sofyan Sauri, dalam Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu, file.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 15 Mei 2013 memaparkan berikut. Menurut catatan UNDP tahun 2006, *Human Development Index* (HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia/UNDP tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Sementara berdasarkan *Global Competitiveness Indeks* tahun 2008 menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di

peringkat 54 dari 134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di atas. Menurut The 2006 *Global Economic Forum on Global Competitiveness Index* (GCI) yang di-relese WEF tersebut, daya saing global Indonesia berada pada posisi yang terpuruk. Untuk wilayah Asia, macan asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6. Sementara Jepang, rangking ke-12. China dan India rangking 49 dan 50. Pada periode yang sama, kualitas sistem pendidikan Indonesia juga berada pada peringkat 23. Di mata WEF, Indonesia disejajarkan dengan Gambia, masuk dalam kategori Negara *low-income countries*.

Menyadari masih rendahnya mutu manusia Indonesia, maka pemerintah sesuai UUD 1945 harus melakukan langkah-langkah berikut:

1. Membantu putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, bukan hanya membebaskan mereka dari membayar SPP, tetapi memberikan beasiswa kepada putra-putri bangsa dimanapun untuk mengikuti pendidikan menengah dan tinggi;
2. Membiayai sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh setiap warga negara usia sekolah. Ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya membebaskan mereka dari membayar SPP, tetapi harus membantu anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Pemerintah wajib mengupayakan agar semua sekolah di Indonesia, terutama sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, dapat diselenggarakan sesuai dengan standar yang secara nasional ditentukan oleh pemerintah baik tenaga gurunya, sarana dan prasarana, kurikulum dan

proses pembelajaran dan alat-alat, dan media pendidikan terutama buku murid-buku guru;

4. Pemerintah wajib membangun universitas terutama universitas negeri, agar dapat berperan menyiapkan sarjana yang bermutu, menghasilkan IPTEK melalui kegiatan penelitiannya dan dapat ikut berperan dalam proses pembangunan masyarakat, negara, bangsa sebagai wujud dari upaya melaksanakan tanggung jawab konstitusional sebagai tertulis dalam pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yaitu memajukan IPTEK.

Pendidikan dan Budaya

Pendidikan berperan strategis dalam pengembangan budaya. Akan menjadi apa sebuah bangsa sangat tergantung pada pendidikan yang mereka lakukan. Ketika Amerika merasa kalah bersaing dengan Uni Soviet, maka bangsa Amerika mempertanyakan sistem pendidikan mereka: *What's wrong with the American class room?* Ketika Jepang kalah dalam perang dunia kedua, maka Jepang memulai bangkit dari kekalahan dengan membangun pendidikan. Contoh dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura juga relatif sama bahwa jika ingin maju maka nomor satukan pendidikan. Begitu pun ketika bangsa ini ingin mengembangkan budaya nasional, maka tidak ada pilihan lain kecuali memperkuat pendidikan untuk pengembangan budaya.

Budaya menurut Talcott Parsons at all (1951) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu (1) sistem kepercayaan yaitu sesuatu yang secara kognitif dianggap paling unggul (a *primacy cognitive of interest*): (2) sistem simbolisasi ekspresi, seperti bentuk-bentuk seni dan gaya hidup; dan (3) sistem orientasi terhadap nilai-nilai, yaitu

kemampuan memilih berbagai *alternative* sebelum melakukan tindakan. Dengan memperhatikan pendapat Parsons tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya terdiri dari sistem berpikir, bersikap dan bertindak.

Dalam konteks pembangunan budaya di Indonesia, budaya yang perlu dikembangkan melalui lembaga pendidikan yaitu mengubah cara-cara tradisional menjadi moderen, mengubah berpikir irasional menjadi rasional, mengubah dari masyarakat yang belum cerdas menjadi cerdas, dan mengubah cara hidup yang tidak demokratis menjadi demokratis.

Harold Lasswell seperti dikutip oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba (1965) menjelaskan beberapa karakteristik masyarakat demokrasi yaitu: (1) an "*open ego*" yaitu perilaku membuka diri (*inklusif*) dan hangat terhadap sesama manusia, (2) kapasitas untuk berbagi nilai-nilai dengan sesama, (3) berorientasi pada nilai yang beragam, (4) percaya dan yakin kepada kemampuan manusia dan lingkungannya, dan (5) bebas dari rasa cemas dan takut.

Dalam UU SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003 BAB II pasal (3) menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

David MacClelland merumuskan orientasi budaya untuk masa depan yaitu: (1) berorientasi ke depan (*future orientation*); (2) hasrat untuk mengeksplorasi lingkungan (*efficacy*); dan

(3) orientasi terhadap hasil kerja (*achievement orientation*). Sedangkan Kuntjaraningrat seperti dikutip oleh Suryadi (1999:82) menyebutkan orientasi budaya yang diperlukan di masa datang yaitu budaya berorientasi ke masa depan, berorientasi terhadap perubahan, dan kemampuan untuk belajar terus menerus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia mendukung penciptaan budaya baru yang lebih responsif dan adaptif dengan lingkungan yang terus berubah. Namun kenyataannya, pendidikan Indonesia masih jauh dari menghasilkan manusia berbudaya seperti disebutkan di atas. Oleh karena itu, tidak ada pilihan kecuali melakukan reformasi yang bermakna bagi berperannya lembaga pendidikan sebagai lembaga sosialisasi dan pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku manusia Indonesia dalam mengarungi abad globalisasi.

Konsekuensi dilaksanakannya reformasi tersebut adalah tersedianya infra struktur dan fasilitas pendidikan yang memadai serta tersedianya tenaga kependidikan yang berjiwa pendidik dan profesional dengan dukungan sistem evaluasi yang relevan bagi tumbuh dan berkembangnya kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku manusia Indonesia yang dicita-citakan (Soedijarto, 2000:46).

Kenapa budaya yang terlihat dari hasil pendidikan kita cenderung menjauh dari yang dicita-citakan, seperti kecenderungan untuk membiarkan perilaku tidak jujur, membiarkan pelanggaran, membiarkan ketidakdisiplinan dan ketidakadilan, dan membiarkan rasa takut terus berkembang. Adanya kecenderungan-kecenderungan tersebut diduga karena praktek pendidikan masih jauh dari yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan budaya baru seperti berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan dan Ekonomi

Philip Kotler (1997:22) berpendapat bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa yaitu (1) *Natural Capital* (sumber daya alam) seperti tanah, mineral, tambang, air, dan lain-lain, (2) *Physical Capital* (modal fisik) seperti mesin-mesin, bangunan, dan infrastruktur, (3) *Human Capital* (SDM) yaitu nilai produktivitas manusia seperti kreativitas, inovasi, dan lain-lain, (4) *Social Capital* (modal sosial) seperti kualitas keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, yang menjadi perekat hubungan sosial.

Dari keempat modal tersebut SDM menurut Frederick Harbison (1965) merupakan modal paling utama karena SDM yang berkualitas akan mampu mengelola dan memobilisasi dana, mengembangkan teknologi, memproduksi barang dan jasa, dan melakukan aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, jika suatu negara tidak berhasil dalam mengembangkan SDM maka negara tersebut tidak akan membuat apapun, apakah itu membuat sistem politik yang moderen, menumbuhkan nasionalisme dan membangun masyarakat yang sejahtera. Maka untuk mencapai kemajuan maka pemberdayaan SDM melalui pendidikan harus menjadi pilihan utama dan pertama. Hal tersebut terbukti di beberapa negara bahwa negara maju memiliki pendidikan yang maju pula.

Pendidikan memiliki peran penting terhadap kemajuan ekonomi. Laporan Bank Dunia yang berjudul *The East Asean Miracle: Economic Growth and Public Policy* (1993) mengkaji secara analitis tentang pembangunan negara-negara di dunia. Dari kajian itu ditemukan 8 negara Asia Timur yang mempunyai prestasi sangat mengesankan dalam laju pertumbuhan

ekonominya melebihi apa yang dicapai oleh negara-negara lain di dunia. Sedemikian tinggi dan konsistennya prestasi pembangunan pada 8 negara itu sehingga disebut sebagai negara yang membuat keajaiban. Ke-8 negara tersebut oleh Bank Dunia disebut *High Performing Asean Economics* (HPAEs) terdiri dari peringkat atas “empat macam asia” (Korea Selatan, Taiwan, Cina, Hongkong, Singapura) dan tiga negara yang digolongkan sebagai *Newly Industrializing Economies* (NIEs) yaitu (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) perbandingannya bukan hanya dalam lingkup ASIA tetapi di seluruh dunia. Sejak tahun 1960 pertumbuhan ekonomi di 8 negara ini dua kali lebih cepat dari negara Asia Timur lainnya, tiga kali lebih cepat dari negara-negara Amerika Latin dan Asia Selatan, dan lima kali lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara Afrika. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara industri lain dan negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara, tingkat pertumbuhan yang dicapai delapan HPAEs itu masih lebih tinggi.

Dari laporan tersebut ternyata pendidikan mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk memacu efisiensi dan produktifitas berbagai sektor pembangunan sehingga berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pendidikan yang hampir sama yang diambil oleh masing-masing dari delapan negara ini adalah sebagai berikut: *education policies that focused on primary and secondary school generatif, rapid, increase in labour forces skills.*

Di Indonesia kebijaksanaan yang dimaksud adalah wajib belajar pendidikan dasar (*Universal Basic Organization*) mulai dari perluasan SD sejak awal tahun 70an dan di SLTP pada akhir tahun 1980an. Perluasan pendidikan dasar ini kemudian diikuti oleh perluasan kesempatan pendidikan menengah dan tinggi (Suryadi, 1999:236-237).

Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah). Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara.

Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan pendidikan karena perbaikan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi.

Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Di mana nilai balik dari investasi pendidikan (*return on investment = ROI*) tidak dapat langsung dinikmati oleh investor saat ini, melainkan akan dinikmati di masa yang akan datang. Mengingat modal fisik, tenaga kerja (SDM), dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (*input*) dalam produksi pendapatan nasional. Maka semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*)

sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; 1) pentingnya skala ekonomi; dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.

Studi yang dilakukan Dale Jorgenson et al(1987) pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-79 misalnya menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (*capital formation*), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi.

Ace Suryadi (2001) menegaskan dari hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai kesadaran sosial politik dan budaya, serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial. Meski modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan engineering lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi. Ini beralasan karena melihat data AS misalnya, total kombinasi kedua faktor ini menyumbang sekitar 65 persen pertumbuhan ekonomi AS pada periode 1948-79.

Namun, sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin-mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat dan berkualitas. Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor modal manusia dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen.

Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas. Buku terakhir William Schweke, *Smart Money: Education and Economic Development* (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum.

Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai

problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan ketampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Pendidikan dan Politik

Politik sangat berpengaruh pada pendidikan dan pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan politik. Pendidikan dan politik, keduanya merupakan elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat disuatu Negara.

Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik disuatu Negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikannya. Jadi antara pendidikan dan politik itu mempunyai hubungan erat dan dinamis. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.

Ketika ada tuntutan agar pendidikan dituntut berperan lebih banyak dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya khususnya untuk mengentaskan kemiskinan, maka sistem politik di suatu negara melakukan respon dengan cara yang berbeda-beda. Tidak mungkin pendidikan dapat melakukan peran lebih baik tanpa dukungan politik yang secara konsisten membangun masa depan yang lebih baik dengan cara melakukan reformasi, memilih pilihan prioritas dan terbaik dan menjamin terjadinya keterlibatan debat publik dalam pembiayaan pendidikan.

Delors berpendapat bahwa memilih pendidikan sama halnya dengan memilih jenis masyarakat (*choice of education means choice of society*). Delors melihat tuntutan peningkatan pendidikan sudah direspon positif oleh sistem politik di negara-negara berkembang namun mereka berhadapan dengan berbagai keterbatasan sumber daya (Delor, 1996:156).

Salah satu perdebatan politis dalam bidang keterbatasan sumber daya adalah penentuan alokasi dana untuk pendidikan. Menurut Coombs (1970:180) selama ini anggaran terbesar dari negara-negara di dunia terserap pada bidang pertahanan (militer). Oleh karena itu ia berpendapat harus terjadi *reallocation* yang lebih mengutamakan pendidikan. Dalam konteks Negara Indonesia, kebijakan alokasi anggaran pendidikan sudah mengalami kemajuan dengan dicantumkannya ketentuan dalam UUD 1945 ayat (4) pasal 31 tentang kewajiban diadakannya anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD ketika terjadi amandemen UUD 1945 yang terjadi tahun 2003.

Perdebatan politik penyelenggaraan pendidikan lainnya yaitu mengenai sentralisasi atau desentralisasi pendidikan. Seiring dengan tuntutan global dan kebijakan otonomi daerah tahun 1999, Indonesia memilih menerapkan kebijakan otonomi pendidikan.

Sejauh ini pelaksanaan desentralisasi pendidikan masih jauh dari harapan karena para pejabat politik daerah menunggangi pendidikan. Ada beberapa pejabat pendidikan di daerah yang ditunjuk pejabat daerah karena balas jasa menjadi tim sukses pemilu kepala daerah. Keadaan ini semakin memperkeruh pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Carnoy and Levin dalam buku *The Limits of Educational Reform* (1976) menganalisis pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu:

- (1) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara,
- (2) Politik berpengaruh pada anggaran pendidikan,
- (3) Berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru,
- (4) Sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa,
- (5) Mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.

Adapun pengaruh pendidikan terhadap pembangunan politik yaitu bahwa akhir dari proses pendidikan diharapkan mampu mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Menurut Levin, dalam konteks tersebut pendidikan berperan sangat penting karena pendidikan mampu menyiapkan SDM yang diharapkan. Misalnya, sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan SDM yang berkualitas,

begitu juga dengan sistem politik, sosial dan budaya hanya mungkin berjalan jika ditunjang dengan SDM yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa politik dapat mempengaruhi pendidikan dan pendidikan dapat mempengaruhi kehidupan politik. Namun sejauh mana pengaruh pendidikan pada pembangunan politik sangat tergantung pada bagaimana pendidikan dipraktikkan dalam proses pendidikan. Jika proses pendidikannya baik, maka hasil (output) dari pendidikan juga akan baik dan berpengaruh pada kehidupan, bukan hanya kehidupan politik tetapi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bahkan ilmu pengetahuan.

Pendidikan 3T

Salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam kenyataannya, pendidikan yang merupakan akses utama untuk mencapai tujuan tersebut masih sangat minim dan asing terutama di daerah-daerah pelosok negara Republik Indonesia di daerah perbatasan dan daerah yang belum terjamah teknologi komunikasi maupun transportasi.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mengklasifikasikan daerah 3T yaitu daerah tertinggal, terluar dan terdalam. Dikategorikan tertinggal yaitu dilihat dari segi akses. Terpencil yaitu dari segi letak geografis dan lamban dari segi pertumbuhan. Sedangkan terluar dari segi jangkauan dari pusat layanan.

Berbicara mengenai pendidikan, di kawasan perbatasan tersebut memerlukan lebih banyak perhatian dan sentuhan. Letak geografisnya sangat jauh dari ibu kota provinsi dan kabupaten, menjadi alasan mengapa pendidikan di sana

kurang perhatian dan sentuhan. Alasan lain adalah belum ada akses jalan darat yang memadai, saluran komunikasi melalui telepon seluler maupun kabel tidak tersedia, dan belum terjangkau aliran listrik. Kondisi geografis di daerah perbatasan menyulitkan banyak anak mendapatkan akses pendidikan. Di beberapa perkampungan atau dusun di perbatasan Kalimantan Barat misalnya, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga lebih dari 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari.

Kondisi sulit yang dihadapi anak di perbatasan juga dialami oleh para guru, terutama para guru honorer yang kebanyakan honor komite. Paraguru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Hal ini karena kekurangan tenaga guru di sekolah perbatasan. Kondisi yang dialami oleh para siswa dan guru di daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia.

Tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari solusinya, agar pendidikan di sana memiliki kualitas yang sederajat dengan daerah lain yang letak geografisnya lebih menguntungkan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kini sudah menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan di kawasan 3T tersebut. Kita patut khawatir terjadi dampak buruk jika pendidikan di sana kurang diperhatikan, misalnya pengikisan nasionalisme yang bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa.

Kemendikbud (2012) mengidentifikasi sekolah sekolah di daerah 3T dengan mengacu pada daftar wilayah yang dikategorikan oleh Kementerian PDT tersebut. Kemudian, daftar sekolah dari data pokok pendidikan (Dapodik) yang berada di wilayah 3T dikofirmasikan kepada pemda kabupaten yang bersangkutan untuk kemudian direkomendasikan

sebagai sekolah-sekolah penerima program bantuan 3T. Konfirmasi silang ini dilakukan untuk mengecek apakah sekolah-sekolah yang terdata pada Dapodik dan berada di daerah 3T benar-benar sesuai dengan sasaran program. Berikut adalah daftar 3T yang merupakan sasaran program Sarjana Mengajar (SM) 3T 2012:

1. Provinsi Aceh:
 - a. Kabupaten Simeulue
 - b. Kabupaten Aceh Singkil
 - c. Kabupaten Aceh Selatan
 - d. Kabupaten Aceh Timur
 - e. Kabupaten Aceh Barat
 - f. Kabupaten Aceh Besar
 - g. Kabupaten Gayo Lues
 - h. Kabupaten Pidie Jaya.

2. Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:
 - a. Kabupaten Sumba Timur
 - b. Kabupaten Kupang
 - c. Kabupaten Lembata
 - d. Kabupaten Flores Timur
 - e. Kabupaten Ende
 - f. Kabupaten Ngada
 - g. Kabupaten Alor
 - h. Kabupaten Manggarai
 - i. Kabupaten Rote Ndao
 - j. Kabupaten Manggarai Timur

3. Provinsi Su/aWesi Ltafai
 - a. Kabupaten Talaud
 - b. Kabupaten Sangihe
 - c. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

4. Provinsi Papua
 - a. Kabupaten Biak Numfor
 - b. Kabupaten Waropen
5. Provinsi Papua Barat
 - a. Kabupaten Manokwari
 - b. Kabupaten Raja Ampat
 - c. Kabupaten Teluk Bintuni
 - d. Kabupaten Sorong
6. Provinsi Kepulauan Riau
 - a. Kabupaten Natuna
 - b. Kabupaten Kepulauan Anambas
7. Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau
8. Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Kabupaten Malinau
 - b. Kabupaten Nunukan
 - c. Kabupaten Kutai Barat

Setidaknya ada delapan langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam membangun pendidikan berkelanjutan di wilayah 3T. Yaitu Pertama, membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan, seperti memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak dan fasilitas pembelajaran lainnya. Kedua, memenuhi kebutuhan guru. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif yang layak, selain gaji. Keempat membuka akses komunikasi yang layak, seperti penyediaan transportasi yang memadai, dan komunikasi lisan yang dapat diakses melalui telepon seluler/ telepon kabel. Kelima, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan agar tercipta pembelajaran yang efektif. Keenam, mengembangkan kurikulum yang berkearifan lokal, sehingga sesuai untuk diterapkan di daerah perbatasan.

Ketujuh, menuntaskan buta aksara. Dan kedelapan, batasi pembangunan unit sekolah baru, cukup sekolah yang ada diberi asrama atau sekolah berasrama.

Menurut Muhammad Nuh pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2013 mengemukakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia termasuk di daerah 3T untuk itu pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak termasuk di dalamnya mengirim guru melalui program Sarjanaa Mendidik (SM-3T). Dari sisi keterjangkauan pemerintah menyiapkan anggaran 7,8 trilyun untuk bantuan siswa miskin (BSM). Untuk Papua pemerintah melaksanakan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu apapun kendala dan hambatannya maka pendidikan harus dilakukan secara bermutu di semua pelosok penjurut tanah air. Adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di daerah 3T perlu diapresiasi dan terus ditingkatkan agar Indonesia menjadi negara maju dan dapat bersaing di tengah gelombang globalisasi.

Pendidikan dan Karakter Bangsa

Memperhatikan peran strategis pendidikan baik dalam perspektif pembangunan budaya, ekonomi maupun politik, maka jelaslah bahwa pendidikan sesungguhnya merupakan sebuah alat dalam pembentukan karakter sebuah bangsa. Bangsa yang ingin maju, harus melakukan upaya pendidikan

yang sungguh-sungguh. Banyak bukti menunjukkan negara yang melakukan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunannya, mereka mampu mengejar berbagai ketertinggalan dengan negara lain. Apalagi kondisi Indonesia yang heterogen, termasuk di dalamnya di daerah 3 T, maka upaya serius membangun pendidikan harus merupakan pilihan utama dan pertama. Jika Indonesia tidak mampu melakukan pendidikan, maka karakter bangsa ini akan terjerumus pada karakter yang tidak diinginkan.

Selama ini, Indonesia sudah ada diambang karakter yang merugikan seperti korupsi, kolusi dan karakter buruk lainnya. Jika ini dibiarkan, maka Indonesia takkan mampu mengejar kemajuan yang diraih bangsa lain. Oleh karena itu, pendidikan dan pendidikan karakter harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Pendidikan yang berhasil adalah jika pendidikan mampu melahirkan bangsa yang berkarakter baik dan mampu merubah bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Walaupun pendidikan itu sangat penting dan para pendiri republik menyadarinya, namun kualitas manusia Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan bermutu. Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu tersebut menyebabkan semakin terpuruknya posisi Indonesia dalam kancah persaingan global. Pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam pembangunan budaya, ekonomi dan politik suatu bangsa. Beberapa negara yang memprioritaskan pendidikan terbukti menunjukan kemajuan yang berarti. Pembangunan pendidikan di wilayah 3T harus dilakukan karena hal itu akan

mampu menciptakan karakter bangsa yang dibutuhkan untuk hidup di masa kini dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi, *Pendidikan Investasi SDM dan pembangunan, Isu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Balai pustaka, 1999.
- Frederick Harbison and Charles A. Myers, *Manpower and Education*, Mc.Graw-Hill Book Company, 1965.
- Jaques Delors, *Learning The Treasure Within*, Unesco Publishing, 1996, p.13
- Soedijarto, *Memahami Makna yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan Jakarta*, ISPI, 2007.
- Talcott Parson, *at all, Toward A General Theory of Action*, Happer Torchbook, 1951.
- Gabriel A. Almond and Sidney Velba, *The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Boston and Toronto: Little Brown and Company, 1965.
- Philip Kotler, *The Marketing of Nation, A Strategic Approach to Building National Wealth*, New York: The Free Press, 1997.
- Philip H. Coombs, *The World Education Crisis, A Systems Analysis*, New York: Oxford University press, 1970.
- Pedoman Pelaksanaan Program Sarjana Mendidik di Daerah 3 T, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012.
- Martin Carnoy and Henry M. Levin, *The Limits of Educational Reform*, New York: David Mckay Compani, INC, 1976.

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pedoman Pelaksanaan Program Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) Jakarta: 2012.
- M. Nuh, Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa*, Jakarta: CINAPS, 2000.
- Sofyan Sauri, *Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu*, file.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 15 Mei 2013.

BELAJAR PENDIDIKAN KARAKTER DARI CINA

Alasan utama penerapan pendidikan karakter karena Indonesia membutuhkan manusia yang dapat hidup dalam masyarakat dan sekaligus mampu mengembangkan masyarakat itu sendiri. Indonesia pun dilanda demam pelaksanaan pendidikan karakter. Dalam implementasi pendidikan karakter, Indonesia sebaiknya dapat belajar dari Cina yang sudah terbukti berhasil menerapkannya. Salah satu kelebihan pendidikan karakter di Cina yaitu pendidikan karakter yang dilakukan secara integral dalam pendidikan moral (*morally*), intelektual (*intellectually*), fisik (*physically*), dan estetika (*aesthetically*).

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan strategis dalam membangun suatu bangsa. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat mengembangkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju. Karena melalui pendidikan dapat dikembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa suatu bangsa yang maju pasti memiliki suatu sistem pendidikan yang baik, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Singapura, Finlandia, dll. Kemajuan pendidikan suatu bangsa salah satunya terjadi karena pemerintahnya memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Pengalaman negara yang baru saja memasuki dalam kelompok negaran maju, seperti Malaysia dan Cina menunjukkan hal itu. Kemajuan kedua negara ini karena mereka memiliki komitmen yang kuat dan kepedulian yang tinggi akan dunia pendidikan.

Cina sudah berhasil membuat prestasi yang sangat mengagumkan, yaitu merubah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, yang tadinya hanya sebagai negara berkembang, yang hanya mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakatnya, kemudian berubah dan masuk ke tahap awal menjadi masyarakat yang makmur. Perubahan yang dialami Cina merupakan perubahan yang sangat berarti.

Semua keberhasilan Cina tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh para pemimpin Cina dalam melakukan reformasi, terutama pendidikan. Keyakinan mereka membangun Cina melalui sektor pendidikan terlihat dari upaya ekspansi yang berkelanjutan yang dilakukan sejak tahun 1980 sampai awal tahun 1990. Selama periode ini, pendidikan Cina terus mengalami kemajuan secara cepat, dan banyak inovasi. Kemajuan pendidikan Cina tidak lepas dari upaya secara serius dalam mengembangkan pendidikan karakter.

FOKUS KAJIAN

Berdasarkan paparan diatas, tulisan ini akan memaparkan pendidikan Cina dan bagaimana Indonesia bisa belajar dari Cina, khususnya dalam pengimplementasian pendidikan karakter. Rumusan masalah dalam kajian ini sebagai berikut: (1) Apakah hakikat dari pendidikan karakter? (2) Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di Cina? Bagaimana perbandingan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia dan Cina? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode kajian *literature* dari berbagai sumber kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Karakter

Karakter berkaitan dengan perilaku seseorang. Wyne dalam Mulyasa (2011:3) mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti *"to mark"* (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, kejam, dan rakus dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter jelek, sedangkan yang berperilaku baik, jujur, dan suka menolong dikatakan sebagai sebagai orang yang memiliki karakter baik/mulia.

Karakter seseorang terbentuk karena pendidikan maupun karena lingkungan. Muchlas Samani dan Hariyanto (2001:41) menjelaskan karakter dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang

membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pendapat ini jelaslah bahwa karakter terbentuk karena bawaan maupun karena lingkungan.

Karakter berkaitan dengan cara berpikir seseorang. Suyanto dalam Masnur Muslich (2011:70) menyatakan bahwa karakter yaitu cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan Negara. Dari pendapat ini jelaslah bahwa karakter berkaitan dengan cara berpikir dan berperilaku individu.

Karakter lebih banyak terbentuk karena kebiasaan sehari-hari. Helen G. Douglas dalam Muchlas Samani ((2001:41) menjelaskan bahwa *character is not inherited. One builds its daily by the way one thinks an act, thought by thought, action by action*. Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari, melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, dan tindakan demi tindakan.

Hermawan Kertajaya (2010:3) mengemukakan bahwa karakter adalah "ciri khas" yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut. Ciri khas inipun diingat oleh orang lain tentang orang tersebut, dan menentukan suka atau tidak sukanya mereka terhadap individu tersebut. Karakter memungkinkan individu untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan karena karakter memberikan konsistensi, integritas, dan energi. Orang yang memiliki karakter kuat, akan memiliki momentum mencapai tujuan. Sebaliknya orang yang memiliki karakter lemah dan mudah goyah, maka mereka akan lebih lambat untuk bergerak dan tidak bisa menarik orang lain untuk bekerjasama dengannya.

Doni Koesoema (2006:11) mengemukakan bahwa karakter diasosiasikan dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter juga dipahami dari sudut pandang *behavioral* yang menekankan unsur *somatopsikis* yang dimiliki individu sejak lahir. Di sini, karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau sifat khas pada seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan.

Berdasarkan beberapa konsep di atas dapat dinyatakan bahwa karakter adalah kualitas mental individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakan dengan individu lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam kehidupannya.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah upaya membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Pendidikan karakter merupakan penyatuan antara niat, kata-kata dan perilaku dalam kesatuan. Dewantara dalam Mulyasa (2011) mengemukakan beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam pendidikan karakter, yakni *ngerti-ngroso-nglakoni* (menyadari, menginsyafi, dan melakukan). Hal tersebut senada dengan ungkapan orang Sunda di Jawa Barat, bahwa pendidikan karakter harus merujuk pada adanya keselarasan antara *tekad-ucap-lampah* (niat, kata-kata dan perbuatan). Berdasarkan penjelasan di atas, pendidikan karakter sangat berkaitan dengan pembiasaan agar siswa memiliki konsistensi antara

niat, ucapan dan perbuatan atau satu kata antara hati dan perbuatan.

Di Indonesia, sebagai hasil *sarasehan* Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 14 Januari 2010 telah dicapai Kesepakatan Nasional Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa yang secara singkat dijelaskan bahwa pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan nasional secara utuh, pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif, pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua, dan sebagai merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Sejak *sarasehan* Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa tersebut, gaung pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus meningkat. Namun demikian, gaung yang terus meningkat tersebut belum nampak akan memberikan dampak yang luas pada kehidupan masyarakat, hal ini terjadi karena pendidikan karakter baru sebatas niat dan belum ada langkah kongkrit. Agar upaya pendidikan karakter berhasil, ada baiknya kita lihat dari Negara Republik Rakyat Cina yang sudah berhasil menjadikan pendidikan sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa Cina yang siap menghadapi tantangan global.

Pendidikan Karakter di Cina

Pembahasan pendidikan karakter di Cina banyak di uraikan dalam buku *Education For 1.3 Billion*. Buku ini dikemas dalam

8 bab, 483 halaman, merupakan hasil wawancara Li Lanqing, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Cina (RRC) periode 1993-2003 yang merupakan tokoh penting dalam reformasi pendidikan di Cina.

Dalam bukun *Education, Education For 1.3 Billion* bab 6 menguraikan tentang pendidikan karakter dan mutu pendidikan. Dalam buku tersebut diuraikan pendidikan karakter merupakan reformasi pendidikan yang paling signifikan sejak tahun 1990 yang meliputi isi dan *metodologi* pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Pendidikan karakter di Cina dimulai dengan merumuskan filsafat pendidikan karakter yang meliputi pembahasan mengenai: hakikat dari pendidikan karakter yaitu *“to transform a huge population from being a burden to being superior human resources”*, alasan mengapa pendidikan karakter dibutuhkan yaitu untuk membangun budaya dan etika sosialis, politik yang berkeadaban, dan membangun masyarakat yang sejahtera, tujuan akhir dari pendidikan karakter yaitu membentuk pelajar yang memiliki semangat berinovasi, memiliki keterampilan praktis, memiliki keunggulan moral, intelektual, fisik, seni dan disiplin, mengatasi pandangan yang berorientasi bahwa hasil ujian dalam pendidikan adalah segala-galanya sedangkan pendidikan karakter menekankan bahwa pendidikan adalah pengembangan potensi terbaik yang ada dalam diri siswa, pendidikan karakter menekankan pada pengembangan seluruh kemampuan otak manusia yaitu kecerdasan berbahasa, matematika, *spatial* (ruang), kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal dan kecerdasan mengenal alam, mengejar pencapaian pendidikan karakter akan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Implementasi pendidikan karakter di Cina diperkuat

dengan peningkatan pendidikan moral di sekolah yang dilakukan melalui: merumuskan tujuan dan syarat dasar untuk pendidikan moral di sekolah sesuai dengan keadaan jaman yaitu keunggulan moral, terdidik, disiplin tinggi. Mengimplementasikan *Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, dan Deng Xiaoping Theory* dalam pendidikan.

Dalam memperkuat pendidikan karakter, Cina senantiasa menerapkan tradisi dan nilai-nilai Cina dalam pendidikan seperti kejujuran dan dapat dipercaya, toleransi, spirit kesetiaan pada satu pekerjaan, patriotik, heroik, kesetiaan pada keluarga, rajin, pekerja keras, dan disiplin.

Melakukan penyerapan budaya terbaik dari bangsa lain karena memiliki 2 (dua) keuntungan yaitu dapat meningkatkan budaya sendiri dan meningkatkan persahabatan dengan bangsa lain. Melakukan upaya pendidikan moral melalui penjagaan moral seperti sekarang, merencanakan target moral di masa depan dan meningkatkan efektivitas waktu. Melakukan kegiatan pendidikan moral secara intensif secara nasional. Membentuk *team spirit* dan kegiatan bersama diantara para pendidik karena tidak ada orang yang sukses hanya karena upaya dirinya sendiri seperti Bill Gate dan Edison.

Pendidikan karakter dan mutu pendidikan dilakukan juga dengan reformasi kurikulum, buku teks, sistem tes dan sistem evaluasi. Reformasi kurikulum dilakukan dengan cara antara lain: memperbaiki kompetensi profesional guru yaitu guru harus memperbaiki cara mengajar dengan mambawa para siswa ke dunia nyata (*real situation*), mengajarkan murid untuk mengerti kehidupan sosial dan memahami pentingnya kerja keras.

Guru SD dan SMP diharuskan mengurangi beban belajar siswa

yaitu beban belajar yang ringan tetapi tepat lebih berguna daripada beban belajar yang banyak. Melakukan revisi buku teks untuk mengurangi tumpang tindih dan kesulitan, salah referensi, dan kesalahan konten. Melakukan reformasi kurikulum dengan tepat waktu, jangan ditunda-tunda.

Dalam pendidikan karakter, Cina melakukan reformasi cara mengajar bahasa asing dengan memperhatikan 6 (enam) hal yaitu: mengajar dengan menarik, rajin, terus berlatih, semangat, sabar, dan percaya diri. Tidak mewajibkan siswa untuk dapat menulis kaligrafi huruf Cina. Mengajarkan cara penulisan kaligrafi huruf cina yang sederhana tetapi harus mempelajari bentuk aslinya. Mempercepat dan mewajibkan menggunakan bahasa Putonghua (bahasa ibu di cina) dan mempromosikan bahasa ini dimulai dari pendidikan dasar hingga ke tingkat selanjutnya.

Cina melakukan reformasi sistem tes dan sistem evaluasi karena sistem ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter di sekolah dengan cara: menghapuskan sistem nilai (skala 1-100), evaluasi siswa harus dilakukan secara berkelanjutan setiap hari melalui penilaian kinerja dan hasil tes, tingkatan penilaian harus ditambahkan dengan komentar-komentar berupa pujian, kritik yang membangun, dengan cara penyampaian yang baik, semua aturan penilaian dicantumkan didalam kurikulum dan tidak ada aturan yang tidak sesuai dari yang sudah ditentukan, memberikan kesempatan untuk melakukan tes ulang jika ada mahasiswa yang tidak lulus tes masuk PT dalam kesempatan pertama, sistem tes yang dilaksanakan harus bervariasi tidak hanya tes tertulis tetapi dapat berupa berbagai bentuk tes.

Pendidikan karakter di sekolah dilakukan dengan cara membuat mental dan fisik siswa yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat konsep bahwa

kesehatan adalah yang paling utama dalam hidup. Hal ini dapat diimplimentasikan dengan cara menyelenggarakan pendidikan olahraga yang dimulai dari *Preschool* sampai ke pendidikan tinggi, mengkondisikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman salatnya dengan menerapkan konsep sekolah alarm. Hal lain yang dilakukan guna mendukung kesehatan fisik dan mental yaitu dengan kebijakan jangan pernah mengabaikan keamanan dan kesehatan sekolah sedikitpun.

Pendidikan karakter juga diperkuat dengan penguatan pendidikan *aestetik* dan seni melalui cara sebagai berikut: memperkuat konsep pentingnya *asthetik* dan seni dalam pendidikan yaitu pendidikan *aestetik* dapat mengembangkan spirit kemanusiaan dan mendorong kesehatan mental. Menghubungkan seni dan ilmu pengetahuan karena terbukti karyawan HSBC yang memiliki nilai seni mampu menjadi ahli keuangan yang hebat-hebat. Memperkuat kursus-kursus musik, seni lukis dan kaligrafi di sekolah dasar dan SMP. Mendorong generasi muda untuk berkarya dalam seni suara. Tidak membatasi pertunjukan musik yang hanya disebabkan musik tersebut memiliki pengikut yang terbatas.

Mengembangkan pendidikan musik Cina dan meningkatkannya ke level nasional. Menjadikan *filem Madame Curie dan A Song to Remember* sebagai filem dan orkestra yang direkomendasikan untuk para mahasiswa. Mendekatkan mahasiswa dengan berbagai orkestra dengan prinsip "*the more one learns the more one sees the need to learn*".

Pendidikan karakter juga dilakukan dengan menciptakan masyarakat sebagai lingkungan terbaik dalam pendidikan karakter melalui: menjalankan prinsip bahwa karakter pendidikan tidak dapat efektif tanpa guru dan kepala sekolah yang baik, mengadopsi berbagai variasi ukuran untuk

membentuk tim guru yang berkualitas, menerapkan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang *positive* dan menyehatkan untuk SD dan SMP. Menyiapkan lingkungan masyarakat yang positive dalam menciptakan pendidikan karakter.

Perbandingan Pendidikan Karakter

Tabel disamping ini akan membandingkan konsep dan pelaksanaan pendidikan karakter di Cina dan Indonesia.

No.	CINA	INDONESIA
1	Cina menjadikan pendidikan karakter sebagai pendidikan yang paling utama. Hakikat pendidikan karakternya yaitu: <i>“to transform a huge population from being a burden to being superior human resources”</i>	Indonesia berupaya melakukan hal yang sama, namun hakikat pendidikan karakter di Indonesia belum belum menjadi kesepakatan bersama. Karakter seperti apa? Jika ada rumusnya, atas dasar apa rumusan itu ada?
2	Pendidikan karakter di Cina ditekankan pada pengembangan seluruh kecerdasan yaitu: berbahasa, matematika, spatial (ruang), kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal dan kecerdasan mengenal alam.	Indonesia kurang mengembangkan semua potensi anak didik. Ini terlihat dari sarana dan guru yang tidak dipersiapkan untuk mengembangkan semua kecerdasan anak. Termasuk masih diberlakukanya Ujian Nasional.
3	Cina memperkuat pendidikan karakter dengan peningkatan pendidikan moral yang berasal dari Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, dan Deng Xiaoping Theory	Pendidikan moral Indonesia hanya cukup Pancasila? Mengapa tidak memperkuatnya dengan pendidikan moral dari Gajah Mada, Hasyim Asyari, Hamka, Soekarno, Hatta, Gus Dur, dan pemikir besar Indonesia lainnya.

No.	CINA	INDONESIA
4	Cina menerapkan tradisi dan nilai-nilai Cina dalam pendidikan seperti kejujuran, dapat dipercaya, toleransi, spirit kesetiaan pada satu pekerjaan, patriotik, heroik, kesetiaan pada keluarga, rajin, pekerja keras, dan disiplin.	Apakah yang menjadi tradisi dan nilai-nilai Indonesia? Apakah nilai-nilai Indonesia sudah ada? Jika ada, seperti apakah Indonesia? Apakah Indonesia apa adanya atau Indonesia yang dicita-citakan?
5	Melakukan penyerapan budaya terbaik dari bangsa lain karena memiliki 2 (dua) keuntungan yaitu dapat meningkatkan budaya sendiri dan meningkatkan persahabatan dengan bangsa lain.	Apakah Indonesia mampu menyaring atau langsung menyerap budaya apapun walau tidak baik? Misalnya membenci bangsa Yahudi.
6	Membentuk <i>team spirit</i> dan kegiatan bersama diantara para pendidik karena tidak ada orang yang sukses hanya karena upaya dirinya sendiri seperti Bill Gate dan Edison.	Indonesia melakukan pekan olah raga dan seni, dll, namun demikian yang dimunculkan semangat menangnya bukan kebersamaannya. Ada pertandingan yang berakhir dengan permusuhan.
7	Reformasi kurikulum dilakukan dengan cara antara lain: guru harus memperbaiki cara mengajar dengan membawa para siswa ke dunia nyata (<i>real situation</i>), mengerti kehidupan sosial dan memahami pentingnya kerja keras. Beban belajar siswa harus ringan tetapi tepat guna. Revisi buku teks untuk mengurangi tumpang tindih dan kesulitan, salah referensi, dan kesalahan konten. Reformasi kurikulum dilakukan tepat waktu.	Indonesia melakukan reformasi kurikulum, namun dasar filosofis dan relevansinya kurang jelas serta tidak diikuti oleh perubahan profesionalisme guru dan buku teks. Menurut Prof. Soedijarto, sejak tahun 1975, Indonesia tidak melakukan sungguh-sungguh untuk melakukan national assesment dalam perubahan kurikulum.
8	Cina mengajarkan bahasa asing dengan memperhatikan 6 (enam) hal yaitu: mengajar dengan menarik, rajin, terus berlatih, semangat, sabar, dan percaya diri.	Guru bahasa asing Indonesia tidak jauh beda dengan guru lainnya. Metode mengajarnya bukan " <i>enjoyful learning</i> "

09	Tidak mewajibkan siswa untuk dapat menulis kaligrafi huruf Cina, namun mewajibkan Putonghua (bahasa ibu di Cina) dan mempromosikan bahasa ini dimulai dari pendidikan dasar hingga ke tingkat selanjutnya.	Bagaimana dengan menulis halus di SD Indonesia? Sudah tepatkah cara itu? Memperhatikan saraf motorik halus anak SD belum sempurna, maka menulis halus perlu ditinjau lagi.
10	Menghapuskan sistem nilai (skala 1-100), evaluasi siswa dilakukan setiap hari, menambahkan dengan komentar-komentar berupa pujian, kritik yang membangun, semua aturan penilaian dicantumkan didalam kurikulum, sistem tes yang dilaksanakan bervariasi tidak hanya tes tertulis tetapi dapat berupa berbagai bentuk tes.	Guru-guru Indonesia hanya melihat UTS dan UAS, kadang jawaban siswapun tidak dibaca oleh guru. Guru di Indonesia tidak melakukan penilaian secara berkelanjutan. Sistem tes ini sangat berpengaruh pada karakter siswa.
11	Menyelenggarakan pendidikan olahraga dari Preschool sampai ke pendidikan tinggi, mengkondisikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan menerapkan konsep sekolah alam.	Indonesia juga menerapkan yang sama, namun filosofinya kurang kuat. Cina melakukannya dari konsep bahwa kesehatan adalah nomor satu. Lingkungan sekolah di Indonesia dikelilingi oleh jajanan tidak sehat.
12	Menerapkan pendidikan estetika dan seni karena dapat mengembangkan spirit kemanusiaan dan mendorong kesehatan mental.	Indonesia kurang menerapkan pendidikan ini, sehingga karakter anak tidak terbentuk dengan baik. Tidak banyak sekolah yang mengembangkan kesenian, mungkin hanya rebana yang disosialisasikan.
13	Menjalankan prinsip bahwa karakter pendidikan tidak dapat efektif tanpa guru dan kepala sekolah yang baik.	Pendidikan karakter di Indonesia tidak diikuti dengan pembinaan guru dan kepala sekolah yang baik sehingga siswa kehilangan teladan nyata.
14	Menyiapkan lingkungan masyarakat yang <i>positive</i> dalam menciptakan pendidikan karakter.	Pemerintah Indonesia membiarkan kelompok-kelompok dalam masyarakat saling membenci dan terjadinya kekerasan. Membiarkan kelompok-kelompok garis keras mengendalikan kehidupan masyarakat menyebabkan pendidikan karakter di Indonesia tidak terbangun dengan cepat.

Secara singkat pengembangan pendidikan karakter di Cina menekankan pada pengembangan aspek-aspek individu yang dirangkum dalam slogan: "*Morally, Intellectually, Physically, Aesthetically*". Sumber konsep pendidikan karakter ini sendiri didasarkan pada pernyataan Deng Xiaoping bahwa secara keseluruhan reformasi sistem pendidikan mendesak dilakukan untuk membawa pikiran bahwa reformasi adalah untuk tujuan yang mendasar memutar setiap warga negara ke dalam manusia yang berkarakter dan membina anggota masyarakat yang lebih konstruktif. Di samping itu juga didasarkan pada pendapat Jiang Zemin bahwakita harus menempatkan pendidikan dalam posisi yang strategis dan memberi prioritas untuk pengembangannya, bekerja keras untuk menaikkan ideologi, moral, ilmu pengetahuan, dan budaya nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Para pemimpin Cina sangat percaya bahwa pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Cina akan mengantarkan bangsa Cina ke arah kesejahteraan. Kini keyakinan itu terbukti: ekonomi, politik dan militer Cina tumbuh signifikan. Visi, misi dan *implementasi* reformasi pendidikan di Cina cukup jelas dan semua sumber daya di Cina dikerahkan untuk membangun pendidikan. Indonesia walau memiliki visi, misi dan implementasi kebijakan pendidikan namun tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakannya.

Keberhasilan pendidikan Cina selain dibangun oleh guru-guru yang berkualitas juga karena mendahulukan pendidikan karakter yang didukung dengan perbaikan moral, intelektual, kesehatan jasmani, dan seni budaya atau dalam semboyan singkat: *Morally, Intellectually, Physically, Aesthetically*. Indonesia

ingin meningkatkan pendidikan karakter, namun menjadi pertanyaan ketika nasib guru belum baik, keadaan sekolah belum baik, dan lingkungan social juga belum baik, apakah pendidikan karakter di sekolahitu akan efektif? Agar efektif, maka pendidikan karakter di sekolah harus diimbangi dengan suanana lingkungan yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan Kertajaya, *Grow with Character: The Model Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Li Lanqing. 2005. Education For 1.3 Billion. Beijing: *Foreign Language Teaching and Research Press*.
- Megawangi, Ratna. *Mendidik 1.3 Milyar Manusia*. Suara Pembaruan Daily 2007.
- , *Meningkat, Lanjutkan Pendidikan ke Cina*. Pikiran Rakyat, Kamis, 26 April 2007
- Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumiaksara, 2011.
- Anita Lie. *Pendidikan dan Kemiskinan*. Kompas, 09/07/07.
- Khaerudin, Li-Lanqing-Reformer-Pendidikan-Cina.phphttp://www.ilmupendidikan.net/2008/04/14/

PENDIDIKAN ABAD 21 DAN KURIKULUM 2013: SURVEY TERHADAP GURU- GURU SEKOLAH DASAR MENGENAI KURIKULUM 2013

Kurikulum 2013 belum memberikan respon secara memadai terhadap kebutuhan pendidikan abad 21, misalnya dalam merespon terhadap kerusakan lingkungan, kebebasan individu, bangga sebagai bangsa, kepedulian sosial, dan menjadikan siswa yang mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Apalagi SDM dan sarana prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan kurikulum itu masih sangat kurang memadai. Namun demikian wacana perubahan kurikulum 2013 gaungnya sudah sampai ke guru-guru. Tetapi guru-guru masih ragu apakah kurikulum 2013 bisa merubah mutu pendidikan sesuai tuntutan abad ke 21. Beberapa wacana yang muncul dalam kurikulum 2013 ternyata tidak sesuai dengan persepsi guru, misalnya kasus pengintegrasian pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kedalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai ekstra kulikuler.

PENDAHULUAN

Tahun 2013, Indonesia akan merubah atau memperbaiki kurikulum. Ini berarti ada sejumlah hal yang berbeda dari kurikulum 2004/2006. Ada beberapa wacana yang muncul dalam perubahan kurikulum antara lain: penyederhanaan pelajaran, tematik-integratif, penambahan jam pelajaran, pergeseran paradigma belajar abad 21; pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; buku pegangan atau buku babon; dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan.

Penulis ditunjuk oleh Panitia Seminar Pendidikan Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2013, untuk kepentingan seminar tersebut penulis dibantu oleh tim dari mahasiswa S3 Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan melakukan *survey*. Hasil *survey* menunjukkan bahwa 60% guru belum mendapatkan sosialisasi perubahan kurikulum, 60% guru tidak yakin perubahan kurikulum akan berimplikasi pada mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil *survey* tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas lebih jauh mengenai pendidikan abad 21 dan wacana perubahan kurikulum 2013. Penulisan makalah ini diharapkan membantu pembaca untuk memahami kaitan antara pendidikan abad 21 dan wacana perubahan kurikulum 2013. Berdasarkan hal tersebut penulisan ini difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana gambaran masyarakat abad 21? Pendidikan seperti apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat pada abad 21? Apakah wacana perubahan kurikulum 2013 sudah merepresentasikan kebutuhan abad 21? Bagaimana guru-guru harus bersikap pada kurikulum 2013?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori-teori fenomena pendidikan abad 21, kemudian fenomena tersebut dikomparasikan dengan keadaan pendidikan Indonesia, khususnya dengan wacana perubahan kurikulum 2013. Selanjutnya gambaran fenomena pendidikan abad 21 dan wacana kurikulum 2013 dikomparasikan dengan hasil survei terhadap guru-guru di Jakarta, Bogor, Tangerang, Banten dan Bekasi.

Survey mengenai wacana perubahan kurikulum 2013 dilakukan terhadap 200 guru Sekolah Dasar di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Banten, dari tanggal 1 –s.d. 5 Februari 2013. *Survey* berisi pernyataan-pernyataan mengenai wacana kurikulum 2013, kemudian responden menjawabnya dengan jawaban ya atau tidak. Jawaban responden kemudian diolah dengan program SPSS versi 19, dengan jawaban ya bernilai 2 dan tidak bernilai 1. Jawaban responden kemudian ditabulasi dan diinterpretasi sebagai respon guru terhadap wacana perubahan kurikulum 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat abad 21

Keadaan abad 21 disebut globalisasi yang ditandai oleh banyaknya perubahan-perubahan pada semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pada era globalisasi yang disebut juga era informasi akan terjadi proses perubahan antar negara, antar bangsa, antar budaya tanpa mengenal batas. Selo Sumardjan (1993) mengartikan globalisasi sebagai proses penyebaran rasa,

cipta, dan karsa suatu kebudayaan sehingga diterima dan diadopsi oleh negara lain di seluruh dunia. Pada saat ini dan dimasa mendatang pengaruh era globalisasi akan semakin terasa terutama dengan semakin banyaknya saluran informasi yang tersedia seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, telepon, faksimail, komputer, internet, satelit komunikasi, sekolah bahkan informasi langsung yang dibawa oleh pengunjung (*travelers*). Semua itu dimungkinkan dengan adanya perkembangan pesat di bidang teknologi terutama teknologi komunikasi, informasi, dan transformasi.

Hernawan (2006) mengidentifikasi beberapa ciri abad 21 atau era globalisasi antara lain: meningkatnya interaksi antar warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, meluasnya cakrawala intelektual, munculnya arus keterbukaan dan demokratisasi baik dalam politik maupun ekonomi, memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan generasi muda, meningkatnya kepedulian akan perlunya dijaga keseimbangan dunia, meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis, dan mengaburnya batas kedaulatan budaya tertentu karena tidak terbandungnya informasi.

Dampak globalisasi pada kehidupan sangat banyak sehingga menuntut manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya (*human survival*), artinya manusia dituntut untuk dapat mengendalikan dan memanfaatkan efek-efek dari globalisasi dalam kehidupannya. Manusia adalah pencipta globalisasi, dan manusia itu pula yang harus dapat mengendalikan, menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan globalisasi untuk kepentingan hidupnya.

Bagi masyarakat dan bangsa yang sedang berkembang seperti indonesia, globalisasi ini membawa dampak yang sangat

berpengaruh dalam semua aspek kehidupan misalnya: dalam aspek kebudayaan, proses globalisasi ini menjadikan budaya yang kuat dan *agresif* akan mempengaruhi budaya yang lemah dan pasif. Selo Sumardjan (1993) menyebutkan bahwa budaya yang kuat dan *agresif* adalah budaya yang bersifat *progresif* dengan ciri-ciri sebagai berikut: cara berpikir yang rasional dan realistik, kebiasaan membaca yang tinggi, kemampuan mengembangkan dan menyerap ilmu pengetahuan yang banyak dan cepat, terbuka untuk inovasi bahkan selalu mencari hal-hal baru, pandangan hidup yang berdimensi lokal, nasional, dan *universal*, mampu memprediksi dan merencanakan masa depan, dan teknologi yang senantiasa berkembang dan digunakan.

Adanya dampak globalisasi pada perubahan masyarakat mendorong para ahli pendidikan untuk menganjurkan agar pendidikan melakukan upaya-upaya adaptasi dengan perubahan global. Mario. D Fantine (1986) menyebutkan berbagai implikasi globalisasi terhadap dunia pendidikan yang meliputi aspek kurikulum, manajemen pendidikan, tenaga kependidikan, strategi dan metode pendidikan. Dalam kaitan ini pendidikan dituntut harus mampu menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa.

Kebutuhan Pendidikan Abad 21

Pendidikan pada abad ke-21 menurut Patrick Slattery dalam bukunya *“Curriculum Development In The Postmodern”* harus berdasarkan pada lima konsep, yaitu : Pertama, konsep yang berasal dari Dorothy yang mengatakan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk perubahan sosial, pemberdayaan komunitas dan membebaskan pikiran, tubuh dan spirit

manusia (*that teaching must be directed towards social change, community empowerment, and the liberation of the mind, body, and spirit of individual human beings*).

Kedua, konsep yang berasal dari Thich Nhat Hanh yang mengemukakan tujuh hal yang harus menginspirasi pendidikan yaitu : (1) Jangan mengidolakan atau terikat dengan teori, ideologi atau agama karena tidak ada kebenaran yang mutlak (*Do not idolatrous about or bound any doctrin, theory, or ideology*), (2) Jangan berpikir ilmu pengetahuan yang anda miliki sekarang merupakan yang paling benar, hindari berpikir sempit (*Avoid being narrow-minded and bound to present view*); (3) Jangan memaksakan orang lain, termasuk pada anak-anak dengan cara apapun, baik dengan kekuasaan, ancaman, uang, propaganda bahkan dengan pendidikan (*Do not force others*), (4) Jangan pernah menghindari kontak dengan orang yang menderita atau harus care dengan sesama (*Do not avoid contact with suffering or close your eyes before suffering*), (5) Jangan memelihara kebencian dan amarah (*Do not maintain anger or hatred*), (6) Jangan kehilangan jati diri dalam keadaan apapun (*Do not lose yourself in dispersion and in your surroundings*), (7) Jangan bekerja ditempat yang menghancurkan manusia dan alam (*Do not live with a vocation that is harmful to human and nature*).

Ketiga, konsep yang berasal dari David Ort bahwa dalam konteks pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan penelitian, maka seorang tenaga pendidik atau guru harus menggunakan berbagai kesempatan untuk menghubungkan siswa dengan alam semesta, khususnya agar tercipta keberlangsungan hidup bersama (*must use every opportunity to connect students to the universe, especially the life-sustaining dimension of the global community on our beautiful yet fragile planet*)

Keempat, konsep dari Dietrich Bonhoeffer yang melarang guru melakukan kegiatan pembelajaran dalam keadaan kondisi tertekan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tak seorangpun dapat berpikir kebebasan secara substansial. Secara sederhana, kebebasan adalah sesuatu yang terjadi kepada setiap orang melalui orang lain. Menjadi bebas berarti membebaskan orang lain (*No one can think of freedom as a substance or as something individualistic. Freedom is simply something that happen to me through the other. Being free means being free for the other*).

Berdasarkan pendapat di atas, maka pendidikan di abad 21 harus menjadi pondasi utama dan tempat bersemainya kebaikan untuk mentransformasi individu dan meperbaharui masyarakat. Oleh sebab itu, guru dan murid harus melakukan kolaborasi sebagai pasangan demi keadilan dan kelangsungan kehidupan.

Adapun UNESCO membuat empat Pilar Pendidikan (Hermawan: 2006) untuk menyongsong abad 21, yaitu: (1) *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), (2) *Learning to do* (belajar untuk melakukan), (3) *Learning to be* (belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri dengan kepribadian) (4) *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama).

Adapun format Pendidikan pada abad 21 menurut Asep Herry Hermawan sebagai berikut : (1) *Cyber (E-Learning) Cyber* atau *electronic learning* adalah pembelajaran melalui teknologi computer atau internet. Teknologi belajar ini bisa juga disebut pembelajaran berbasis WEB (*Web-Based Instruction*). (2) Pembelajaran jarak jauh (*Open and Distance Learning*) merupakan model belajar dimana guru dan siswa tidak belajar di dalam suatu tempat dan waktu yang samaserta tidak bertatap muka secara langsung, namun demikian mereka berkomunikasi secara 2 arah yang dilakukan dengan berbagai

cara dan bantuan dari teknologi komunikasi dan informasi. (3) *Quantum Learning* merupakan metode belajar yang disesuaikan dengan cara kerja otak manusia. (4) *Cooperative Learning* merupakan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil yang dapat menumbuhkan kerjasama secara maksimal dan masing-masing siswa belajar satu dengan yang lain. Pembelajaran ini mengarahkan siswa agar mempunyai tanggung jawab yaitu belajar konten yang telah dirancang dan semua anggota kelompok bekerja sama. (5) *Society Technology Science (STS)*. Pendekatan ini termasuk pembelajaran IPA dan IPS di SD. Dalam pembelajaran IPA. Konsep ini merupakan gerakan interdisipliner yang relatif baru dikembangkan untuk mengintegrasikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat. (6) *Accelerated Learning* merupakan suatu kemampuan menyerap dan memahami informasi baru secara cepat serta mempertahankan informasi tersebut. Penguasaan metode belajar akselerasi dapat meningkatkan kemampuan belajar secara lebih efektif.

Kurikulum 2013

Ada tiga faktor yang menjadi alasan perubahan Kurikulum 2013 yaitu pertama, tantangan masa depan diantaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Kedua, kompetensi masa depan yang antaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda.

Ketiga, fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial (*social unrest*). Yang keempat adalah persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter.

Berdasarkan alasan di atas, dilakukan perubahan kurikulum 2013 dengan beberapa wacana sebagai berikut:

Penyederhanaan dan Tematik-Integratif yang didasari adanya permasalahan dalam kurikulum 2006 sebagai berikut: konten kurikulum yang masih terlalu padat; belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap; keterampilan, dan pengetahuan; belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Menambah Jam Pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis *output* menjadi berbasis proses dan *output*) memerlukan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara, seperti AS dan Korea Selatan, akhirakhir ini ada kecenderungan dilakukan menambah jam pelajaran.

Paradigma Belajar Abad 21. Perlu disadari bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, maka guru kini bukan satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Melalui perubahan struktur masyarakat, perkembangan metode pengajaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber. Tema Perubahan Kurikulum 2013 adalah dapat menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Pengembangan kurikulum 2013 untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran.

Mengintegrasikan Mata Pelajaran. Tidak ada penghapusan mata pelajaran, yang adahanya pengintegrasian mata pelajaran. Mata pelajaran IPA dan IPS di sekolah dasar (SD) diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Pengintegrasian ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perkembangan pesat. Ada empat standar dalam kurikulum yang mengalami perubahan, meliputi standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian.

Kompetensi Guru. Pendidikan sebagai bagian dari sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, keharkatan dan kemartabatan suatu bangsa, membutuhkan kehadiran guru. Guru dan kurikulum ibarat dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan. Satu saja tidak ada, maka tidak memiliki nilai apa-apa. Ada empat standar dalam kurikulum yang mengalami perubahan, meliputi standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian. Kesemuanya ini membutuhkan guru yang profesional. Perubahan pada

standar proses misalnya, maka akan berubah pula strategi pembelajarannya. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan untuk mendorong peserta didik, melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan).

Buku Induk Kurikulum 2013. Pemerintah akan menyiapkan buku Induk Kurikulum. Ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan keempat standar pembentuk kurikulum; yang sesuai dengan model interaksi pembelajaran; yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis pengalaman individu dan berbasis deduktif; dan yang mendukung efektivitas sistem pendidikan, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengembangan kurikulum 2013. Ada beberapa buku yang disiapkan.

Pertama, buku panduan guru, mencakup buku panduan pelaksanaan proses pembelajaran dan dan panduan pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa. Kedua, buku siswa, yang berisi kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Buku ini didesain agar siswa mampu melakukan kegiatan observasi, bertanya, asosiasi, dan komunikasi. Dalam pengembangan kurikulum 2013, pemerintah berharap guru, orang tua dan siswa tidak terbebani dengan buku yang dipastikan akan mengalami perubahan.

Sikap Guru pada Kurikulum 2013

Hasil Survei mengenai wacana perubahan kurikulum 2013 terhadap 200 guru Sekolah Dasar di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Banten, dari tanggal 1 –s.d. 5 Februari 2013 menunjukkan bahwa 93% guru sudah tahu akan adanya perubahan kurikulum 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa media berhasil membawa informasi mengenai wacana perubahan kurikulum 2013.

Namun demikian, apakah guru-guru di pelosok pedesaan dan pulau-pulau terpencil sudah tahu akan adanya perubahan kurikulum? Perlu survei lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Sebanyak 85% guru sudah tahu alasan perubahan kurikulum 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa guru-guru sudah responsif terhadap hal-hal yang menjadi bagian dari profesinya. Memahami kurikulum merupakan kewajiban bagi guru-guru. Jika guru mengajar tanpa memahami kurikulumnya, maka pendidikan tidak akan maju.

Sebanyak 75% guru menganggap perlu ada perubahan kurikulum 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan atau inovasi kurikulum dianggap positif oleh para guru. Namun demikian, 25% guru menganggap kurikulum tidak diubah. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk meyakinkan para guru bahwa perubahan kurikulum merupakan hal yang biasa saja. Tetapi menjadi hal yang sangat penting agar setiap perubahan kurikulum hendaknya melibatkan guru karena guru yang paling tahu pendidikan di lapangan.

Sebanyak 60% guru belum mendapatkan sosialisasi perubahan kurikulum 2013. Fakta ini menunjukkan bahwa guru mendapat informasi perubahan kurikulum bukan dari lembaga tempatnya bernaung. Fakta ini juga menunjukkan bahwa guru selama ini hanya menerima perubahan kurikulum tanpa dilibatkan sebelumnya.

Sebanyak 60% guru tidak yakin perubahan kurikulum akan berimplikasi pada mutu pendidikan. Fakta ini nampaknya berkorelasi dengan persepsi bahwa seringkali berganti kurikulum selalu tidak berkolasi dengan peningkatan mutu pendidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa guru apatis dengan kurikulum.

Sebanyak 75% guru tidak setuju integrasi IPA, IPS dengan bahasa Indonesia.

Fakta ini menunjukkan bahwa guru tidak siap atau tidak yakin dengan tematik-integratif, walaupun sebanyak 75% guru-guru sudah paham mengenai tematik integratif sebab selama ini tematik-integratif sudah dilaksanakan di kelas rendah (kelas 1-3). Ketidaksetujuan itu mungkin karena apa yang sudah dilakukan sekarang sudah cocok atau karena tidak tersedia SDM atau buku-buku yang menunjang.

Sebanyak 72% guru tidak setuju bahasa Inggris jadi ekstrakurikuler. Fakta ini menunjukkan bahwa guru-guru menganggap penting bahasa Inggris untuk menunjang kemajuan siswa di masa depan. Sebanyak 60% guru tidak setuju penambahan jam agama. Fakta ini menunjukkan bahwa guru-guru meyakini tidak ada hubungan bahwa semakin banyak pengetahuan agama seseorang maka semakin baik atau soleh seorang tersebut.

Tabel. 1
Pendidikan
abad 21 dan
Kurikulum

Pendidikan abad ke-21		
	Tujuan	Materi
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Community empowerment</i> - <i>Liberation of mind, body, spirit of human beings</i> - <i>Human nature</i> - <i>Life sustaining</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Learning to know, to do, to be, to live Together</i> - Mandiri - Kreatif - <i>Entrepreneurship</i> - Kecakapan Hidup - <i>Pride</i> - Berkarakter 	<ul style="list-style-type: none"> - Agama - PPKn - Sejarah - TIK - IPA - IPS - Lingkungan hidup - Bahasa Inggris - Seni - Matematika - Tradisi (mulok)

Sebanyak 52% guru setuju pendidikan karakter dan sebanyak 76 memahami pendidikan karakter. Fakta ini menunjukkan bahwa guru-guru acuh dengan pendidikan karakter karena persentase yang setuju dengan yang kurang setuju cukup berimbang. Jika pemerintah melalui kurikulum 2013 ini bertujuan untuk meningkatkan karakter, maka harus ada sosialisasi mengenai pendidikan karakter.

Sebanyak 53% guru yakin bisa melaksanakan perubahan kurikulum 2013. Fakta ini menunjukkan guru-guru masih ragu dapat melaksanakan kurikulum 2013. Berdasarkan fakta ini, maka pemerintah harus bekerja keras dalam meyakinkan guru-guru untuk dapat melaksanakan kurikulum 2013.

Analisis Kurikulum 2013

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi catatan dalam pengembangan kurikulum di abad 21 atau abad globalisasi.

Kurikulum			
Proses	Evaluasi	Profil Guru	Politik, Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Elektronik learning</i> - <i>Open & distance learning</i> - <i>Quantum learning</i> - <i>Cooperative learning</i> - <i>Society Technology Science</i> - <i>Accelarated learning</i> - <i>Down to earth</i> - <i>Hands on learning</i> - <i>Discovery Learning</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mastery learning</i> Berkesinambungan Integratif 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Energik</i> - <i>Full of love</i> - Pembelajar - Tidak pantang menyerah - <i>Inovatif</i> - Tanggung jawab - Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejahtera - Bebas - Demokrasi - Aman - HAM - Harmoni - Desentralisasi

Memperhatikan kebutuhan pendidikan abad 21 dan kurikulum, maka ada beberapa hal yang dapat dicatat dari Perubahan Kurikulum 2013 sebagai berikut:

1. Kurikulum 2013 sudah menyadari tantangan abad 21, namun respon yang diberikan dalam kurikulum 2013 belum memadai. Contoh: pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam Bahasa Indonesia, pendidikan PLH dihilangkan, mata pelajaran Bahasa Inggris dijadikan ekstra kurikuler.
2. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran, namun SDM dan sarana prasana tidak maksimal.
3. Implementasi kurikulum 2013 mensyaratkan SDM harus profesional dan adanya master teacher hal ini dapat dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan guru yang akan menjadi terjadinya sumber KKN.
4. Pengadaan buku-buku yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kurikulum 2013 ditangani pusat, hal ini dapat berdampak tersendatnya pendistribusian ke daerah, bertentangan dengan otonomi daerah, dan menjadi sumber korupsi baru di pusat.

KESIMPULAN

Wacana perubahan kurikulum 2013 gaungnya sudah sampai ke guru-guru. Tetapi guru-guru masih ragu apakah kurikulum 2013 bisa merubah mutu pendidikan sesuai tuntutan abad

ke 21. Beberapa wacana yang muncul dalam kurikulum 2013 ternyata tidak sesuai dengan persepsi guru, misalnya kasus pengintegrasian pelajaran IPA dan IPS kedalam bahasa Indonesia dan perubahan bahasa Inggris menjadi ekstra kulikuler.

Dalam konteks globalisasi, kurikulum 2013 belum memberikan respon secara memadai, misalnya dalam respon terhadap kerusakan lingkungan, kebebasan individu, bangga sebagai bangsa, kepedulian sosial, dan menjadikan siswa yang mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Apalagi secara SDM dan sarana prasarana masih sangat kurang.

Ada kekhawatiran, perubahan kurikulum 2013 ini hanya merupakan proyek yang berimplikasi pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), karena perubahan ini harus diiringi dengan pelatihan guru-guru, tenaga kependidikan dan percetakan buku-buku pelajaran yang menyerap APBN tidak sedikit dan tidak terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Herry Hernawan, dkk, 2006. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. UT Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Oemar Hamalik, 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta, Bumi Aksara
- Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo, 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Pisel, K. P. (2001). *The validation of a detailed strategic planning process model for the implementation of distance education in higher education*. Norfolk, VA: Old Dominion University.

Online Journal of Distance Learning Administration, Volume XI, Number II, Summer 2008 University of West Georgia, Distance Education Center

Petrick Slattery. 2006. *Curruculum Development in The Postmodern Era*. New York : Informa Taylor and Francis Group.

Toto Rohimat, 2010, *Kurikulum dan Pembelajaran*,. Bandung : PT. Raja Grafindo Persada

Tedjo Narsoyo, 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Jakarta : Refika Aditama

Nasution. 2011. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarksta : Bumi Aksara.

PERSEPSI GURU KURANG MENDUKUNG TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

***P**enelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru mengenai Kurikulum 2013, khususnya di wilayah Bogor Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan angket. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi guru atas Kurikulum 2013 masih kurang mendukung untuk implementasi Kurikulum 2013. Berdasarkan temuan penelitian ini disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi Kurikulum 2013 dan meningkatkan pendidikan dan latihan (diklat) khususnya mengenai pengembangan pembelajaran dan evaluasinya kepada seluruh guru di penjuru tanah air.*

PENDAHULUAN

Pendidikan dan kurikulum tidak bisa dipisahkan. Pendidikan yang bermutu tidak bisa dilepaskan dari kurikulum yang bermutu. Namun demikian, kurikulum yang bermutu tidak serta merta akan melahirkan pendidikan yang bermutu karena ada pelaksana kurikulum yaitu guru-guru yang bermutu. Oleh sebab itu, guru yang bermutu dan kurikulum yang bermutu harus ada dalam pendidikan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberlakukan Kurikulum 2013 di beberapa sekolah. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa kurikulum adalah jantung dari pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Tanpa kurikulum, maka pendidikan akan kehilangan arah dan makna. Oleh karena fungsi kurikulum sedemikian penting, maka pembuatan kurikulum harus memperhatikan para pengambil keputusan baik itu sekolah, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan semua lembaga yang dapat mempengaruhi anak-anak. Namun pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam pembuatan kurikulum tersebut sering diabaikan sehingga kurikulum yang ada hanya merupakan hasil sekelompok orang saja. Alhasil, kurikulum tersebut tidak mampu memberi nyawa bagi pendidikan.

Kurikulum 2013 menurut Mohammad Nuh (Kompas, 3 Agustus 2013) adalah sebuah kurikulum yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di masa depan mereka. Tantangan masa depan yaitu tuntutan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, ekonomi berbasis pengetahuan serta pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang harus diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum. Sementara tuntutan kompetensi masa depan menurut *partnership 21st century* sangat berbeda dengan tuntutan

keterampilan di abad-20. Keterampilan-keterampilan tersebut diantaranya adalah berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, inovatif dan kreatif serta menguasai teknologi informasi.

Tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Salah satu diantaranya adalah bonus demografi. Bonus demografi merupakan sebuah keuntungan yang akan dimiliki oleh Indonesia dimasa yang akan datang, diperkirakan rentang tahun 2010 - 2035, dimana populasi manusia Indonesia memiliki jumlah usia produktif tinggi, sementara jumlah usia yang non produktif rendah. Adanya bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan penyelenggaraan pendidikan dengan sebaik-baiknya, salah satunya dengan Kurikulum yang adaptif pada perubahan. Salah satu hal penting juga bahwa Kurikulum 2013 untuk membangun dan meningkatkan karakter bangsa (RaisHidayat,2013:52).

Dari sisi latar belakang lahirnya Kurikulum 2013, harus diakui pemerintah berupaya ingin meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan kurikulum. Rais Hidayat dan Yuyun Elizabeth dalam Jurnal Pedagogia Volume 5 Nomor 1 Universitas Pakuan menjelaskan faktor-faktor lahirnya Kurikulum 2013 yaitu: Pertama, tantangan masa depan diantaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Kedua, kompetensi masa depan yang antaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga

negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Ketiga, fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial (*social unrest*). Keempat adalah persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter.

Rais Hidayat dan Yuyun Elizabeth (2013:5) juga mencatat beberapa wacana yang terdapat dalam Kurikulum 2013 yaitu: Pertama, penyederhanaan dan tematik-integratif. Wacana ini muncul didasari adanya permasalahan dalam kurikulum 2006 sebagai berikut: konten kurikulum yang masih terlalu padat; belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; kompetensi belum menggambarkan secara holistik baik domain sikap; keterampilan maupun pengetahuan; belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.

Kedua, wacana menambah jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output) memerlukan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara, seperti AS dan Korea Selatan, akhir-akhir ini ada kecenderungan dilakukan menambah jam pelajaran.

Ketiga, wacana paradigma belajar abad 21. Perlu disadari bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, maka guru kini bukan satu-satunya sumber pengetahuan di kelas. Melalui perubahan struktur masyarakat, perkembangan metode pengajaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber. Tema Perubahan Kurikulum 2013 adalah dapat menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Pengembangan kurikulum 2013 untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran.

Keempat, wacana mengintegrasikan mata pelajaran. Tidak ada penghapusan mata pelajaran, yang ada hanya pengintegrasian mata pelajaran. Mata pelajaran IPA dan IPS di sekolah dasar (SD) diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Pengintegrasian ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perkembangan pesat. Ada empat standar dalam kurikulum yang mengalami perubahan, meliputi standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian.

Kelima, wacana kompetensi guru. Pendidikan sebagai bagian dari sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, keharmonisan dan kemartabatan suatu bangsa, membutuhkan kehadiran guru. Guru dan kurikulum ibarat dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan. Satu saja tidak ada, maka tidak memiliki nilai apa-apa. Ada empat standar dalam kurikulum yang mengalami perubahan,

meliputi standar kompetensi lulusan, proses, isi, dan standar penilaian. Kesemuanya ini membutuhkan guru yang profesional. Perubahan pada standar proses misalnya, maka akan berubah pula strategi pembelajarannya. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan untuk mendorong peserta didik, melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan).

Keenam, wacana buku induk Kurikulum 2013. Pemerintah akan menyiapkan buku Induk Kurikulum. Ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan keempat standar pembentuk kurikulum; yang sesuai dengan model interaksi pembelajaran; yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis pengalaman individu dan berbasis deduktif; dan yang mendukung efektivitas sistem pendidikan, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengembangan kurikulum 2013. Ada beberapa buku yang disiapkan. Pertama, buku panduan guru, mencakup buku panduan pelaksanaan proses pembelajaran dan dan panduan pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa. Kedua, buku siswa, yang berisi kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Buku ini didesain agar siswa mampu melakukan kegiatan observasi, bertanya, asosiasi, dan komunikasi. Dalam pengembangan kurikulum 2013, pemerintah berharap guru, orang tua dan siswa tidak terbebani dengan buku yang dipastikan akan mengalami perubahan.

Dalam rangka memperlancar implementasi Kurikulum 2013 ini, pemerintah sedang dan sudah mengujicoba Kurikulum 2013 di lebih dari 6500 sekolah di seluruh Indonesia. Kritik yang muncul terhadap ujicoba Kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 hanya diujicobakan di sekolah-sekolah dalam kategori "baik", kemudian bagaimana dengan implementasi Kurikulum

2013 disekolah dalam kategori “setengah baik” dan “kurang baik”? (Kompas, tgl 18 Agustus 2013). Atas dasar kritik ujicoba Kurikulum 2013 tersebut, maka implementasi Kurikulum 2013 menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Secara teoritik ada beberapa hal yang diduga menjadi penghalang dalam implementasi Kurikulum 2013 antara lain hambatan cara berpikir (*mind set*) dari para guru, hambatan budaya (*cultural set*), hambatan birokrasi, hambatan manajemen, hambatan sumber daya seperti sarana dan prasarana di sekolah, dan hambatan sumber daya manusia (SDM) seperti kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Salah satu hal penting dalam implementasi Kurikulum 2013 yaitu bagaimana persepsi guru atas Kurikulum 2013 tersebut. Persepsi guru terhadap kurikulum 2013 terbagi dalam tiga kategori, yaitu persepsi yang mendukung, persepsi yang menolak dan persepsi netral. Menurut teori, jika secara persepsi guru mendukung atas sebuah kurikulum, maka implementasi kurikulum tersebut akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, persepsi guru yang tidak mendukung, maka akan menjadi penghalang atau *barier* dalam pelaksanaan kurikulum. Oleh sebab itu, bagaimana persepsi guru atas Kurikulum 2013 sangat penting untuk diketahui karena akan dapat membantu dalam meramalkan sejauh mana kesuksesan implementasi Kurikulum 2013 di masa yang akan datang.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan sesuatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Seperti dikatakan oleh David Krech (1962:20) bahwa “..

the cognitive map of the individual is not, then, a photographic representation of the physical world; it is, rather, a partial, personal construction in which certain objects, selected out by the individual for a major role, are perceived individual manner. Every perceiver is, as it were, to degrees a nonrepresentational artist, painting a picture of the world that expresses his individual view of reality”.

Berdasarkan pendapat David Krech (1962) diatas dapat dikatakan bahwa persepsi terkait dengan peta kognitif individu, bukan penyajian fotografik dari suatu kenyataan fisik. Persepsi merupakan konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai obyek tertentu. Persepsi merupakan hasil seleksi seseorang atas objek tertentu sesuai dengan kepentingannya. Persepsi lahir menurut bagaimana kebiasaan orang tersebut memandang objek. Secara ringkas pendapat Krech tersebut bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik suatu kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya.

Persepsi menurut Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2008: 86) adalah “.....*the process by wich an individual gives meaning to the environment”.* Ketika individu memberikan makna pada lingkungan tersebut melibatkan upaya pengorganisasian dan pemaknaan terhadap berbagai stimulus melalui pengalaman psikis individu tersebut.

Persepsi dapat pula didefinisikan sebagai suatu proses yang mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan inderanya yang kemudian memberikan makna kepada lingkungan mereka. Oleh karena itu, apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif (Robbins, 2003:160).

Berikut adalah bagan yang menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi persepsi seseorang. Karena faktor yang mempengaruhi persepsi sangat banyak dan beragam, maka persepsi setiap orang atas objek tertentu bisa berbeda-beda.



Bagan 1.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi (Robbins, 2003:164)

Memperhatikan bagan bagaimana persepsi dipengaruhi berbagai faktor sebagaimana tergambar dalam bagan di atas, maka persepsi guru pada Kurikulum 2013 harus benar-benar positif. Agar persepsi guru positif terhadap Kurikulum 2013, maka Kurikulum 2013 tersebut harus benar-benar sesuai dengan sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan sesuai keadaan yang diinginkan oleh para guru. Pertanyaannya adalah apakah Kurikulum 2013 lahir dengan melibatkan guru secara maksimal?

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, artikel ini akan memaparkan hasil survei persepsi guru terhadap Kurikulum 2013 di Bogor Jawa Barat. Walaupun penelitian ini mengandung memiliki sejumlah keterbatasan, namun penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight atau wawasan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam *implementasi* Kurikulum 2013.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode survei terhadap 200 orang guru dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan persepsi guru terhadap kurikulum 2013. Pertanyaan survei meliputi pengetahuan dan kesiapan para guru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 serta bagaimana kesiapan sekolah-sekolah baik dalam sarana, sumber daya dan sumber daya manusia dalam implementasi Kurikulum 2013. Survei dilaksanakan 1-5 September 2013 di wilayah Bogor Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini yaitu guru PNS dan Non PNS yang berjumlah sekitar 8916 (data tahun 2010). Survei ini dilakukan terhadap 51,5% PNS dan 48,5% non PNS, 43% guru pria dan 53% guru wanita, jenjang umur dari 20-25 sebanyak: 10,4% , umur 26-30: 28,2%, 31-35: 19,8% , 36-40: 21,3% ,41-45: 5,9% , 46-50: 7,9% , 51-55: 5% , dan 56-60: 1,5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei persepsi guru terhadap Kurikulum 2013 se-Bogor ditemukan bahwa sebanyak 60,4 % guru sudah mengerti tujuan diadakannya kurikulum 2013, dan 36,9 % guru menjawab tidak mengerti. Berdasarkan data ini maka

pemerintah masih perlu bekerja keras agar para guru benar-benar mengerti tujuan adanya kurikulum 2013. Tanpa guru memahami tujuan lahirnya kurikulum, maka implementasi Kurikulum 2013 takkan seperti yang akan diharapkan. Guru akan terjebak dengan tradisi pada kurikulum sebelum-sebelumnya. Implikasinya, pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru harus ditekankan pada bagaimana guru memahami dari tujuan lahirnya Kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil survei persepsi guru terhadap kurikulum 2013 se-Bogor ditemukan bahwa sebanyak 61,9 % mengatakan kurikulum 2013 mendesak untuk dilaksanakan, 30,2 % mengatakan tidak mendesak untuk dilaksanakan, dan sisanya sebesar 7,4% menyatakan tidak tahu. Berdasarkan data ini maka dapat dikatakan bahwa penerimaan guru terhadap kurikulum 2013 masih perlu diyakinkan bahwa kurikulum 2013 merupakan hal yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Jika guru masih berpendapat bahwa pelaksanaan Kurikulum 2013 belum mendesak, maka guru akan tetap mengajar dengan metode dan pendekatan kurikulum yang sebelum-sebelumnya.

Hasil survei ini menemukan sebanyak 52% guru setuju bahwa perubahan-perubahan kurikulum mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 35,6% mengatakan tidak setuju, dan sisanya sebanyak 11,9% menjawab tidak tau. Berdasarkan data ini maka dapat dikatakan bahwa pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin bahwa Kurikulum 2013 akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Mengapa masih banyak guru yang tidak percaya kurikulum baru akan meningkatkan mutu pendidikan? Hal ini diduga karena sering terjadi perubahan kurikulum tanpa diiringi dengan perubahan kualitas guru dan sarana prasarana.

Hasil survei ini menemukan bahwa hanya 38,6% guru telah

mengikuti sosialisasi kurikulum 2013, 60,9% belum mengikuti, dan sisanya sebanyak 5% menjawab tidak tau. Berdasarkan data ini maka pemerintah harus dengan segera mengadakan sosialisasi kurikulum 2013 ke seluruh guru di Indonesia.

Sosialisasi sangat penting karena guru merupakan ujung tombak. Jika wilayah sekitar Bogor saja yang notabene merupakan wilayah yang tidak jauh dari pusat (Jakarta) 60% belum menerima sosialisasi Kurikulum 2013, bagaimana dengan wilayah Indonesia yang tergolong 3T (terdepan, tertinggal, terdalam) (Yuyun Elizabeth, 2003:100). Dalam sosialisasi apapun di negara ini faktor paling menyulitkan adalah faktor geografis yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Marauke. Pemerintah hendaknya menggunakan segala cara, termasuk menggunakan teknologi komunikasi seperti internet dalam sosialisasi Kurikulum 2013.

Hasil survei ini menemukan bahwa 52% guru setuju bahwa perubahan-perubahan kurikulum mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 35,6% mengatakan tidak setuju, dan sisanya sebanyak 11,9% menjawab tidak tau. Berdasarkan data ini maka dapat dikatakan bahwa pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin bahwa Kurikulum 2013 akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Selama ini Indonesia dipandang kurang menyelenggarakan pendidikan bermutu sehingga menyebabkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global terpuruk.

Menurut catatan UNDP tahun 2006, *Human Development Index* (HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun tahun 2007, UNDP menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Sementara berdasarkan *Global Competitiveness Indeks* tahun 2008 menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari 134 negara (Sauri, 2013).

Hasil survei ini menemukan bahwa sebanyak 28,2% guru mengatakan sudah mengetahui tentang proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013, sebanyak 38,1 guru menjawab belum mengetahui, dan sisanya sebanyak 33,2% menjawab tidak tau. Kurikulum pada hakikatnya tidak semata-mata perubahan mata pelajaran dan jumlah jam pengajaran, namun termasuk bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Fakta bahwa hanya ada 30 guru yang mengerti bagaimana pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dilakukan, merupakan fakta yang mengerikan. Karena sesungguhnya proses pembelajaran merupakan hal yang paling menentukan dalam peningkatan mutu pendidikan. Sebaik apapun kurikulum 2013 jika gurunya belum mengerti bagaimana membelajarkan peserta didiknya, maka kurikulum tersebut belum bisa dipandang berhasil.

Tilaar (2013:35) mencatat bahwa kegagalan Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) sebagai kurikulum super lebih karena gagalnya guru dalam menerapkan kurikulum tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus berupaya keras agar guru-guru mampu membelajarkan siswa sesuai dengan Kurikulum 2013. Adapun proses belajar yang dituntut di masa depan adalah kolaborasi, multidisipliner, belajar mengambil risiko, trial and error, kreativitas, motivasi intrinsik melalui permainan, passion, dan tujuan yang jelas (Tilaar, 2013).

Hasil survei ini menemukan bahwa 24,8% guru mengatakan sudah mengetahui tentang proses evaluasi yang harus dilakukan dalam kurikulum 2013. Sebanyak 34,7 guru menjawab tidak dan sisanya sebanyak 40,1% menjawab tidak tahu. Melakukan evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kurikulum. Komponen kurikulum yang tidak bisa dipisahkan antara lain: tujuan, materi pelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Jika hanya ada 24,8% guru yang mengerti proses dalam evaluasi

pembelajaran dalam Kurikulum 2013, maka dapat dikatakan sistem evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 itu harus mendapatkan prioritas dalam sosialisasi kurikulum. Apa yang diajarkan tercapai atau tidak, terlihat dari apa yang terlihat dari hasil evaluasi. Oleh karena itu, guru-guru harus menguasai sistem evaluasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013.

Hasil survei menemukan bahwa sebanyak 14,4% guru yakin bahwa kurikulum 2013 lebih baik dari kurikulum sebelumnya, sebanyak 52% guru menyatakan tidak yakin dan sisanya sebanyak 33,7% menjawab tidak tahu. Secara teoritik, persepsi yang baik terbangun dari sebuah keyakinan yang mantap atas sebuah objek. Persepsi bahwa Kurikulum 2013 akan lebih baik dari Kurikulum sebelumnya hanya sebesar 14,4% saja. Data ini berarti Kurikulum 2013 belum mengubah mindset guru bahwa pendidikan akan berjalan lebih baik dengan kurikulum 2013. Dari fakta ini dapat dikatakan pemerintah harus bekerja keras meyakinkan guru-guru bahwa Kurikulum 2013 akan berimplikasi lebih baik pada pendidikan.

Hasil survei menemukan sebanyak 36,6% guru mengatakan bahwa pemerintah belum melibatkan guru secara maksimal dalam pelaksanaan kurikulum 2013, sebanyak 11,9% guru menjawab pemerintah sudah melibatkan guru dalam pelaksanaan kurikulum secara maksimal, dan sisanya sebanyak 51% menjawab tidak tahu. Data ini merupakan klimaks dari pertanyaan mengapa guru lebih banyak yang tidak tahu bagaimana proses pembelajaran Kurikulum 2013, mengapa guru tidak tahu bagaimana sistem evaluasi Kurikulum 2013, dan mengapa guru tidak yakin Kurikulum 2013 itu lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Semua pertanyaan itu terjawab karena dalam proses pembuatan Kurikulum 2013 guru kurang merasa dilibatkan secara maksimal. Secara teoritik, pembuatan kurikulum dapat dilakukan secara *top down* (dari atas ke

bawah) yaitu kurikulum dibuat oleh para pejabat pendidikan dan *bottom up* (dari bawah ke atas) yaitu kurikulum dibuat oleh guru-guru kemudian dilegitimasi oleh para pejabat pendidikan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih lebih dominan menggunakan praktik *top down*. Fakta ini menunjukkan bahwa walaupun guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, namun peranserta guru dalam pembuatan kurikulum diabaikan.

Pemerintah berdasarkan latar belakang yang sudah kita ketahui berniat memperbaiki mutu pendidikan melalui perbaikan kurikulum. Namun niat yang baik saja tidak cukup, harus ada langkah kongkrit yang membuat semua pihak merasa memiliki dan tanggungjawab atas peningkatan mutu pendidikan. Kritik atas implementasi Kurikulum 2013 selama ini yaitu pemerintah terlalu terburu-buru dan tidak mendasarkan pada evaluasi kurikulum sebelumnya. Apalagi menurut survei ini, guru merasa kurang dilibatkan dalam pembuatan kurikulum. Dapat diprediksi, pelaksanaan Kurikulum 2013 nanti akan mengalami hambatan yang datang dari guru itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 benar-benar sesuai dengan sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan sesuai keadaan yang diinginkan oleh para guru.

Hasil survei ini menemukan sebanyak 13,9% guru mengatakan setuju bahwa kurikulum 2013 pelaksanaannya lebih mudah dari kurikulum sebelumnya, sebanyak 35,1 guru menjawab tidak, dan sisanya sebanyak 51% menjawab tidak tahu. Jika kita observasi ke lapangan, maka sebagian besar guru ingin membelajarkan siswa dengan cara-cara yang mudah namun efektif dan efisien. Ada pendapat bahwa guru dalam kurikulum sebelumnya terlalu dibebani dengan tugas membuat administratif yang bertele-tele dan melelahkan. Tentu mereka

mengharapkan lahirnya Kurikulum 2013 bisa meringankan mereka dalam tugas administratif. Namun berdasarkan data ini guru-guru belum bisa menyambut dengan sukahati bahwa tugas mengajar mereka akan lebih ringan. Kurikulum 2013 memang menyiapkan buku pegangan murid dan guru, namun nampaknya guru-guru belum yakin buku pegangan tersebut akan meringankan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerja keras bahwa buku pegangan guru dan murid dapat meringankan guru-guru dalam bertugas.

Hasil survei menemukan bahwa 50,5% guru mengatakan siap jika diperintahkan untuk melaksanakan kurikulum 2013, sebesar 48,5 guru menjawab tidak siap, dan sisanya sebanyak 1% menjawab tidak tahu. Data ini menunjukkan bahwa kurikulum apapun bagi guru-guru tidak soal, selama diperintahkan pasti akan dilaksanakan. Namun adanya persentase sebesar 48,5% guru tidak siap melaksanakan Kurikulum 2013 merupakan data yang menarik karena ini berarti hampir setengah dari guru yang disurvei tidak siap. Apakah implementasi kurikulum akan berhasil jika gurunya memang tidak siap? Tentu jawabnya guru harus siap, oleh karena itu pemerintah harus benar-benar melakukan upaya agar para guru suka atau tidak suka untuk bersiap melaksanakan Kurikulum 2013. Jika upaya menyiapkan ini lemah, maka dapat diprediksi pelaksanaan Kurikulum 2013 akan berjalan dengan kurang baik.

Hasil survei menemukan bahwa 18,3% guru mengatakan sekolah tempat mereka bekerja sudah melaksanakan kurikulum 2013, sebanyak 81,2% guru menjawab belum melaksanakan, dan sisanya sebanyak 0,5% menjawab tidak tahu. Dalam uji coba implementasi Kurikulum 2013 memang ada sekolah yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan Kurikulum 2013, ada juga sekolah yang sukarela melaksanakan kurikulum 2013 karena secara faktual sekolah mereka sudah melaksanakan

pembelajaran yang senapas dengan kurikulum 2013. Data bahwa guru-guru belum merasakan kurikulum 2013 karena sebagian besar sekolah (80%) belum melaksanakan Kurikulum 2013. Masih besarnya sekolah yang tidak termasuk ujicoba atau melaksanakan Kurikulum 2013 menjadi tugas berat bagi pemerintah agar bagaimana sekolah-sekolah nanti bisa mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan benar, efektif dan efisien. Pemerintah harus membentuk tim sosialisasi dan pemantau pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan sebaik-baiknya.

Hasil survei ini menemukan sebanyak 36,6% guru mengatakan sekolah tempat mereka bekerja mempunyai fasilitas yang siap dalam mendukung pelaksanaan kurikulum 2013, sebanyak 33,7 guru menjawab tidak siap, dan sisanya sebanyak 29,7% menjawab tidak tahu. Data ini menunjukkan kebutuhan guru akan arti penting dari fasilitas sekolah. Jika kurikulum 2013 ingin berhasil, maka pemerintah harus memenuhi sarana pendukung sesuai standar sarana prasarana yang telah ditentukan. Banyak sekolah rusak dan tidak memadai untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Jika wilayah Bogor saja banyak guru menyatakan sarana dan prasana sekolahnya tidak siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013, bagaimana dengan di daerah 3T? Oleh karena itu, kesiapan sarana dan prasana harus tetap diperhatikan dalam implementasi Kurikulum 2013.

Hasil survei menemukan sebanyak 44,1% guru mengatakan sekolah tempat mereka bekerja memiliki sumber daya manusia yang siap dalam melakukan kurikulum 2013, sisanya sebanyak 22,8 guru menjawab tidak punya SDM yang siap, dan sisanya sebanyak 32,7 % menjawab tidak tahu. Data ini menunjukkan hanya setengah dari guru yang ada disekolah yang siap melaksanakan Kurikulum 2013. Jika ada 6 guru di satu sekolah,

maka 3 diantaranya tidak siap dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Adanya data ini hendaknya implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan setelah dilakukan pendidikan dan latihan yang memadai agar guru-guru di sekolah benar-benar memiliki kesiapan mental dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan Kurikulum 2013.

Survei ini juga meminta pendapat dari para guru mengenai faktorapa yang paling menentukan keberhasilan implementasi kurikulum (Rusman, 2011), ternyata faktor kualitas kinerja guru merupakan penentu utama keberhasilan implementasi kurikulum yaitu sebesar 42%. Adapun faktor-faktor penentu lainnya yaitu: Manajemen Sekolah: 23,8%, Pemanfaatan Sumber Belajar, Penggunaan Media Pembelajaran, dan Penggunaan Strategi dan Model pembelajaran sebesar: 18,3%, dan *Monitoring* Pelaksanaan Kurikulum: 14,9%. Berdasarkan data ini, maka bagaimana meningkatkan mutu kinerja guru harus menjadi faktor utama dalam implementasi kurikulum. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualifikasi pendidikan guru dan memotivasi guru baik dengan motivasi instrinsik maupun ekstrinsik. Faktor selanjutnya yaitu meningkatkan mutu manajemen sekolah. Fakta dilapangan terlihat bahwa manajemen pendidikan kurang berjalan karena keterbatasan *leadership*. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum 2013 harus pula memperhatikan faktor manajemen sekolah, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan kualitas kepemimpinan.

Hasil survei ini menemukan sebanyak 18,3% guru mengatakan yakin bahwa kurikulum 2013 mampu memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, sebanyak 27,2 guru menjawab tidak, dan sisanya sebanyak 53% menjawab tidak tahu. Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa guru-guru belum memiliki keyakinan yang kuat bahwa Kurikulum 2013 akan

menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Implikasi dari fakta ini adalah pemerintah diharapkan mampu meyakinkan, khususnya dengan memberikan *best practices* dari berbagai sekolah bahwa Kurikulum 2013 benar-benar akan membawa perubahan berarti pada pendidikan nasional. Jika selama ini uji coba hanya dilakukan di sekolah-sekolah yang siap melaksanakan Kurikulum 2013, maka sebaiknya pemerintah juga menunjukkan hasil uji coba dari sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan yang umumnya dimiliki sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil survei persepsi guru terhadap Kurikulum 2013, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan guru-guru mengenai Kurikulum 2013, khususnya pengetahuan mengenai tujuan lahirnya kurikulum 2013 dan pengetahuan mengenai pembelajaran dan evaluasi dalam Kurikulum 2013 masih kurang memadai. Berdasarkan fakta tersebut, maka agar implementasi Kurikulum 2013 berjalan efektif dan efisien maka disarankan agar pemerintah melakukan lebih banyak lagi sosialisasi dan diklat kepada para guru di seluruh Indonesia.
2. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru harus menerima Kurikulum 2013, sementara mereka kurang merasa dilibatkan dalam pembuatannya. Berdasarkan temuan tersebut maka di masa mendatang pelibatan guru dalam pembuatan kurikulum perlu dimaksimalkan.
3. Peningkatan kualitas kinerja guru, peningkatan manajemen sekolah, dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah

merupakan faktor-faktor penting dalam implementasi kurikulum. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja guru merupakan faktor utama dan pertama dalam implementasi kurikulum. Berdasarkan temuan tersebut disarankan agar pemerintah terus menerus melakukan peningkatan kualitas kinerja guru dengan terus memberikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik sehingga para guru mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- David Krech, Richards S. Crutchfield; dan Egerton L Ballachy. 1962. *Individual in Society*. New York, McGraw-hill Book Company.
- Ivancevich, Konopaske, Matteson. 2008. *Organizational Behavior and Management*. Singapore: McGraw Hill.
- Nasution. 2011. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarksta : Bumi Aksara.
- Oemar Hamalik, 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta, Bumi Aksara
- Petrick Slattery. 2006. *Curruculum Development in The Postmodern Era*. New York : Informa Taylor and Francis Group.
- Rais Hidayat. 2013. *Belajar Pendidikan Karakter Dari Cina, Prosiding Seminar Nasional, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Pascasarjana S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Juni 2003*.

- Rais Hidayat dan Yuyun Elizabeth. 2013. *Pendidikan Abad 21 dan Kurikulum 2013: Survei terhadap Guru-guru Sekolah Dasar Mengenai Wacana Perubahan Kurikulum 2013*, *Jurnal Pedagogia*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2013, ISSN: 1693-5799.
- Rusman. 2011. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sofyan Sauri, *Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu*, file.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 15 Mei 2013.
- Stephen P. Robbins. 2003. *Perilaku Organisasi*. PT INDEKS Kelompok Gramedia:Jakarta.
- Tilaar. 2013. *Menyiapkan Generasi Emas Menuju Indonesia, 2045*. Jakarta: Lemabaga Manajemen UNJ.
- Yuyun Elizabeth Patras. 2013. *Perspektif Budaya, Ekonomi, dan Politik dalam Pendidikan 3T dan Pembentukan Karakter Bangsa, Prosiding Seminar Nasional, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Pascasarjana S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013*.